

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber

Telp. (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025

Website : <http://cirebonkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER

KP. 45611

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
Nomor : 790/LHR. 513 /INSP

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini, mencakup beberapa hal berikut:

1. Belum adanya kesesuaian jumlah Indikator Kinerja Sasaran yang disajikan dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan Laporan Kinerja;
2. Penyajian analisis capaian indikator kinerja sasaran yang bersifat komposit (lintas SKPD) belum seluruhnya memadai mengingat analisis yang dilakukan hanya terbatas pada capaian SKPD tertentu dan belum mencakup keterkaitan SKPD lainnya;
3. Indikator kinerja sasaran yang dipergunakan belum seluruhnya bersifat "SMART" dan/atau didukung dengan rumusan/formulasi yang jelas;
4. Penyajian capaian indikator kinerja sasaran pada umumnya belum membandingkan dengan standar nasional, misal Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Laporan Kinerja belum seluruhnya menyajikan upaya-upaya perbaikan yang akan dan telah dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target;

Terhadap permasalahan di atas, manajemen Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah berupaya menindaklanjutinya secara berjenjang dengan melaksanakan serangkaian tindakan yang mengarah pada perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meskipun untuk penyelesaiannya masih memerlukan waktu.

Dikeluarkan di Sumber
Pada tanggal 26 Maret 2018



INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon memuat informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2018.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Sumber
Maret 2019
Hj. BUPATI CIREBON,

DICKY SAROMI

EXECUTIVE SUMMARY

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan target capaian kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 9 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran atau 55.56 % kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran atau 11.11% kategori kurang (tidak mencapai target). 3 indikator sasaran atau 33.33 % kewenangan pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Misi II memiliki 1 tujuan 5 sasaran dan 25 indikator kinerja:
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 14 indikator sasaran atau 56% kategori baik sekali (mencapai target), 9 indikator sasaran atau 36% kategori baik (mencapai

target) dan 2 indikator sasaran atau 8% kewenangan pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 17 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 6 indikator sasaran atau 35,29% kategori baik sekali (melampaui target), 5 indikator sasaran atau 29,41% kategori baik (mencapai target), 2 indikator sasaran atau 11,76% dan 2 indikator sasaran atau 11,76% kategori cukup kurang (tidak mencapai target) dan 4 indikator sasaran atau 23,53% katagori kurang (tidak mencapai target).
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 100 % kategori baik sekali (melampaui target).
- Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 40% kategori baik sekali (melampaui target), 5 indikator sasaran atau 50% kategori baik dan(mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 10% katagori kurang (tidak mencapai target).
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran atau 55,56% kategori baik sekali (melampaui target), 3 indikator sasaran atau 33,33% kategori baik dan(mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 11,11% katagori cukup (tidak mencapai target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 37 indikator sasaran atau 57,07% Baik Sekali, 22 indikator sasaran atau 24,79% Baik, 4 indikator sasaran atau 5,49% Cukup, 5 indikator sasaran atau 9,48% kurang dan 5 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **122,59 %** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 **Baik Sekali**.

Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 3.855.244.761.111,73 dari pagu anggaran Rp. 3.598.094.858.227,07, sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 257.149.902.884,66.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat terwujud berkat dukungan dan sinergitas semua elemen masyarakat Kabupaten Cirebon, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

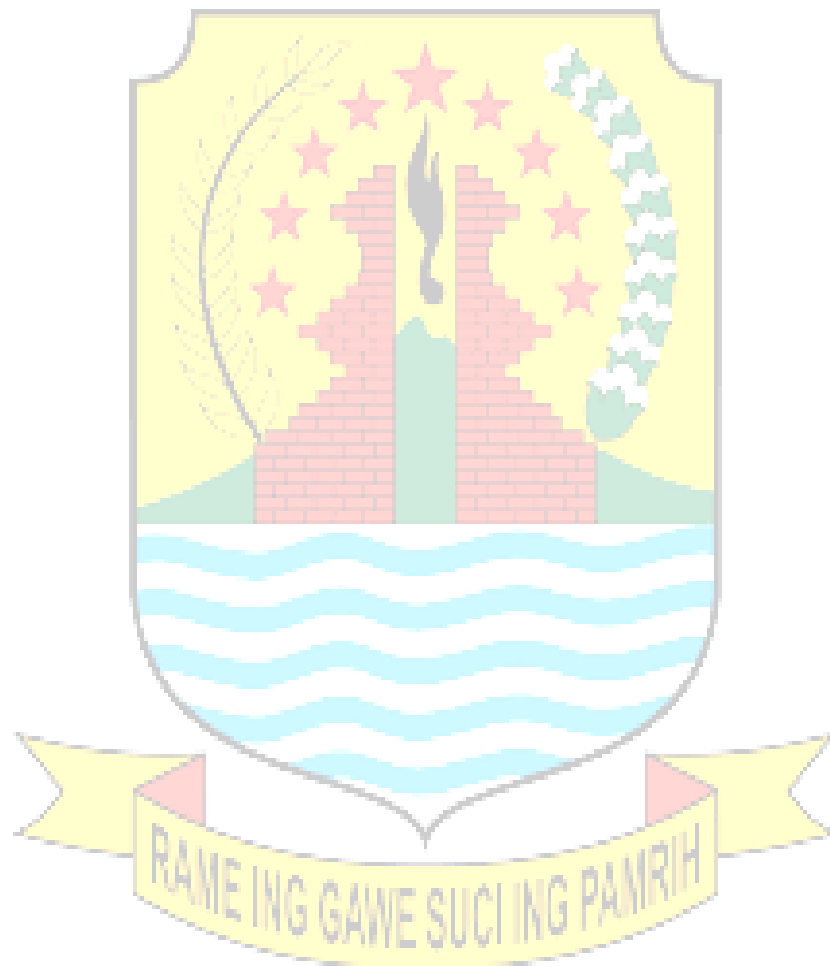


DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-3
C. Dasar Hukum	I-3
D. Gambaran Umum Daerah.....	I-5
E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	I-23
F. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2018.....	I-24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	II-1
B. Indikator Kinerja Utama	II-5
C. Rencana Kerja Tahunan	II-9
D. Perjanjian Kinerja 2018	II-10
E. Rencana Aksi Daerah	II-17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	III-2
1. Pengukuran Kinerja	III-2
2. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Periode RPJMD	III-38
B. Akuntabilitas Keuangan	III-45
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	IV-1
B. Rencana Tindak Lanjut	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Adminitrasi Kabupaten Cirebon I.6



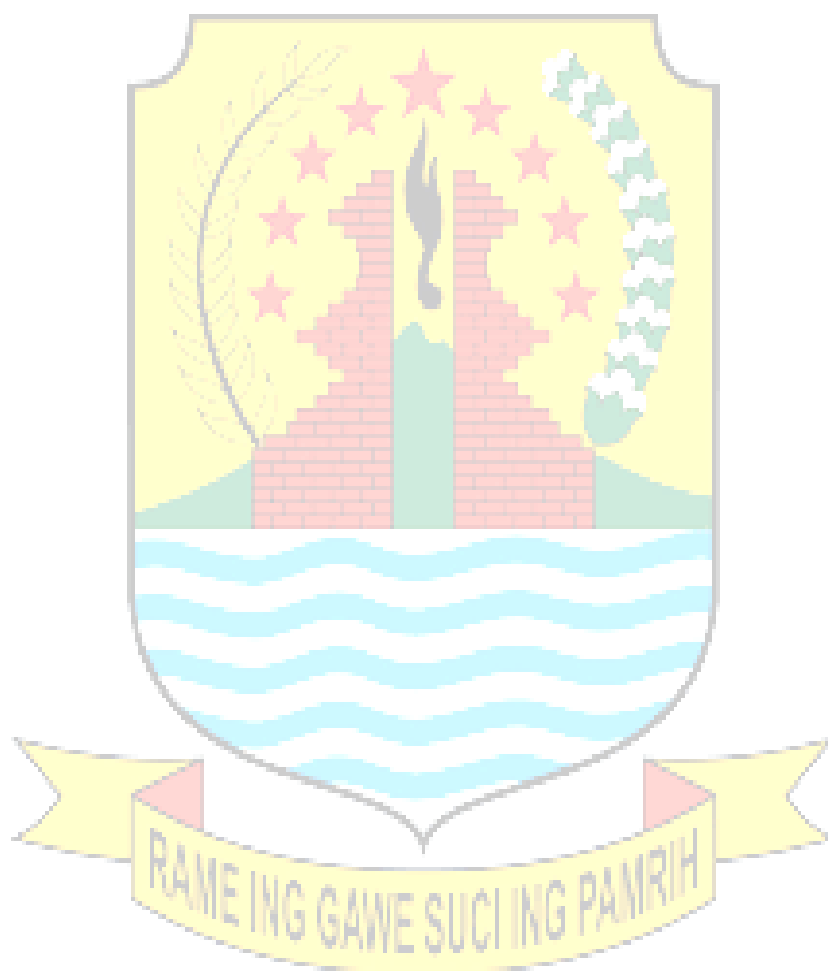
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon.....	I.7
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon.....	I.9
Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon.....	I.11
Tabel 1.4. Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Struktur Usia Tahun 2018.....	I.12
Tabel 1.5. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon Tahun 2012-2018.....	I.14
Tabel 1.6. PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018.....	I.15
Tabel 1.7. PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018.....	I.16
Tabel 1.8. SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.....	I.17
Tabel 1.9. Kecamatan di Kabupaten Cirebon.....	I.18
Tabel 1.10. Kelurahan di Kabupaten Cirebon.....	I.20
Tabel 1.11. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	I.21
Tabel 1.12. Jumlah ASN Berdasarkan Ruang Golongan.....	I.21
Tabel 1.13. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan.....	I.22
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran.....	II.3
Tabel 2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	II.4
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Pemkab Cirebon.....	II.6
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja 2017 Pemkab Cirebon.....	II.11
Tabel 3.1. Katagori Capaian Kinerja.....	III.3
Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Sasaran/IKU.....	III.4
Tabel 3.3. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Aktifitas Kehidupan Beragama, Keshalehan Sosial Masyarakat dan Toleransi antar dan Intern Umat Beragama.....	III.6
Tabel 3.4. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pendidikan Untuk Semua.....	III.9

Tabel 3.5. Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.....	III.13
Tabel 3.6. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Berketerampilan dan Berjiwa Kewirausahaan	III.15
Tabel 3.7. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon Sebagai Daerah Wisata Berbasis Budaya	III.18
Tabel 3.8. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kemandirian Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga.....	III.19
Tabel 3.9. Target dan Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Konektifitas Antar Wilayah	III.20
Tabel 3.10. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pembangunan Prasarana Wilayah yang Memadai	III.22
Tabel 3.11. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Cirebon yang Bersih, Asri dan Lestari.....	III.25
Tabel 3.12. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat	III.27
Tabel 3.13. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat.....	III.28
Tabel 3.14. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang lebih Berkualitas	III.30
Tabel 3.15. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima.....	III.32
Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah	III.34
Tabel 3.17. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih	III.35
Tabel 3.18. Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2018..	III.46
Tabel 3.19. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018..	III.46
Tabel 3.20. Target dan Realisasi PAD Tahun 2018.....	III.47
Tabel 3.21. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018...	III.47

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Tahun 2018 III.48

Tabel 3.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018.... III.49



1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja daerah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Di era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia.

Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada berbagai regulasi diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu mempertanggungjawabkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan kongkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan serta 8 urusan pilihan pemerintahan kepada publik sebagaimana dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada publik secara baik.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk menjadi instrumen evaluasi dan umpan balik perbaikan terhadap berbagai capaian kinerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja terukur yang telah dan seharusnya dicapai, dan menyediakan media tolok ukur capaian kinerja dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon, yaitu:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
 - i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas kinerja Pemerintah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) Kabupaten Cirebon;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
 - n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13 Seri A.3); dan

- p. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60 Seri A.5).

D. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Fisik

Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108^o19'30"-108^o50'03" Bujur Timur (BT) dan 6^o30'58"- 7^o00'24" Lintang Selatan (LS).

Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 km² yang meliputi 40 kecamatan, terbagi menjadi 412 desa dan 12 kelurahan, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah:

1. Sebelah Utara : Kab. Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kuningan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
4. Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes
(Provinsi Jawa Tengah)

Secara geo-ekonomi, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut.

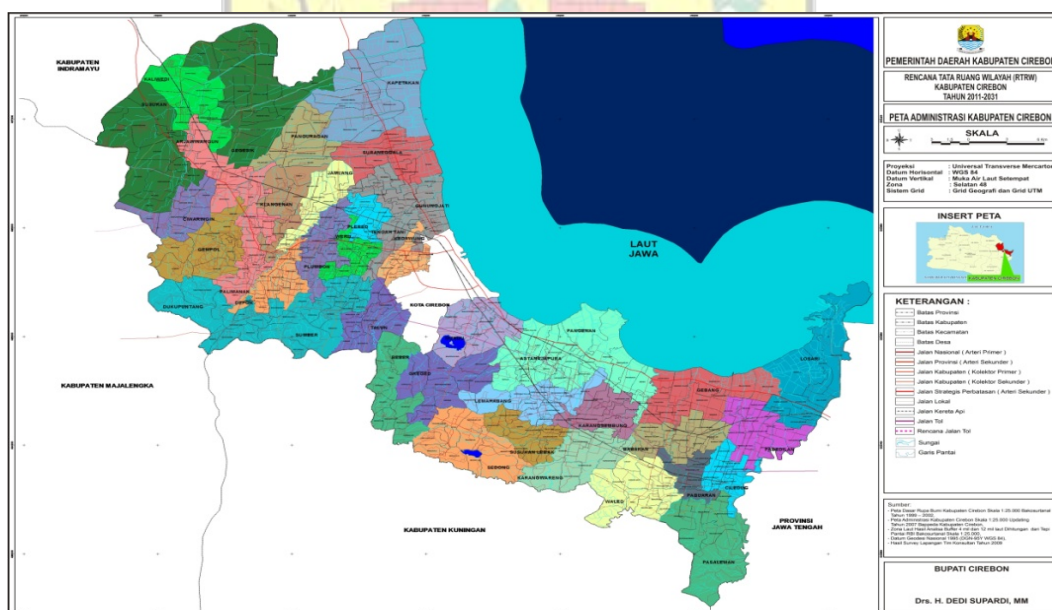
- a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini;
- b) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang merupakan jalur utama distribusi barang dan jasa, dan mobilisasi orang tingkat regional dan nasional;
- c) Kabupaten Cirebon memiliki akses jalur transportasi utama wilayah Pantai Utara Jawa yaitu ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) (ruas jalan tol Palimanan-Kanci/Palikanci, dan ruas

jalan tol Kanci-Pejagan). Selain itu, Kabupaten Cirebon dilalui oleh jalur kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);

- d) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi sumber energi jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura;
- e) Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Gambar 1.1.

Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-130 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, 30 kecamatan lainnya berada pada ketinggian antara 11-30 mdpl. Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dibedakan sebagai berikut.

- 1) Wilayah berketinggian antara 0-25 mdpl seluas 64.636 Ha atau 65,31% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 2) Wilayah berketinggian antara 25-50 mdpl seluas 1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 3) Wilayah berketinggian antara 50-100 mdpl seluas 10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 4) Wilayah berketinggian antara 100-200 mdpl seluas 61.150 Ha atau 6,21% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 5) Wilayah berketinggian antara 200-300 mdpl seluas 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 6) Wilayah berketinggian 300 mdpl seluas 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas Kabupaten Cirebon;

Berdasarkan konturnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-40%. Untuk lebih jelasnya, tingkat kemiringan wilayah dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 8 %	88.075, 71	88,93
2	>8 – 15 %	2.598, 48	2,62
3	>15 – 25 %	5.152, 05	5,2
4	>25 – 40 %	1.853, 52	1,87
5	>40 %	1356, 24	1,37
Jumlah		99.036	100

Sumber: Cirebon Dalam Angka, Tahun 2018

Secara geologis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki delapan jenis struktur tanah, yaitu Aluvial (Qa) seluas 52.224 ha (52,76%), hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 33.740 ha (34,10%), breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 1.110 ha (1,12%), batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas 202,60 ha, formasi Kaliwungu (Pk) seluas 8.964,20 ha (9,06%), formasi Cijulang (Tpel) seluas 825 ha (0,83%), formasi Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345 ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 560 ha (0,63%). Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki sembilan jenis tanah

yaitu alluvial, regosol, litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan glei humus. Secara umum, jenis-jenis tanah tersebut sesuai untuk kegiatan pertanian (sawah dan palawija), dan kegiatan perikanan.

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, dimana jumlah air permukaan 1.418,83 juta meter kubik (m^3). Sebaran air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan menjadi air tanah asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan air tanah langka. Adapun berdasarkan jenis, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara, jenis air permukaan meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Volume debit air sebagaimana yang tertuang diatas pemanfaatannya meliputi untuk kebutuhan-kebutuhan domestik 6,5 juta m^3 , industri 5,184 juta m^3 , irigasi 1.046 juta m^3 , budi daya perikanan 81,3 juta m^3 .

Secara klimatologis, berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*, Kabupaten Cirebon beriklim tipe C dan D. Daerah dengan kategori ini mempunyai ciri iklim tropis, suhu antara $24^{\circ}C$ sampai $36^{\circ}C$ dengan suhu rata-rata $28^{\circ}C$. Kabupaten Cirebon memiliki curah hujan antara 0-3.317 milimeter (mm) dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur

wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur perbatasan yang baik maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

2. Kondisi Demografis

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk mencapai 2.126.178 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 85.930 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Karangwareng dengan jumlah penduduk sebanyak 30.036 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan penurunan dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2017-2018 sebesar 0,94% per tahun. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon
per Kecamatan Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018*)
1.	Waled	59.771	57 885	58.428	51.936	54.014
2.	Pasaleman	28.610	27 465	28.501	30.646	26.793
3.	Ciledug	45.735	46 454	45.508	44.306	44.555
4.	Pabuaran	37.834	38 218	35.919	34.968	35.445
5.	Losari	64.041	61 034	60.687	59.087	59.673
6.	Pabedilan	60.970	56 404	61.314	59.594	55.978
7.	Babakan	73.055	69 154	72.461	70.544	68.993
8.	Gebang	65.363	63 912	65.171	63.421	65.027
9.	Karangsembung	37.538	38 105	37.962	36.664	36.397
10.	Karangwareng	30.607	29 267	30.849	30.036	28.159
11.	Lemahabang	54.678	57 114	55.046	51.936	53.214
12.	Susukan Lebak	40.804	41 026	41.719	40.621	40.203
13.	Sedong	44.465	43 397	44.626	43.454	40.660
14.	Astanajapura	79.732	84 297	79.573	70.261	73.478
15.	Pangenan	45.065	49 529	45.090	44.841	44.597
16.	Mundu	74.352	83 766	73.715	70.518	71.732

No	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018*)
17.	Beber	43.595	40 108	41.559	40.471	40.516
18.	Greged	57.501	57 609	61.211	57.619	53.269
19.	Talun	71.019	72 709	69.409	67.585	65.198
20.	Sumber	86.062	86.605	91 181	88.255	89.192
21.	Dukupuntang	63.145	64.793	68 483	64.887	62.656
22.	Palimanan	62.873	63.420	61 894	62.282	60.899
23.	Plumbon	78.303	76.605	82 186	74.999	78.259
24.	Depok	65.533	66.734	62 992	64.474	62.272
25.	Weru	63.927	64.451	71 749	63.900	66.909
26.	Plered	56.196	56.346	57 561	51.115	52.132
27.	Tengah Tani	40.686	41.553	45 495	39.021	41.884
28.	Kedawung	66.916	67.572	70 204	56.462	57.980
29.	Gunungjati	85.210	85.537	88 035	75.737	78.319
30.	Kapetakan	59.362	62.212	56 805	57.882	56.036
31.	Suranenggala	47.197	47.416	45 318	44.422	43.471
32.	Klangenan	52.119	50.207	56 541	54.382	51.417
33.	Jamblang	41.636	40.636	38 779	38.801	38.035
34.	Arjawinangun	70.170	71.759	70 151	63.055	67.780
35.	Panguragan	51.356	52.313	47 305	47.215	42.570
36.	Ciwaringin	40.711	41.200	43 533	34.281	36.821
37.	Gempol	47.704	47.993	48 506	46.795	44.831
38.	Susukan	75.640	77.811	68 862	69.779	64.382
39.	Gegesik	81.428	81.822	77 099	77.115	68.979
40.	Kaliwedi	43.086	44.882	39 675	42.394	39.851
Jumlah		2.263.978	2.289.511	2.306.602	2.245.895	2.162.576

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2018 Disdukcapil.

Rata-rata kepadatan penduduk tahun 2018 di Kabupaten Cirebon sebesar 2.316 jiwa/km² artinya dalam 1 km persegi dihuni oleh 2.316 orang. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Tengahtani sebesar 7.862 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Gegesik sebesar 855 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel. 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Per Kecamatan
Tahun 2014–2018 (jiwa/km²)

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2014	2015	2016	2017	2018*)
1.	Waled	28,46	2.100	2.034	2.053	1.847	1.931
2.	Pasaleman	32,11	891	855	888	817	1.302
3.	Ciledug	13,25	3.452	3.506	3.435	3.336	4.423
4.	Pabuaran	8,95	4.227	4.270	4.013	3.886	6.389
5.	Losari	39,07	1.639	1.562	1.553	1.466	1.818
6.	Pabedilan	24,08	2.532	2.342	2.546	2.147	1.444
7.	Babakan	21,93	3.331	3.153	3.304	2.946	2.312
8.	Gebang	31,68	2.063	2.017	2.057	1.923	1.205
9.	Karangsembung	15,14	2.479	2.517	2.507	2.337	2.687
10.	Karangwareng	23,12	1.324	1.266	1.334	1.193	3.156
11.	Lemahabang	21,49	2.544	2.658	2.561	2.402	1.919
12.	Susukan Lebak	18,74	2.177	2.189	2.226	2.091	3.636
13.	Sedong	31,02	1.433	1.399	1.439	1.262	1.273
14.	Astanajapura	25,47	3.130	3.310	3.124	2.890	2.468
15.	Pangenan	30,54	1.476	1.622	1.476	1.397	2.583
16.	Mundu	25,58	2.907	3.275	2.882	2.757	2.318
17.	Beber	23,25	1.875	1.725	1.787	1.739	1.799
18.	Greged	29,92	1.922	1.925	2.046	1.780	2.425
19.	Talun	25,65	2.769	2.835	2.706	3.045	2.887
20.	Sumber	36,40	2.379	2.505	2.425	3.459	3.211
21.	Dukupuntang	17,18	3.771	3.986	3.777	1.694	2.653
22.	Palimanan	18,19	3.487	3.403	3.424	3.480	3.160
23.	Plumbon	15,55	4.926	5.285	4.823	4.136	2.883
24.	Depok	9,19	7.262	6.854	7.016	3.928	4.223
25.	Weru	11,34	5.684	6.327	5.635	7.247	5.181
26.	Plered	8,97	6.282	6.417	5.698	4.515	3.324
27.	Tengah Tani	9,58	4.337	4.749	4.073	4.630	7.862
28.	Kedawung	60,20	1.122	1.166	938	5.957	7.815
29.	Gunung Jati	22,98	3.722	3.831	3.296	3.716	1.998
30.	Kapetakan	20,57	3.024	2.762	2.814	871	994
31.	Suranenggala	17,76	2.670	2.552	2.501	1.796	2.617
32.	Klangenan	24,11	2.082	2.345	2.256	2.413	1.273
33.	Jamblang	20,31	2.001	1.909	1.910	2.098	1.946
34.	Arjawinangun	17,79	4.034	3.943	3.544	2.726	1.191
35.	Panguragan	30,73	1.702	1.539	1.536	2.024	1.818
36.	Ciwaringin	50,10	822	869	684	1.976	2.777
37.	Gempol	60,38	795	803	775	1.420	1.429

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2014	2015	2016	2017	2018*)
38.	Susukan	27,82	2.797	2.475	2.508	1.212	1.065
39.	Gegesik	21,21	3.858	3.635	3.636	1.095	855
40.	Kaliwedi	27,82	2.184	1.931	2.063	1.373	1.411
Jumlah		990,36	2.809	2.830	2.844	2.732	2.177

Sumber : Cirebon Dalam Angka, Tahun 2018 dan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2018 Disdukcapil.

Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sekitar 2.162.576 jiwa yang terdiri dari 1.095.984 jiwa laki-laki (50,67%) dan 1.066.592 jiwa perempuan (49,32%). Sex rasionya adalah sekitar 105 yang berarti terdapat sekitar 105 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 dan 2018 relatif menurun dibanding 2016. Perbandingan sex ratio pada tahun 2016 sekitar 105 dan tahun 2017 dengan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sekitar 2.100.299 jiwa yang terdiri dari 1.081.257 jiwa laki-laki (51,5%) dan 1.019.042 jiwa perempuan (48,5%), sex rasionya adalah sekitar 106% yang berarti terdapat sekitar 106 orang laki-laki diantara 100perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Diduga salah satu penyebabnya adalah karena penduduk perempuan di daerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja dan mencari pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel. 1.4.
Penduduk Kabupaten Cirebon menurut Struktur Usia Tahun 2018

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	82.799	76.657	159.456
2.	5 - 9	85.784	79575	165.359
3.	10 - 14	81.626	76.524	158.150
4.	15 - 19	79.200	78.750	157.950
5.	20 - 24	97.881	95.629	19.3510

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6.	25 - 29	102.330	94.706	197.036
7.	30 - 34	96.707	92.767	189.474
8.	35 - 39	99.379	100.440	199.819
9.	40 - 44	87.129	88.278	175.407
10.	45 - 49	76.870	75.358	152.228
11.	50 - 54	59.961	61.352	121.313
12.	55 - 59	48.642	49.764	98.406
13.	60 - 64	38.109	38.152	76.261
14.	65 - 69	27.791	25.640	53.431
15.	70 - 74	14.994	15.820	30.814
16.	>75	16.782	17.177	33.959
Jumlah		1.095.984	1.066.592	2.162.576

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2018

Disdukcapil.

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000, 2010 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon pada kurun waktu 2000-2010 adalah 1,40 persen per tahun. Sementara pada tahun 2010-2016 pertumbuhan penduduknya adalah sekitar 0,79 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, oleh banyak pihak dianggap sebagai suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak merata juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama bila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah, terlebih bila terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk

yang positif akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon relatif menurun dari tahun sebelumnya menjadi 2.162.576 jiwa, dengan rincian struktur usia produktif dan tidak produktif terdiri dari penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kabupaten Cirebon adalah sekitar 482.968 orang, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sekitar 1.561.404 orang, dan penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) sekitar 118.204 orang. Angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 adalah sebesar 38,13 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi sekitar 38 orang usia tidak produktif

TPAK di Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 mencapai 61,25 %, yang berarti bahwa pada setiap 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 61 orang di antaranya adalah termasuk angkatan kerja. TPAK tahun 2018 ini turun bila dibandingkan tahun 2017 yakni sekitar 58,21 persen. Semakin tinggi angka TPAK maka semakin besar penyediaan tenaga kerja, dan secara otomatis kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan perekonomian semakin cepat, karena berkaitan dengan seberapa besar produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagai catatan bahwa persentase angkatan kerja yang ditampilkan tidak lain adalah TPAK itu sendiri. Bisa dilihat kondisi ketenagakerjaan pada Tabel. 1.5.

Tabel.1.5

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon Tahun 2012 – 2018

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	59,66	59,20	59,55	58,51	58,45	58,21	61.25
Tingkat Penangguran Terbuka (%)	15,92	14,88	13,32	10,51	9,21	8,80	9.61

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bekerja (jiwa)	754.456	763.934	792.245	813.824	832.719	885.085	880.807

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2018

3. Kondisi Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 8,00% dari angka 38,882,897.2 juta rupiah tahun 2017 menjadi 41.947.728.13 juta rupiah pada tahun 2018.

Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil pada Tahun 2018 mencapai 29,148,228.9 juta rupiah atau meningkat sebesar 6,00% dari Tahun 2017 sebesar 27,596,254.8 juta rupiah.

Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB Kabupaten Cirebon ADHK dan PDRB ADHB dapat dilihat pada Tabel.1.6 dan Tabel. 1.7.

Tabel.1.6
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (Dalam Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	Harga Berlaku				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	26,125,037.2	29,000,694.9	32,186,521.0	35,534,084.3	37.208,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	618,317.0	668,772.3	656,703.5	701,271.4	768,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,118,165.6	2,277,848.8	2,691,142.3	2,917,188.7	3.044,56
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10,361,593.3	11,626,865.3	12,700,113.5	13,220,644.2	14.340,15
5. Perubahan Inventori	1,384,888.4	1,735,693.5	1,755,517.1	1,665,146.1	1.665,15
6. Net (Ekspor-Impor)	(11,197,279.9)	(12,730,823.8)	(14,237,334.0)	(15,155,437.4)	(15.136,31)
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	29,410,721.6	32,579,051.0	35,752,663.3	38,882,897.2	41.947.728.13

Tabel.1.7**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 – 2018 (Dalam Juta Rupiah)**

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	21,518,432.6	22,148,222.9	23,182,605.1	24,360,803.3	25,693,497.2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	463,123.4	536,111.7	554,712.5	523,007.1	551,247.1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,789,065.5	1,731,633.9	1,789,490.1	1,915,547.7	2,020,249.2
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,312,992.6	8,800,459.5	9,090,583.9	9,418,577.5	9,700,862.0
5. Perubahan Inventori	1,415,754.7	1,255,701.4	1,210,627.5	1,082,293.0	1,125,227.9
6. Net (Ekspor-Import)	(9,641,619.2)	(9,429,874.3)	(9,515,026.9)	(9,703,973.9)	(9,942,854.5)
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	23,857,749.6	25,042,254.9	26,312,992.3	27,596,254.8	29,148,228.9

4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan melegisalisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Dengan merujuk pada kedua peraturan di atas Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat 22 Dinas, 6 Badan dan 2 Rumah Sakit Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.8**SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**

No.	Nama dinas
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Dinas Kesehatan
15.	Dinas Ketahanan Pangan
16.	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum/ Satpol PP
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19.	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.	Dinas Pemadam Kebakaran
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.	Dinas Pendidikan

25.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27.	Dinas Perhubungan
28.	Dinas Pertanian
29.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
30.	Dinas Sosial
31.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled
33.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun

Selain SKPD di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga membentuk Kecamatan dengan jumlah 40 Kecamatan dan 12 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.9
Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Nama Kecamatan
1.	Kecamatan Arjawinangun
2.	Kecamatan Astanajapura
3.	Kecamatan Babakan
4.	Kecamatan Beber
5.	Kecamatan Ciledug
6.	Kecamatan Ciwaringin
7.	Kecamatan Depok
8.	Kecamatan Dukupuntang
9.	Kecamatan Gebang
10.	Kecamatan Gegesik
11.	Kecamatan Gempol
12.	Kecamatan Greged

No.	Nama Kecamatan
13.	Kecamatan Gunungjati
14.	Kecamatan Jamblang
15.	Kecamatan Kaliwedi
16.	Kecamatan Kapetakan
17.	Kecamatan Karangsembung
18.	Kecamatan Karangwareng
19.	Kecamatan Kedawung
20.	Kecamatan Klangeran
21.	Kecamatan Lemahabang
22.	Kecamatan Losari
23.	Kecamatan Mundu
24.	Kecamatan Pabedilan
25.	Kecamatan Pabuaran
26.	Kecamatan Palimanan
27.	Kecamatan Pangenan
28.	Kecamatan Panguragan
29.	Kecamatan Pasaleman
30.	Kecamatan Plered
31.	Kecamatan Plumbon
32.	Kecamatan Sedong
33.	Kecamatan Sumber
34.	Kecamatan Suranenggala
35.	Kecamatan Susukan
36.	Kecamatan Susukanlebak
37.	Kecamatan Talun
38.	Kecamatan Tengah tani
39.	Kecamatan Waled
40.	Kecamatan Weru

Tabel 1.10

Kelurahan di Kabupaten Cirebon

No.	Nama Kelurahan
1	Kelurahan Sumber
2	Kelurahan Perbutulan
3	Kelurahan Cempaka
4	Kelurahan Kenanga
5	Kelurahan Kemantren
6	Kelurahan Pamokolan
7	Kelurahan Sendang
8	Kelurahan Kaliwadas
9	Kelurahan Pasalakan
10	Kelurahan Pejambon
11	Kelurahan Babakan
12	Kelurahan Gegunung

1.4. Kondisi Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berjumlah 12.865 orang, rincian jumlah dan komposisi ASN di Lingkungan Kabupaten Cirebon dalam beberapa Tabel di bawah ini :

Komposisi jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon dari jenis kelamin, komposisi jumlah berdasarkan jenis kelamin mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebesar 49,22% dibanding dengan jumlah perempuan yang sebesar 50,77%. Sebagaimana digambarkan dalam table 2.6 berikut ini.

Tabel 1.11**Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6.333
2	Perempuan	6.532
	Total	12.865

Sementara berdasarkan golongan dan ruang ASN, terbanyak dari golongan III dan kemudian golongan IV, besarnya jumlah golongan III dan Golongan IV ini dikarenakan, jumlah dari fungsional guru dan tenaga medis lebih besar dari jumlah tenaga teknis lainnya dan pejabat dan staf struktural, berikut ini table yang menggambarkan ASN Kabupaten Cirebon dari ruang dan golongan.

Tabel 1.12**Jumlah ASN Berdasarkan Ruang Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IA	-
	Golongan IB	5
	Golongan IC	61
	Golongan ID	40
	Total Golongan I	106
2.	Golongan IIA	88
	Golongan IIB	213
	Golongan IIC	737
	Golongan IID	237
	Total Golongan II	1.275
3.	Golongan IIIA	838
	Golongan IIIB	2.265
	Golongan IIIC	1.267

No.	Golongan	Jumlah
	Golongan IIID	1.449
	Total Golongan III	5.819
4.	Golongan IVA	2.522
	Golongan IVB	3.039
	Golongan IVC	101
	Golongan IVD	3
	Total Golongan IV	5.665
	Total	12.865

Dilihat dari faktor pendidikan jumlah pendidikan yang dipadukan dengan jenis kelamin, hal ini untuk mengetahui komposisi ASN di Kabupaten Cirebon terkait dengan gender serta jumlah pendidikan yang ditempuh berdasarkan atas jenis kelamin ASN, dari tabel di bawah ini dapat dibaca bahwa dari sisi komposisi sangat logis dimana jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan, sehingga sangat masuk akal jika dari segi pendidikan pun akan mengikuti, akan tetapi hal ini tidak menjadi hubungan yang baku antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan, meskipun dari komposisi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan itu.

Tabel 1.13

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	SD	74	3
2.	SMP	164	8
3.	SMA	1148	373
4.	DI	28	75
5.	DII	615	768
6.	DIII	536	908

No.	Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
7.	DIV	35	186
8.	S1	3.413	4.059
9.	S2	317	152
10.	S3	3	-
	SubTotal	6.333	6.532
	Total	12.865	

E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, adalah :

- Lingkungan internal
 - a. Komitmen dan tekad bersama seluruh komponen birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan masyarakat untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah khususnya pelayanan publik;
 - c. Kejelasan regulasi, tanggung jawab, dan kewenangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - d. Hubungan jejaring kerja yang terjalin secara harmonis dan sinergis antara eksekutif dan legislatif dilingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mendukung rumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam program-program

pembangunan daerah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon.

- Lingkungan eksternal
 - a. Dukungan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga dapat terlaksananya kinerja pemerintah yang baik dan berkesinambungan;
 - b. Dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan kelembagaan dan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - c. Pola koordinasi dan komunikasi yang sinergi dengan berbagai unsur seperti komunitas, dunia akademik, dan dunia usaha dalam membangun Kabupaten Cirebon secara bertanggung jawab;

F. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2018

1. Isu Strategis

Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan isu strategis sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama:
 - a. Implementasi pendidikan keagamaan secara baik;
 - b. Internalisasi keshalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat
2. Keterjangkauan, kualitas, dan partisipasi pendidikan:
 - a. Keterjangkauan meliputi akses dan pembiayaan pendidikan;
 - b. Kualitas dan kuantitas pendidikan meliputi SDM pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan;

- c. Partisipasi pendidikan masyarakat meliputi peran serta masyarakat bagi keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah
3. Jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan :
- a. Kesehatan ibu, bayi, dan balita meliputi kematian ibu, bayi, balita; gizi ibu, bayi, dan balita; cakupan imunisasi dan kunjungan ibu hamil;
 - b. Jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan meliputi keikutsertaan menjadi peserta BPJS;
 - c. Mutu pelayanan kesehatan meliputi SDM medis dan paramedis, sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. Promosi, Jejaring, dan partisipasi masyarakat;
 - e. Penyehatan lingkungan meliputi perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit (menular dan non menular)
4. Ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah :
- a. Kemantapan jembatan dan jalan meliputi jalan kabupaten dan poros desa;
 - b. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi perumahan, sanitasi, dan listrik;
 - c. Keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan meliputi sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan dan pengembangan bangunan dan lingkungan permukiman;
 - d. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan/atau di perbatasan;
 - e. Penataan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi jalan pemukiman, taman, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau;
 - f. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
 - g. Prasarana air bersih dan sanitasi meliputi saluran pembuangan air limbah domestic, sampah, dan jamban;
 - h. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis;
 - i. Prasarana telekomunikasi dan informasi

5. Ketahanan pangan :
 - a. Ketersediaan meliputi produksi, produktivitas pangan, alih fungsi lahan, teknologi;
 - b. Akses dan distribusi pangan meliputi jalan produksi, gudang/lumbung pangan, tata niaga;
 - c. Keanekaragaman/diversifikasi pangan;
 - d. Stabilitas harga pangan;
 - e. Mutu dan keamanan pangan
6. Pengendalian kependudukan :
 - a. Distribusi meliputi sebaran dan migrasi/urbanisasi;
 - b. Struktur/komposisi meliputi kelahiran, kematian, perpindahan, pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin
7. Penurunan jumlah penduduk miskin :
 - a. Pendapatan meliputi mata pencaharian;
 - b. Jaminan sosial masyarakat miskin;
 - c. Akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan politik
8. Reformasi birokrasi :
 - a. Penataan kelembagaan pemerintahan;
 - b. Sistem kepegawaian meliputi kapasitas dan profesionalisme pegawai, remunerasi aparatur sipil negara;
 - c. Pelayanan publik;
 - d. Perencanaan pembangunan;
 - e. Penganggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - f. Pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan;
 - g. Sarana dan prasarana pemerintahan
9. Peningkatan investasi
 - a. Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah
 - b. Pelayanan perijinan usaha meliputi ketersediaan sistem pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi; mekanisme dan prosedur perijinan, dan kapasitas sumber daya manusia

- c. Stabilitas wilayah meliputi keamanan dan ketertiban, politik, dan kepastian hukum;
 - d. Promosi potensi dan kelayakan investasi;
 - e. Akses permodalan dan jasa keuangan;
 - f. Penciptaan sentra-sentra ekonomi;
 - g. Pengembangan ekonomi kerakyatan
10. Ketersediaan energi
- a. Akses listrik bagi rumah tangga kurang mampu
 - b. Energi terbarukan
11. Kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan
- a. Daya saing tenaga kerja meliputi keterampilan dan produktivitas
 - b. Kesempatan kerja meliputi kewirausahaan/entrepreneurship dan pengangguran
 - c. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja
12. Pengelolaan lingkungan hidup :
- a. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi hutan kota dan alun-alun/taman kecamatan
 - b. Perubahan iklim global dan lokal
 - c. Bencana alam meliputi adaptasi, mitigasi, dan rehabilitasi bencana
 - d. Konservasi, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya alam
 - e. Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - f. Pengelolaan limbah
 - g. Implementasi pembangunan berwawasan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy)
 - h. Penegakkan hukum lingkungan
13. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga :
- a. Nilai kebangsaan dan kepemimpinan
 - b. Sarana dan prasarana kepemudaan

- c. Budaya berolahraga
 - d. Sarana dan prasarana olahraga
14. Pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata :
- a. Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya
 - b. Destinasi wisata
 - c. Sarana dan prasarana seni dan budaya

2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan, dan aspek fisik dan prasarana wilayah. Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon transisi tahun 2018, berbagai hal dirumuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2018. Adapun prioritas pembangunan tahun 2018 yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan keterjangkauan, kualitas, dan partisipasi pendidikan
3. Meningkatkan jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah
5. Meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan pengendalian kependudukan
7. Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin
8. Percepatan reformasi birokrasi
9. Peningkatan investasi
10. Meningkatkan ketersediaan dan keberlanjutan energi
11. Meningkatkan kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan

12. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
13. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda
14. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon diuraikan sebagai berikut.

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum daerah, struktur organisasi, lingkungan strategis, isu strategis yang berpengaruh, prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah, indikator kinerja utama, penetapan perjanjian kinerja.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan kerangka pengukuran kinerja, pengukuran dan analisis kinerja. Pencapaian kinerja keuangan daerah.

BAB. IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut

2 BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Adapun penjelasan secara rincinyasebagai berikut.

Visi Kabupaten Cirebon adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera”**.

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian terhadap rumusan visi sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- | | |
|--------|---|
| Agamis | adalah suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; |
| Maju | adalah suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi, dan berdaya guna; |
| Adil | adalah suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan Jawa Barat dan Nasional; |

Sinergi	adalah suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan Jawa Barat dan Nasional;
Sejahtera	adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai, dan tenteram.

Untuk mencapai visi tersebut, kepala daerah menyusun misi-misi dengan rumusan sebagai berikut.

- Misi pertama,** Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik;
- Misi Kedua,** Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan;
- Misi Ketiga,** Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia;
- Misi Keempat,** Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komunitas);
- Misi Kelima,** Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai, dan tenteram;
- Misi Keenam,** Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.

Tabel 2.1**Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan	Sasaran
1	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur, dan bertakwa	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat, dan toleransi antar dan internal umat beragama
2	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketerampilan, dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya kerja, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan 4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya 5. Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koneksitas antar wilayah 2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai 3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri, dan lestari
4	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
5	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perekonomian masyarakat 2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas 3. Terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur permukiman layak
6	Mewujudkan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima 2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah 3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih

Adapun hubungan keterkaitan antara visi misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera		
1 Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat, dan toleransi antar dan intern umat beragama
2 Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketerampilan dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan dan berjiwa kewirausahaan 4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya 5. Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga
3 Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koneksitas antar wilayah 2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai

	Misi	Tujuan	Sasaran
	tersedia		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari
4	Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5	Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat 2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas 3. Terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur permukiman layak
6	Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima 2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah 3. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 15 sasaran strategis yang mencakup 73 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cirebon Tahun 2016. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
1	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a	Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD
		b	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMP
		c	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMA
		d	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMK
		e	Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA
		f	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji
		g	Jumlah penghafal Quran
		h	Prestasi lomba keagamaan tingkat provinsi Jawa Barat
		i	Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama (IKU)
		2	Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua
b	Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas (pp6)		
c	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		
d	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	- SD/MI		
	- SMP/MTs		
	- SMA/MA		
e	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	- SD/MI		
	- SMP/MTs		
	- SMA/MA		
	- SMK		
f	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah		
	- SD		
	- SMP		
	- SMA dan SMK		
3	Meningkatnya kualitas	a	Angka Harapan Hidup (AHH)
		b	ratio Kematian Ibu

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
kesehatan masyarakat		c	ratio Kematian Bayi
		d	Balita gizi buruk (BB/TB)
		e	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar
		g	Rasio rumah sakit per satuan penduduk
		h	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk
		i	Jml puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan
		k	Rasio dokter terhadap penduduk
		l	Rasio paramedis terhadap penduduk
		m	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan
		n	Jumlah Posyandu Purnama
		4	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan, dan berjiwa kewirausahaan
b	Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional (iku)		
c	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm) <ul style="list-style-type: none"> • BesaranTenagaKerja yang mendapatkanPelatihanberbasiskompetensi • BesaranTenagaKerja yang mendapatkanPelatihankewirausahaan • BesaranPencariKerja yang terdaftar yang ditempatkan • Besarankasus yang diselesaikandenganPerjanjianBersama (PB) • BesaranPekerja/buruh yang menjadi program jamsostek. • BesaranPemeriksaan Perusahaan • BesaranPengujianperalatan di Perusahaan. 		
d	Jumlah wirausahawan baru		
e	Angka pengangguran Terbuka		
5	Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a	Meningkatnya kunjungan wisatawan
6	Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi	a	prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat

Sasaran		Indikator Kinerja Utama			
	Olah raga				
7	Peningkatan koneksitas antar wilayah	a	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		
		b	Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik		
8	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	a	jaringan irigasi: - panjang saluran induk - panjang saluran sekunder - Bangunan jaringan irigasi		
		c	jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari		
		d	jumlah daerah rawan banjir		
		f	prosentase pengangkutan sampah		
		g	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun		
		h	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)		
		i	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		
		j	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)		
		9	Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	a	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri
				b	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
c	Prosentase kawasan lindung				
d	Penghargaan Adipura				
e	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air				
f	Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara				
g	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan				
10	Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a	Jumlah komunitas		
		b	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		
		c	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan		
11	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a	Nilai PDRB		
		b	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
		c	PDRB per kapita		
		d	Tingkat inflasi		

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
		e	Jumlah daerah rawan pangan
		f	Nilai investasi
		g	Prosentase Koperasi aktif
		h	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan
12	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a	Menurunnya Jumlah penduduk miskin
		b	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk
13	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a	Indeks Kepuasan Masyarakat
		b	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM
		c	Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)
14	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai
		b	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan
15	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a	Rata-rata capaian kinerja SKPD
		b	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)
		c	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal
		d	Peningkatan Pendapatan asli daerah

C. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja tahunan adalah Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapaidalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. IndikatorKinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah bentuk pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian kinerja bermaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (insentif dan disinsentif).

Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagaidasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kewenangan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja tahun 2018 ini disusun berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan meliputi 26 urusan wajib pemerintahan dan 8 urusan pilihan dengan sasaran sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis yang diukur dengan 73 (tujuh puluh tiga) indikator.

Berdasarkan alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 3.705.608.291.386 sebagaimana tercantum dalam APBD Perubahan Anggaran Tahun 2018. Anggaran sebesar itu digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.099.753.324.736 atau 56,66% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.581.711.732.662 atau 42,68%.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja dan target tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kabupaten Cirebon

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	
				Nilai	Satuan
1	Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi	a. Angka melek huruf al-quran lulusan SD/MD	62	%
			b. Angka melek huruf al-quran lulusan SMP	68	%
			c. Angka melek huruf al-quran	73	%

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018				
				Nilai	Satuan			
	agama yang baik	antar dan intern umat beragama	lulusan SMA					
			d. Angka melek huruf al-quran lulusan SMK	73	%			
			e. Jumlah siswa yang hafal jus'amma pada pendidikan SMP dan SMA	5	%			
			f. Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da magrib mengaji	424	DKM			
			g. Jumlah menghafal quran	1.105	orang			
			h. Prestasi lomba keagamaan tingkat propinsi jawa barat	5	-			
			i. Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	4	kasus			
			2	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.	1. Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	a. Peningkatan indeks pendidikan	84,33-85,60	%
						b. Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas	95,37	%
			c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,86	tahun			
			d. Angka Partisipasi Kasar (APK)					
			- SD/MI	126,00	%			
			- SMP/MTs	110,11	%			
			- SMA/MA	80,98	%			
			e. Angka Partisipasi Murni (APM)					
			- SD/MI	99,95	%			
			- SMP/MTs	90,3	%			
			- SMA/MA	62,28	%			
			- SMK	48,45	%			
			f. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah					
			- SD	50	%			
			- SMP	19	%			
			- SMA/SMK	22	%			

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	
				Nilai	Satuan
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	a. Angka Harapan Huruf (AHH)	66,38	tahun
			b. Ratio kematian ibu	81,33	point
			c. Ratio kematian bayi	3,92	point
			d. Balita gizi buruk	0,73	%
			e. Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	1.345.865	orang
			f. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,053	%
			g. Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	0,054	%
			h. Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	57	unit
			i. Rasio dokter terhadap penduduk	1,138	%
			j. Rasio paramedis terhadap penduduk	1,545	%
			k. Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	1.345.000	%
			l. Jumlah Posyandu Purnama	692	unit
			3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan, dan berjiwa kewirausahaan	a. Jumlah kawasan seni	1
		b. Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional		1	kali
		c. Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)		70	%
		- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan		70	%

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	
				Nilai	Satuan
			Pelatihan berbasis kompetensi		
			- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	70	%
			- Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50	%
			- Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	70	%
			- Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	55	%
			- Besaran Pemeriksaan Perusahaan	55	%
			- Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	60	%
			d. Jumlah wirausahawan baru	100	orang
			e. Angka pengangguran terbuka	8,9	%
		4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a. Meningkatnya kunjungan wisatawan	10	%
		5. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga	a. Prestasi olah raga di tingkat provinsi Jawa Barat		
			- POPDA	8	Peringkat
			- PORDA	14	Peringkat

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	
				Nilai	Satuan
	3. Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia	1. Peningkatan koneksitas antar wilayah	a. Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	626,44	Km
			b. Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	449,91	Km
		2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	a. Jaringan irigasi		
			- Panjang saluran induk	73,325	Km
			- Panjang saluran sekunder	37,262	Km
			- Bangunan jaringan irigasi	90	%
			b. Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	150.320	rumah tangga
			c. Jumlah daerah rawan banjir	2	Kecamatan
			d. Prosentase pengangkutan sampah	47	%
			e. Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	45	%
			f. Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	30	%
			g. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	79	Persen
		h. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	13	Pos jaga	
		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	a. Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	8	Kelompok
			b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	30	Kecamatan
			c. Prosentasi	30	%

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	
				Nilai	Satuan
			kawasan lindung		
			d. Penghargaan Adipura	1	kali
			e. Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	5	sungai
			f. Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	20	industri
			g. Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	12	pengaduan
	4. Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)	1. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Jumlah komunitas	90	komunitas
b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			90	kelompok	
c. Jumlah lembaga ekonomi pedesaan			339	lembaga	
	5. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a. Nilai PDRB	12.183.449	Rp (dlm juta)
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			5,50	%	
c. PDRB per kapita			19.590.887	Rp	
d. Tingkat Inflasi			3,5-4,5	%	
e. Jumlah Daerah rawan pangan			8	desa	
f. Nilai Investasi			1.297.599	Rp (dlm juta)	
g. Prosentase Koperasi aktif			97.00	%	
h. Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan			8	lokasi	
		2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a. Menurunnya jumlah penduduk miskin	12,12	%
			b. meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	100	%

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	
				Nilai	Satuan
6.	Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	4,13	indeks
			b. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	9	unit
			c. Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	30	kecamatan
		2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a. Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	3,4	%
			b. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	100	%
		3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a. Rata-rata capaian kinerja SKPD	65-70	%
			b. Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Baik	Angka/huruf
			c. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	4	%
			d. Peningkatan Pendapatan asli daerah	15	%

Adapun anggaran Belanja Langsung Urusan Tahun 2018 yang disediakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 1.581.711.732.662 yang digunakan untuk pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada 33 SKPD dengan rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran I.

E. Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyusun rencana aksi daerah penetapan kinerja sebagaimana diuraikan pada lampiran.

3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat Cirebon melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2014-2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran atas pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Katagori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2018 berdasarkan pada tingkat pencapaian indikator sasaran dan menggambarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Secara kuantitatif untuk menghitung capaian target indikator kinerja, rumus yang digunakan adalah :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})) / \text{Rencana} \times 100\%$$

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019.

Dalam RPJMD terdapat 6(enam) Misi, 7 (tujuh) Tujuan dan 15 (lima belas) sasaran, dengan 73 (tujuh puluh tiga) indikator sasaranterdiri dari

- Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 9 indikator kinerja,
- Misi II terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 25 indikator kinerja,

- Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 17 indikator kinerja,
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja
- Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja.

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Sasaran/IKU

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Indikator		
			Jumlah sasaran	Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
1	Misi 1	1	1	9	BS=5, B=0, C=0, K=1 Pindah ke propinsi 3
2	Misi 2	1	5	25	BS=14, B=9, C=0, K=0, Indikator pindah ke Provinsi =2
3	Misi 3	1	3	17	BS=6, B=5, C=2, K=4
4	Misi 4	1	1	3	BS=3, B=0, C=0, K=0
5	Misi 5	1	2	10	BS=4, B=5, C=1, K=0
6	Misi 6	1	3	9	BS=5, B=3, C=1, K=0
JUMLAH		6	15	73	BS=37, B=22, C=4, K=5, 5 IKU pindah ke Provinsi

Berikut ini adalah tabel jumlah sasaran katagori dan persentase capaian kinerja per misi yang ada

No	Katagori	Jumlah	%
Misi I			
1	Baik Sekali	5	55.56
2	Baik	0	0.00
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	1	11.11
5	Kewenangan Pindah	3	33.33
	Total	9	100
Misi II			
1	Baik Sekali	14	56.00
2	Baik	9	36.00
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	0	0.00
5	Kewenangan Pindah	2	8.00

No	Katagori	Jumlah	%
	Total	25	100.00
Misi III			
1	Baik Sekali	6	35.29
2	Baik	5	29.41
3	Cukup	2	11.76
4	Kurang	4	23.53
	Total	17	100
Misi IV			
1	Baik Sekali	3	100.00
2	Baik	0	0.00
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	0	0.00
	Total	3	100
Misi V			
1	Baik Sekali	4	40.00
2	Baik	5	50.00
3	Cukup	1	10.00
4	Kurang	0	0.00
	Total	10	100
Misi VI			
1	Baik Sekali	5	55.56
2	Baik	3	33.33
3	Cukup	1	11.11
4	Kurang	0	0.00
	Total	9	100

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 37 indikator sasaran atau 57,07% Baik Sekali, 22 indikator sasaran atau 24,79 % Baik, 4 indikator sasaran atau 5,49% Cukup, 5 indikator sasaran atau 9,48% kurang dan 5 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **122,59%** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 **Baik Sekali**.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada

indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu :Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

Untuk merealisasikan misi kesatu, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran strategis yakni meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama. Kehidupan beragama, kesolehan sosial, dan toleransi ditetapkan menjadi sasaran strategis mengingat bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra pengembangan agama Islam di Indonesia. Daerah ini memiliki penduduk dengan berbagai macam ajaran agama/keyakinan, ada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Aspek agama menjadi kekuatan dasar dan *driving force* dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan kesholehan sosial dan sikap toleransi, keberanekaragaman agama menjadi potensi pemersatu pembangunan. Namun demikian, pada sisi lain, kondisi ini memiliki potensi kerawanan sosial dan konflik horizontal berbasis suku, agama dan ras (sara) jika tidak dikelola dengan baik. Aspek toleransi untuk hidup bersanding secara damai menjadi hal penting untuk dikomunikasikan dengan berbagai komponen masyarakat agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara kondusif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon memandang hal ini menjadi strategis bagi kondusivitas wilayah.

Untuk memotret pencapaian realisasi misi 1 ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 9 indikator sasaran.

Tabel 3.3

Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Aktivitas Kehidupan Beragama, Keshalehan Sosial Masyarakat dan Toleransi antar dan Intern Umat Beragama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Melek Huruf	%	54	54.78	101.44	62	75.20	121.29

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Alquran Lulusan SD/MI							
2	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMP/MTs	%	61	61.89	101.46	52	55.71	107.13
3	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMA/MA	%	66	66.96	101.46	73	Jadi Kewenangan Propinsi	
4	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMK	%	66	66.96	101.46	73	Jadi kewenangan propinsi	
5	Jumlah Siswa Yang Hafal Juz Amma pada Pendidikan SLTP dan SLTA	%	5	5	100.00	5	Jadi kewenangan Propinsi	
6	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan Ba'da Maghrib Mengaji	%	424	753	177.6	424	776	183.02
7	Jumlah Penghapal Alquran	Orang	831	173	20.82	1.105	171	15.48
8	Prestasi Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	5	14	80	5	7	140
9	Jumlah Kasus Konflik Yang Bernuansa Agama	Kasus	5	0	200	4	0	200
Rata-Rata					100.92			127.82

Dari tabel di atas, untuk indikator kinerja Sasaran Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat dan toleransi antar dan intern umat beragama, terdapat 9 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 100,92% dengan katagori **Baik Sekali** dimana lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun 2017 yang sebesar 100,92%. Pencapaian target kinerja pada Tahun 2018 ini karena beberapa hal berikut ini :

1. Budaya religius masyarakat Kabupaten Cirebon dalam menerapkan dan mempelajari aspek-aspek keagamaan;
2. Peran tokoh agama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Nahdhatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan lembaga pendidikan keagamaan yang tidak berafiliasi kepada organisasi tersebut seperti Al-Bahjah dan lembaga pondok pesantren modern lainnya.

3. Adanya sinergitas dan kerjasama yang memadai dengan instansi dan lembaga swadaya masyarakat dalam menginisiasi dan mengintervensi program dan kegiatan yang menjadi indikator pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Dari tabel di atas juga dapat diketahui ada satu indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu indikator Jumlah Penghafal Alqurandan ada 3 (tiga) indikator yang pinda kewenangan nya menjadi kewenangan propinsi hal ini dikarenakan oleh

1. Sebagian besar lembaga keagamaan seperti majelis taklim, madrasah, kelompok pengajian dan pondok pesantren mengajarkan ilmu agama secara umum, sangat sedikit yang secara khusus pada pengkajian dan penghafal al-qur'an (tahfidz);
2. keterbatasan kemampuan untuk memantau dan menginisiasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja pada satu indikator di atas;
3. Untuk meningkatkan angka melek huruf al qur'an para siswa perlu untuk diselenggarakan kurikulum ekstrakurikuler baca tulis al qur'an di seluruh satuan pendidikan dan diujikan diakhir masa pendidikan untuk mendapatkan sertifikat/ijazah kelulusan baca tulis al qur'an untuk dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah kelulusan dan nilai hasil UAN dan UAS.

Untuk mendorong pencapaian target yang belum tercapai, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan sinergi dan peningkatan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan, serta mengintervensi dan menginisiasi program dan kegiatan untuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, majelis taklim, kelompok-kelompok pengajian, dan penerapan peraturan daerah tentang Madrasah Takmilyah Diniyah Awaliyah (MDTA) secara lebih tegas.

Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.

Tabel 3.4

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Peningkatan Indeks Pendidikan	%	83.00-84.27	54.88	66.12	84.33-85.60	68.09	80.74	
2	Angka Melek Huruf (AMH) pada Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	%	95	95	100	95.37	95.53	100,17	
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.69	7.90	102.73	6.75	6.61	97.92	
4	Angka Partisipasi Kasar <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA/MA 	%	122.00 110.21 80.05	109.31 97.18 75.90	89.6 88.18 94.81	109 110.11 80.98	117.05 115.08 91.58	107.38 104.51 113.09	
5	Angka Partisipasi Murni <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA/MA ▪ SMK 	%	99.94 90.10 61.80 47.95	96.28 74.81 52.54 71.41	96.38 96.34 85.02 148.93	99.95 90.3 62.28 48.45	107.33 97.46 85.02 57.18	107.38 107.93 85.02 118.02	
6	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Jumlah Penduduk per Usia Tingkatan Sekolah <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA/MA 	%		49 19 21	49 18 20	100 94.74 95.24	54 19 22	46.77 18.93 29.76	86.61 99.63 135.27
Rata-Rata					96.78			102.44	

Tabel 3.4 di atas menggambarkan capaian atas sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua, dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian atas semua indikator kinerja yang masuk dalam sasaran ini adalah 102,44% atau masuk dalam katagori **Baik Sekali**, capaian ini lebih besar dari capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 96,78%. Capaian indikator kinerja tertinggi diraih oleh Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai 108.33 % (Baik Sekali), dan Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Perusia Tingkatan Sekolah SMK yang mencapai 135,27 (baik sekali).

Ketidaktercapaian indikator kinerja pada sasaran ini dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

1. Banyaknya animo siswa Kabupaten Cirebon yang melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon dan kabupaten atau kota lainnya.
2. Rawan *Drop Out* (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan dan Angka putus sekolah dan mengulang sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP masih relatif tinggi;
3. Rasio guru dan murid belum mencapai kondisi yang ideal. Rasio antara guru dan murid di semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dimana jumlah pertambahan murid tidak seimbang dengan pertambahan jumlah guru serta persebaran guru di Kabupaten Cirebon belum merata, apalagi ditambah dengan setiap tahunnya banyak guru yang pensiun namun tidak diikuti dengan penerimaan formasi CPNS guru;
4. Kualifikasi guru SD, SLB dan SMP masih kurang (guru SD dan SLB dibawah D-II, Guru SMP dibawah D-III), dan permasalahan pada pola perkembangan karier guru dalam pelaksanaan materi, rotasi maupun promosi;
5. Indeks pendidikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena rendahnya rata-rata lama sekolah yang disebabkan banyak siswa pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami putus sekolah dan rawan *drop out*;
6. Sarana prasarana belajar belum memadai, pelaksanaan materi lokal belum mantap serta serta Sistem pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya;
7. Jumlah Taman Kanak - Kanak masih kurang dan persebarannya tidak merata; dan

8. Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luar biasa.

Solusi untuk menghilangkan penyebab ketidaktercapaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung siswa penyandang disabilitas perlu melakukan pendataan siswa penyandang disabilitas untuk mengetahui jumlah siswa penyandang disabilitas, memaksimalkan sekolah luar biasa yang ada, dan membentuk sekolah inklusi di tingkat kecamatan;
2. Untuk mengantisipasi banyaknya animo siswa Kabupaten Cirebon yang melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana sekolah yang memiliki standar internasional dan nasional, perlu meningkatkan kapasitas, kualitas dan kreativitas kompetensi para tenaga pendidik dalam hal pemberian materi pembelajaran dan pelatihan, serta penyusunan kurikulum pembelajaran atau mutu pembelajaran yang dapat merangsang motivasi belajar, kreativitas, dan perilaku yang baik atas dasar agama, sosial dan budaya para peserta didik sehingga mutu sekolah di Kabupaten Cirebon bisa bersaing dengan sekolah di luar Kabupaten Cirebon;
3. Untuk pemerataan distribusi guru di wilayah Kabupaten Cirebon perlu dilakukan upaya pemerataan guru dengan dilakukannya pendataan dengan sistem *on line* melalui aplikasi Dapodik;
4. Meningkatkan motivasi siswa miskin melalui peningkatan pelayanan (bantuan untuk siswa miskin dan berprestasi) dalam rangka mengurangi jumlah siswa putus sekolah;
5. Meningkatkan motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi guru ke jenjang pendidikan lebih tinggi;

6. Untuk perluasan memperoleh kesempatan belajar dilakukan melalui penajaman kurikulum/pokok bahasan yang dapat memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
7. Perlu dilakukan revitalisasi rehabilitasi dan refungsionalisasi gedung sekolah;
8. Untuk perluasan memperoleh kesempatan pendidikan, masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/kurikulum
9. Perlu dilakukan pengangkatan guru PNS baru dan Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
10. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
11. Meningkatkan profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan;
12. Meningkatkan kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar, kecuali alat – alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah;
13. Menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya;
14. Perluasan dan penambahan program Paket A, Paket B dan Paket C;

15. Meningkatkan fungsi institusi dan pengisian lowongan kerja kepala sekolah, kepala urusan tata usaha di sekolah; dan Memantapkan pendekatan *School Based Management* dan *Community Based Management* melalui pemberdayaan institusi.

Tabel 3.5
Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66.25	66.25	100	66.38	66.04	99.49
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Point	85.38	84.01	101.61	81.33	73.27	90.09
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Point	3.96	3.99	99.24	3.92	29.76	759.18
4	Balita gizi buruk (BB/TB)	%	0.85	0.13	184.71	0.73	3.06	419.18
5	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	orang	1.345.865	1.365.085	101.43	1.345.865	1.925.427	143.62
6	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	%	0.054	0.054	100	0.053	0.052	98.11
7	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	%	0.055	0.080	145.46	0.054	15.07	109.20
8	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	Unit	57	57	100	57	57	100
9	Rasio dokter terhadap penduduk	%	0.139	0,216	155.4	0.138	1,507	155.4
10	Rasio paramedis terhadap penduduk	%	1.516	1.682	110.73	1.516	1.682	110.95
11	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Orang	1.345.000	1.345.000	100	1.345.000	1.197.588	89.04
12	Jumlah Posyandu Purnama	Unit	615	999	162.44	692	1.495	216.04
Rata-Rata					121.75			199.19

Tabel di atas menggambarkan capaian indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2018 adalah 199,19% yang masuk dalam katagori **Baik Sekali**, dan melebihi capaian tahun 2017 yang sebesar 121,75%. Indikator kinerja yang belum melampaui target adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang memiliki selisih 25,84 dari dan target. Dan secara umum indikator kinerja pada sasaran ini pada katagori sangat baik.

Keberhasilan atas capaian indikator kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga masih memiliki permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Tidak tercapainya target angka kematian bayi pada tahun 2018 disebabkan karena kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Kurangnya tenaga medis dan paramedis sehingga kurang optimalnya pelayanan kesehatan di puskesmas, sehingga perlu adanya penerimaan CPNS untuk formasi tenaga medis dan paramedis.

Untuk menghilangkan penyebab atas permasalahan di atas, beberapa langkah dan solusi yang diambil diantaranya :

1. Menyusun formasi dan analisis kebutuhan serta pemenuhan atas kekurangan ASN untuk tenaga medis dan para medis di lingkungan Kabupaten Cirebon;
2. Perbaikan, pemeliharaan, peningkatan mutu, kualitas dan jumlah sarana dan prasana kesehatan baik yang bersifat dasar maupun penunjang;
3. Pelayanan kesehatan masyarakat yang berbasis posyandu terus dikembangkan melalui peran serta masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih demi mewujudkan gerakan masyarakat yang mengarah pada sikap dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan langkah ampuh untuk menangkal penyakit. Namun dalam praktiknya, penerapan PHBS yang kesannya sederhana tidak selalu mudah dilakukan. Terutama bagi

mereka yang tidak terbiasa. Dalam hal ini, pendidikan dari keluarga sangat dibutuhkan;

5. Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif mengambil bagian dalam penyelenggaraan peningkatan kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah terus memberikan fasilitas, membina, mendorong serta menggerakkan swadaya masyarakat di Bidang Kesehatan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 3.6

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Berketerampilan dan Berjiwa Kewirausahaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah kawasan seni	Kawasan	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	Kali	1	1	100	1	1	100
3	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)							
	• Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	65	55.56	85.48	70	70.79	101.13
	• Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	65	81.63	125.58	70	78.79	112.56
	• Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45	49.08	109.07	50	56.17	112.34
	• Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	60	40.63	67.72	70	70.77	101.10
	• Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	%	50	65.05	130.1	55	53.51	97.29
	• Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	50	Pindah Ke Provinsi	0	50	Pindah Ke Provinsi	0
	• Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	%	55	Pindah Ke Provinsi	0	55	Pindah Ke Provinsi	0
	• Jumlah wirausahawan baru	Orang	100	320	320	100	180	180
	• Angka pengangguran terbuka	%	9.1	9.12	100.22	8.9	9.61	107.98
Rata-Rata					126.46			112.49

Dari tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran terwujudnya masyarakat yang

berbudaya, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan adalah sebesar 112,49 (**Baik Sekali**), walaupun lebih kecil dari capaian kinerja tahun 2017 yang sebesar 126.46%.

Pada tahun 2018 ada dua indikator kinerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Besaran Pemeriksaan Perusahaan dan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.

Pada sasaran terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan ada satu indikator kinerja yang belum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi pada program peningkatan kesempatan kerja adalah tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja baru dan arus migrasi masuk sehingga mengakibatkan tidak semua pencari kerja memperoleh pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan formal mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Cirebon sehingga berpengaruh pada produktivitas dan nilai tambah pekerja;
2. Program pendidikan dan pelatihan (training) teknis kompetensi ketenagakerjaan belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan perusahaan, serta masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan training menyangkut kurikulum, kebutuhan teknis/instruktur dan anggaran berbanding jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Cirebon.
3. Belum optimalnya program-program yang dapat menginisiasi pembentukan semangat *entrepreneurship* para pada para pekerja dan kalangan remaja dan pemuda;
4. Dalam upaya pengembangan lembaga ketenagakerjaan masih belum optimalnya mekanisme kerja kelembagaan

ketenagakerjaan yaitu Tripartit, Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh; dan

5. Sengketa atau perselisihan yang terjadi seringkali tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui mekanisme perjanjian bersama.

Dari permasalahan yang ada berikut ini adalah alternative solusi yang bias ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu :

1. Melakukan kegiatan *job canvasing*, *job fair* dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Perlu adanya sertifikasi kompetensi.
3. Upaya yang perlu dilaksanakan secara langsung oleh Dinas adalah perlu adanya pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) dan pelatihan berbasis kompetensi, serta secara tidak langsung berupa *up grading* pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui bimbingan teknis kepada Akreditur dan akreditasi LPK itu sendiri. TKI yang telah selesai masa kontrak kerjanya dan kembali ke daerah asal atau purna TKI sering kehilangan sumber pendapatan karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi purna TKI, setiap peserta dibekali pengetahuan memanfaatkan peluang berwirausaha agar mampu mandiri secara finansial.
4. Solusi yang dilaksanakan adalah memperluas akses informasi pasar kerja, baik kepada penyedia kerja maupun pencari kerja. Selain itu sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, Disnakertrans perlu melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat agar mampu bekerja dengan toleransi kecacatan tertentu.
5. Perlu upaya untuk membuat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Cirebon.

6. Upaya perbaikan kondisi lembaga ketenagakerjaan yang dilakukan adalah melalui pembinaan terhadap lembaga ketenagakerjaan serta penciptaan hubungan harmonis di antara kelembagaan ketenagakerjaan.
7. Upaya fasilitasi pejabat fungsional pengawas Kenagakerjaan yang ada untuk melaksanakan kegiatan pemilihan pekerja teladan dan penilaian perusahaan terbaik mempekerjakan tenaga kerja perempuan.
8. Perlu meningkatkan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan seminar tentang ketenagakerjaan.
9. Perlu penambahan pelatihan terhadap pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan wirausaha.
10. Penguatan Balai Latihan Kerja sebagaipusat pelatihan yang lengkap, modern dan inovatif yang mampu mencetak tenaga kerja terampil.

Tabel 3.7

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Wisata Berbasis Budaya

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	%	10	14.57	145.57	10	49.45	494.50
Rata-Rata					145.57			494.50

Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya yang memiliki satu indikator kinerja memiliki capaian kinerja 494.50% (Baik Sekali), capaian ini melebihi target 2018 yang hanya 10%, sedangkan capaian kinerjanya mencapai 494,50%. Capaian tahun ini juga lebih besar dari capaian tahun 2017 yaitu 145,57%. Meskipun berhasil melampaui target kinerja dengan sangat baik karena adanya pergeseran destinasi wisata dari Kota Bandung ke Daerah Cirebon serta karena akses jalan tol cipali yang mendukung aksesibilitas untuk mengunjungi Kabupaten Cirebon serta memudah mobiltas wisatawan

dalam melakukan perjalanan. Namun demikian, terkait dengan masalah ini ada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon diantaranya adalah :

1. Kurangnya kreativitas manajemen kepariwisataan dalam mengkreasikan program dan even pariwisata di Kabupaten Cirebon;
2. Masih rendahnya dukungan dari pihak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat terhadap even wisata, budaya dan kesenian yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon.

Menghadapi permasalahan di atas, alternatif pemecahan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mensinergikan dan mengadaptasi kalender even pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Cirebon dengan kalender wisata instansi, badan atau lembaga lain misalnya Kementerian Pariwisata;
2. Mempromosikan kegiatan-kegiatan kepariwisataan, budaya dan kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon secara lebih terkordinasi dan lebih massif dalam media informasi yang ada.

Tabel 3.8

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kemandirian Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat	peringkat	14	18	71.43	8	7	100.89
Rata-rata					71.43			100.89

Pencapaian rata-rata atas sasaran terwujudnya kemandirian peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga pada tahun 2018 sebesar 100,89**(baik sekali)**, pencapaian tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 71.43% dari target. Ukuran peringkat dalam olahraga

adalah untuk even olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat yaitu berupa POPDA dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA).

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Cirebon adalah :

1. Terbatasnya utusan pemuda pelopor;
2. Belum adanya pola rekrutmen, pembinaan dan pencarian bibit (*talent scouting*) untuk pembinaan atlet usia dini serta adanya ancaman direkrutnya bibit atlet berbakat Kabupaten Cirebon oleh daerah lain;
3. Masih kurangnya sarana dan prasana yang representatif dan masih kurangnya instruktur untuk cabang olahraga prestasi;
4. Kurangnya komitmen penyedia jasa perbaikan dan pembangunan sarpras olahraga.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas berikut ini adalah solusi yang ada :

1. Melakukan koordinasi ke seluruh kecamatan agar mengirimkan utusan pemuda pelopor.
2. Membentuk dan membina instruktur cabang olahraga prestasi.
3. Pemberian penghargaan (*reward*) kepada bibit atlet berbakat Kabupaten Cirebon serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan.

MisiKetiga : Mendorong Pemerataan Pembangunan Tematik/Sektoral dan Kewilayahan Berdasarkan Potensi yang Tersedia

Tabel 3.9

Target dan Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Koneksitas antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	594.44	548.49	92.27	626.44	568.49	90.75

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Km	419.91	430.46	102.51	449.91	451.26	100.30
Rata-Rata					97.39			95.53

Koneksitas antar wilayah menjadi salah satu bagian penting untuk kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilisasi orang. Koneksitas wilayah akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan rata-rata hasil pencapaian target indikator kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah panjang jalan Kabupaten Cirebon dalam kondisi baik mencapai 95,53% (**Baik**).

Hasil pencapaian ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara, hasil ini lebih kecil dari rata-rata capaian tahun 2017 sebesar 97,39% (**Baik**). Ketidaktercapaian target kinerja tahun 2017 disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Pertumbuhan prosentase kendaraan yang kurang terkendali dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan dan kompetisi global;
2. Masih Kurangnya Kesadaran para pengguna jalan terutama kendaraan berat yang melebihi tonase yang mengakibatkan cepatnya tingkat kerusakan jalan;
3. Luas wilayah dan banyaknya ruas jalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon;
4. Adanya di wilayah tertentu yang kondisi tanah dasarnya labil; dan
5. Kebiasaan buruk masyarakat yang membuang limbah cair ke area jalan.

Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa pemecahan masalah atau solusi adalah

1. Mengoptimalkan Potensi yang ada untuk infrastruktur jalan yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan penajaman Data skala prioritas penanganan jalan dan melakukan peningkatan jalan dan pemeliharaan periodik jalan secara berkesinambungan;
2. Melakukan Koordinasi dengan Dinas/Instansi Terkait;
3. Mengoptimalkan Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas untuk mengatasi Luas wilayah dan banyaknya ruas jalan yang tersebar diwilayah Kabupaten Cirebon; dan
4. Memanfaatkan teknologi kontruksi yang ada seperti penggunaan teknologi betonisasi (*rigid pavement*) pada ruas-ruas jalan tertentu.

Tabel 3.10

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pembangunan Prasarana Wilayah yang Memadai

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jaringan Irigasi							
	• Panjang Saluran Induk	Km	68.548	148.813	217.09	73.33	134.53	183.46
	• Panjang Saluran Sekunder	Km	35.065	22.972	65.51	37.26	22.97	85.59
	• Bangunan Jaringan Irigasi	Km	70	77	110	90	69	76.67
2	Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	Rumah tangga	118.620	477.365	402	150.320	482.814	321.19
3	Jumlah daerah rawan banjir	Kec.	4	6	50	2	6	300
4	Persentase pengangkutan sampah	%	42	37.00	88.1	47	10	21.28
5	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	%	40	39.00	97.5	45	42.00	93.33
6	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	%	33	22.00	66.67	30	18	60.00
7	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	75	96.05	128.07	79	487.57	617.17
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Pos jaga	12	12	100	13	9	69.23
Rata-Rata					142.54			199.65

Dari hasil pencapaian indikator kinerja di atas, rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai tahun 2018 adalah sebesar 199,65% (**Baik Sekali**) sehingga pencapaian ini melebihi capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 142,54%, sementara untuk pencapaian terkecil adalah indikator pengurangan sampah perkotaan, hal ini menjadi perhatian pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Meskipun secara rata-rata pencapaian indikator kinerja ini sangat baik, di bawah ini adalah permasalahan dan solusi yang dihadapi :

1. Menurunnya fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap, sehingga diperlukan perencanaan SDA secara terpadu dan berkelanjutan yang sesuai dengan tingkat kerusakan serta melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap;
2. Kurangnya informasi dalam data base irigasi, maka perlu diadakan pembuatan data base secara menyeluruh dan update data base secara kontinyu;
3. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah, sehingga diperlukan upaya konservasi SDA dengan mengadakan penanaman pohon disekitar wilayah aliran sungai;
4. Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan (AKNOP), sehingga perlu dilakukan pendidikan dan bimbingan teknis terhadap juru dan petugas pintu air;
5. Meningkatnya daya rusak air, maka perlu dilakukan upaya preventif/ pencegahan dengan mengadakan konservasi SDA; mengadakan pembangunan cekdam dan bendung yang dapat mengendalikan serta mengatur aliran sungai untuk kepentingan irigasi; dan mewujudkan pengadaan bahan banjir seperti sand bag dan kawat bronjong untuk antisipasi penanganan darurat

pada daerah irigasi yang terkena banjir serta upaya represive/penanganan dengan mengadakan pembangunan tebing saluran dan sarana dan prasarana pada saluran yang longsor akibat bencana maupun pembangunan saluran pembuang guna mengatasi genangan banjir;

6. Masih rendahnya partisipasi himpunan petani pemakai air terhadap pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya, maka perlu dilakukan pembinaan kelembagaan himpunan petani pemakai air agar memiliki kepedulian untuk memelihara jaringan irigasi serta kemampuan teknis untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya;
7. Dengan terjadinya anomali cuaca, maka perlu dilakukan review Rencana Tata Tanam Global serta optimalisasi pemanfaatan embung yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana angkutan sampah dalam melayani wilayah pelayanan kebersihan yang cukup luas sehingga perlu adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan dan Persampahan;
9. Luasnya cakupan daerah pelayanan pengangkutan persampahan (kebersihan), sehingga perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada (sarana dan prasarana, SDM dan anggaran) serta mendorong terciptanya upaya pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat (TPST 3R, Bank Sampah, Komposter Multy Drum).
10. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; *reuse, reduse and recyle*), sehingga perlu didorong dan difasilitasi terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah sebagai kader lingkungan di masyarakat.
11. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, maka perlu mengoptimalkan kegiatan

sosialisasi/*sharing*/diskusi tentang pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat sehingga terbentuk paradigma baru tentang pengelolaan sampah sebagai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

12. Masih kurang pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan kondisi rumah dan lingkungan yang rawan bencana kebakaran dan hubungan singkat listrik.

Tabel 3.11
Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Cirebon yang Bersih, Asri dan Lestari

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	5	6		5	6	
1	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok	8	8	100	8	13	162.5
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kec.	20	20	100	30	8.69	28.97
3	Prosentase kawasan lindung	%	30	2.43	8.1	30	2.43	8.1
4	Penghargaan Adipura	Kali	1	1	100	1	1	100
5	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	Sungai	5	5	100	5	5	100
6	Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	Industri	15	15	100	20	18	90
7	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	Aduan	12	12	100	12	1	8.33
Rata-Rata						86.67		69.98

Capaian rata-rata atas sasaran terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari tahun 2018 adalah sebesar 69,98% (**cukup**) capaian ini lebih kecil dari tahun 2017 yaitu 86,67%, meskipun masih di bawah target kinerja 2017, dan capaian terkecil didapat oleh indikator prosentase kawasan hutan lindung yang hanya mencapai 8,1% (**kurang**).

Permasalahan dan solusi berkaitan dengan sasaran terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari adalah :

1. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan, upaya yang dilakukan dengan sosialisasi dan

pembinaan secara terus menerus dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan lingkungan.

2. Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah, maka ke depan diharapkan adanya penambahan sarana pengelolaan sampah.
3. Para pelaku usaha dan masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan, maka perlu ditingkatkan upaya sosialisasi kepada pihak yang berkompeten.
4. Tingginya kerusakan lingkungan sehingga jumlah lahan yang perlu dikonservasi sangat luas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengadaan bibit yang ada, upaya yang dilakukan dengan kegiatan konservasi secara berkelanjutan.
5. Pelaksanaan penanaman pohon tergantung pada musim penghujan dan letak lokasi sumber mata air mayoritas jauh, maka penanaman dilakukan pada musim hujan menghindari resiko mati dan bantuan bibitnya (ukuran bibit) disesuaikan dengan jenis dan lokasi.
6. Peran serta kesadaran dari dunia usaha masih rendah dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya, maka dilakukan kerjasama dengan masyarakat melalui perangkat desa dan dunia usaha untuk melaksanakan penanaman pohon sehingga diharapkan semua pihak ikut berperan dan merasa memiliki serta bertanggungjawab.
7. Informasi yang meliputi seluruh data yang terkait dengan kondisi lingkungan hidup belum sepenuhnya terpenuhi secara lengkap baik dari Kecamatan ataupun dari SKPD terkait, sehingga perlu diadakannya koordinasi yang lebih intensif terkait dengan pengumpulan informasi data dari pihak Kecamatan maupun SKPD terkait dalam mendukung

tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Cirebon.

8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap RTH serta kurangnya lahan sebagai RTH di perkotaan, maka perlu adanya regulasi tentang RTH di perkotaan dan pembinaan dan himbauan tentang RTH.

Misi Keempat : Menciptakan Sinergi Pembangunan Secara Menyeluruh Antar Berbagai Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, Akademik Dan Komunitas)

Tabel 3.12
Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah komunitas	Komunitas	85	122	162.67	90	140	155.55
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	85	206	274.67	90	210	233.33
3	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	Lembaga	254	112	133.33	339	349	102.95
Rata-Rata					190.22			163.92

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar 163,92 (**baik sekali**). Hal ini disebabkan revitalisasi dan peran serta PKK, pendamping desa, dan pembentukan komunitas dalam masyarakat.

Meskipun pencapaian target pada sasaran ini telah tercapai akan tetapi masih ada permasalahan yang dihadapi dalam kelembagan/institusional desa, diantaranya adalah :

1. Masih belum terpenuhinya komitmen dan kesepakatan bersama antara kepala desa dan perangkat desa untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu untuk meningkatkan kapasitas individu maupun organisasi;

2. Belum berubahnya etos dan kedisiplinan kerja perangkat desa, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan sistematis dalam mengangkat kapasitas sekretaris desa khususnya tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan kebijakan desa, kepemimpinan desa, manajemen pelayanan desa dan pengambilan keputusan, serta diperlukan pengawasan secara melekat dari pihak kecamatan;
3. Pengurus LPMD/K masih belum maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu dilakukan pembekalan dan pelatihan bagi pengurus LPMD/K;
4. Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes, sehingga perlu pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa;
5. Masih kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pengurusan dan pengelolaan pasar desa, sehingga perlu adanya pelatihan bagi pengurus pasar desa;

Misi Kelima : Mewujudkan Standar Hidup Layak Masyarakat Melalui Pemenuhan Hak-Hak Dasar Terutama Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Penciptaan Rasa Aman, Damai dan Tenteram.

Tabel 3.13

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai PDRB	Rp (000)	11.559.249	29.148.228	252.16	12.183.449	41.947.728	344.30
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.45	5.62	103.12	5.50	5.05	91.82
3	PDRB per kapita	Rp	17.811.979	18.287.696	102.67	19.590.887	19.424.048	99.15
4	Tingkat inflasi	%	3.5-4.5	4.15	92.22	3.5-4.5	2.69	76.86
5	Jumlah daerah rawan pangan	Desa	9	9	100	8	6	75
6	Nilai investasi	Rp (Juta)	1.128.347	846.160	75	1.297.599	2.007.508	154.71
7	Persentase koperasi aktif	%	94	89.67	100	97	89.67	92.44

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	Lokasi	8	4	50.00	8	53	662.5
Rata-Rata					109.4			199.60

Dari tabel di atas tergambar kondisi indikator makro perekonomian Kabupaten Cirebon, indikator kinerja di atas merupakan indikator untuk sasaran terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, dari tabel di atas secara umum kondisi perekonomian kabupaten Cirebon mengalami peningkatan, hal ini terindikasi dari capaian kinerja tahun 2018 yang memiliki rata-rata 199,60% (Baik Sekali), lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 109,40%.

Ada tiga indikator kinerja yang masih belum mencapai target 2018, yaitu tingkat inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Jumlah daerah rawan pangan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan intansi baik daerah maupun pusat.

Beberapa permasalahan dan solusi antara lain :

1. Pelaksanaan pameran promosi investasi dan pariwisata belum didukung oleh sumber daya manusia yang professional serta belum terintegrasi dengan even investasi dan pariwisata dalam skala yang lebih besar;
2. Tingkat inflasi masih dipengaruhi oleh factor-faktor yang berasal dari luar daerah, dan beberapa komoditas memang sangat dipengaruhi oleh faktor ini, oleh sebab itu Tim Pengendali Inflasi Daerah belum berjalan secara optimal dan diperlukan sumber data perubahan jumlah dan harga komoditas pemengaruh nilai inflasi yang paling signifikan;
3. Lokasi produk unggulan daerah yang menjadi potensi ekonomi tersebar di 40 kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan perlu dilakukan penjadwalan secara tertib.

4. Masih minimnya perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga perlu ditingkatkan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait.

Tabel 3.14

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Lebih Berkualitas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Jumlah penduduk miskin	%	12.59	13.49	92.85	12.12	12.97	107.01
2	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	%	100	85.20	85.2	100	87.10	87.1
Rata-Rata					89.03			97,05

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas menunjukkan kenaikan sebesar 97.05 (**Baik**), lebih baik dari capaian tahun 2018 yang sebesar 89.03%.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja sasaran terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas ini adalah :

1. Permasalahan struktur, artinya bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal dan menunjukkan hasil capaian yang menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, hal ini dikarenakan kemungkinan adanya kelemahan dalam proses perencanaan dan keterbatasan sumber daya/anggaran untuk bisa menginisiasi dan mengintervensi program dan kegiatan yang mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan.
2. Kemiskinan juga berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat sehingga diperlukan program dan kegiatan kolaboratif yang mampu menekan angka kemiskinan;

3. Selain itu, masalah kemiskinan juga berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran di daerah, maka perlu sinergitas antar beberapa stakeholder dan pengambil keputusan untuk bekerja sama lintas sektoral sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan.

Berkaitan dengan masalah di atas ada beberapa solusi yaitu :

1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar;
2. Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat;
3. Meminimalisasi maladministrasi dan praktek administrasi public yang tidak sehat, karena kedua hal tersebut merupakan penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya;
4. Mendorong program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan filantropi seperti zakat infaq dan shodaqoh untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat;
5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

6. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar;
7. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin :
 - a. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah;
 - b. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus;
 - c. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat;
8. Selain yang diatas terdapat 4 strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:
 - a. Menyempurnakan program perlindungan social;
 - b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;
 - c. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Pembangunan yang inklusif.

Misi Keenam : Mewujudkan Tatanan Masyarakat dan Reformasi Sistem Birokrasi Menuju Sistem Berbangsa dan Bernegara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Tabel 3.15

Target dan Capaian Indikator SasaranMeningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	7	8	9	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	4.00	3.88	97	4.13	4.13	100
2	Jumlah unit pelayanan	Unit	7	7	100	9	9	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	7	8	9	7	8	9
	yang melaksanakan SOP dan SPM							
3	Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	Kec.	10	10	100	30	40	133.33
Rata-Rata					92.61			111.11

Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima sebagaimana tercantum pada tabel di atas, sudah sepenuhnya mencapai target kinerja yang ditetapkan, rata-rata capaian kinerja yang dicapai adalah 111.11% (**Baik Sekali**), hal ini lebih baik dari capaian kinerja tahun 2017 yang menunjukkan angka 92.61% (**Baik**).

Berkaitan dengan kondisi di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN kabupaten Cirebon, sehingga nilai IKM yang dicapai masih belum mencapai target yang ditetapkan;
2. Beberapa SKPD masih belum mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga beberapa jenis pelayanan masih belum memenuhi prasyarat minimal yang harus dicapai;
3. Budaya masyarakat yang guyub dan gotong royong seringkali tidak sesuai dengan budaya profesionalisme ASN, masyarakat seringkali mengungkapkan cara terima kasih yang kadang belum sesuai dengan peraturan dan kode etik ASN.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, berikut ini adalah beberapa solusi yang ditawarkan yaitu :

1. Optimilisasi dan revitalisasi pelayanan publik pada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

2. Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan *standard operating procedure* (SOP) bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon baik yang memiliki fungsi pelayanan mikro dan makro, langsung dan tidak langsung kepada masyarakat;

Tabel 3.16

Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	%	3.10	3.00	96.77	3.4	3.66	107.65
2	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	%	95	69	72.63	100	81.84	81.84
Rata- Rata					84.70			94.75

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, mencapai rata-rata 94.75% (**Baik**), lebih besar dari capaian tahun 2017 sebesar 84.70% (**Baik**).

indikator kinerja Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai sudah tercapai dimana target yang ditentukan 3.4% sedangkan realisasinya 3.66% ditambah dengan jumlah anggaran yang memadai untuk program pendidikan S2 di tahun 2018 ini.

Sementara untuk indikator kedua pada sasaran di atas yaitu indikator Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan disebabkan oleh kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan jumlah ASN yang masih jauh dari mencukupi dan belum pada jumlah yang ideal. Permasalahan ini juga disebabkan oleh lebih banyak jumlah kotak jabatan daripada jumlah PNS yang ada, sehingga penempatan masih belum sesuai dengan kompetensi yang ada.

Atas kedua permasalahan di atas, beberapa solusi yang bisa ditawarkan :

1. Meningkatkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal bagi ASN Kabupaten Cirebon sesuai dengan target dan sasaran yang ada pada RPJMD 2014-2019;
2. Melakukan profiling, pemetaan dan evaluasi berkenaan dengan kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki pegawai, kesenjangan (*gap*) yang ada nantinya dijadikan bahan dalam penyusunan analisis kebutuhan diklat.
3. Mengajukan usulan rekrutmen atau pengadaan PNS untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga jumlah ASN yang ada mendekati angka ideal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas administratif dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Tabel 3.17

Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	%	Target 2018	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-rata capaian kinerja SKPD	%	60-70	65	108.33	65-70	75	107.14
2	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Angka/Huruf	51-75	75	100.00	51-75	52	69.33
3	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	%	4	0	0	4	5.02	125.5
4	Peningkatan Pendapatan asli daerah	%	15	35.41	236.07	15	75.55	503.67
Rata-Rata					111.1			201.41

Peningkatan rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih seperti pada tabel di atas adalah 201.41% (**Baik Sekali**), realisasi capaian kinerja tahun ini lebih baik dari tahun 2017 yaitu 111.1% (**Baik Sekali**).

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan tata pemerintah yang baik dan bersih adalah

1. Masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan, belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan prestasi kerja, gaji yang belum memadai untuk hidup layak;
2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan mutu kinerja;
3. Belum diterapkannya standar mutu pelayanan publik secara konsisten, belum memadainya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam pemberian pelayanan, dan belum sepenuhnya diterapkan akuntabilitas kinerja;
4. ASN Kabupaten Cirebon masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat dalam dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif;
5. Masih adanya struktur organisasi instansi pemerintahan yang masih cenderung kaya struktur dan miskin fungsi. Artinya, pembentukan unit-unit kerja struktural cenderung kurang proporsional dan efisien, serta kurang memberi peluang diterapkannya jabatan-jabatan fungsional yang relevan;
6. Masih lemahnya sinkronisasi tata hubungan kerja antara kementerian/ lembaga dan instansi pemerintah daerah, lemahnya sistem dan prosedur dalam melaksanakan manajemen instansi pemerintahan, serta masih lemahnya pengelolaan dokumen dan kearsipan negara;
7. Semua permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh belum dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen di lingkungan instansi pemerintahan secara benar dan konsisten.

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan diupayakan bersifat terobosan dan melanjutkan hal-hal yang relevan yang telah dilakukan.

1. Meminimalisasi praktek maladministrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui:
 - a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan kegiatan instansi pemerintahan;
 - b. pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. peningkatan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta tindak lanjut atas hasil pengawasan;
 - d. pembangunan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab;
 - e. peningkatan pemberdayaan dan sinergi penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah melalui:
 - a. penataan kembali kelembagaan pemerintahan daerah agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan responsif dengan struktur yang lebih proporsional dan efisien;
 - b. peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan, termasuk prosedur kerja pada tingkatan dan kegiatan instansi pemerintahan daerah;
 - c. penataan dan peningkatan kapasitas pegawai agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - d. peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; dalam hal ini, terus

- dilakukan upaya peningkatan gaji pegawai secara proporsional, adil, dan layak;
- e. optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, antara lain, melalui:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan aparatur pemerintahan, termasuk kinerja pelayanan publik; peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Sampai dengan Akhir Periode RPJMD

Kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, sedangkan Capaian Kinerja jangka menengah adalah tahapan membandingkan antara Realisasi **sampai dengan** Tahun 2018 dibandingkan target limatahunan.

Capaian kinerja jangka menengah yang merupakan tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah sebagai berikut:



No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2018	% Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SD/MD	%	54	54.78	101.44	62	75.2	121.29	300	129.98	43.33
			b. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMP	%	61	61.89	101.46	52	55.71	107.13	345	117.6	34.09
			c. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMA	%	66	66.96	101.46	73	66.96	Pindah ke provinsi	375	133.92	35.71
			d. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMK	%	66	66.96	101.46	73	66.96	Pindah ke provinsi	375	133.92	35.71
			e. jumlah siswa yang hafal jus'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA	%	5	5	100	5	5	Pindah ke provnsi	25	10	40.00
			f. jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da magrib mengaji	DKM	424	753	177.6	424	776	183.02	424	1529	360.61
			g. jumlah menghafal Quran	orang	831	173	20.82	1.105	171	15.48	5071	344	6.78
			h. prestasi lomba keagamaan tingkat Propinsi Jawa Barat	peringkat	5	14	80	5	7	140.00	lima besar	21	6 besar
			i. jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	kasus	5	0	200	4	0	200	6	0	33.33
			2	II	1. Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	a. peningkatan indeks pendidikan	%	83.00-84.27	54.88	66.12	84.33-85.60	68.09	80.74
b. Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas	%	95				95	100	95.37	95.53	100.17	94.26	190.53	202.13
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7.69				7.9	102.73	6.75	6.61	97.92	7.35	14.51	197.41
d. Angka Partisipasi Kasar (APK)													
- SD/MI	%	122				109.31	89.6	109	117.05	107.38	114	226.36	198.56
- SMP/MTs	%	110.21				97.18	88.18	110.11	115.08	104.51	110.41	212.26	192.25
- SMA/MA	%	80.05				75.9	94.81	80.98	91.58	113.09	79.54	167.48	210.56
e. Angka Partisipasi Murni (APM)												0	
- SD/MI	%	99.94				96.28	96.38	99.95	107.33	107.38	99.92	203.61	203.77
- SMP/MTs	%	90.1				74.81	96.34	90.3	97.46	107.93	89.7	172.27	192.05

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2018	% Capaian Kinerja RPJMD
			- SMA/MA	%	61.8	52.54	85.02	62.28	85.02	136.51	60.84	137.56	226.10
			- SMK	%	47.95	71.41	148.93	48.45	57.18	118.02	46.95	128.59	273.89
			f. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah										
			- SD	%	49	49	100	50	46.77	86.61	48	95.77	199.52
			- SMP	%	19	18	94.74	19	18.93	99.63	18	36.93	205.17
			- SMA/SMK	%	21	20	95.24	22	29.76	135.27	19	49.76	261.89
		2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	a. Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	66.25	66.25	100	66.38	66.04	99.49	65.98	132.29	200.50
			b. Ratio kematian ibu	point	85.38	84.01	101.61	81.33	73.27	90	95.92	157.28	163.97
			c. Ratio kematian bayi	point	3.96	3.99	99.24	3.92	29.76	759	4.17	33.75	809.35
			d. Balita gizi buruk	%	0.85	0.13	184.71	0.73	306	419	1.09	306.13	28085.32
			e. Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	orang	1,345,865	1,365,085	101.43	1,345,865	1,925,427	143.62	1345865	3290512	244.49
			f. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	%	0.054	0.054	100	0.053	0.52	98.11	0.055	0.574	1043.64
			g. Rasio puskesmas. klinik. puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	%	0.055	0.08	145.46	0,054	9.2	109.2	0.027	9.28	34370.37
			h. Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	unit	57	57	100	57	57	100	57	114	200.00
			i. Rasio dokter terhadap penduduk	%	0.139	0.216	155.4	0.138	1.507	155.4	0.142	1.723	1213.38
			j. Rasio paramedis terhadap penduduk	%	1,516	1,682	110.73	1.516	1.682	110.73	1,457	3364	230.89
			k. presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	orang	1,345,000	1,345,000	100	1,345,000	1,197,588	89.04	1345000	2542588	189.04
			l. Jumlah Posyandu Purnama	unit	615	999	162.44	692	1.495	216.04	769	2492	324.32
		3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya. berkepribadian. dan berjiwa	a. Jumlah kawasan seni	kawasan	1	0	0	1	1	100	-	1	100.00
			b. Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	kali	1	1	100	1	1	100	-	2	200.00
			c. Cakupan peserta										

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2018	% Capaian Kinerja RPJMD
		kewirausahaan	pendidikan dan pelatihan berbasis kopetensi (SPM)										
			- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	65	55.56	85.48	70	70.79	101.13	55	126.35	229.73
			- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	65	81.63	125.58	70	78.79	112.56	55	160.42	291.67
			- Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45	49.08	109.07	50	56.17	112.34	35	105.25	300.71
			- Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	60	40.63	67.72	70	70.77	101.1	45	111.4	247.56
			- Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	%	50	65.05	130.1	55	53.51	97.29	45	118.56	263.47
			- Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	50	Pindah Ke Provinsi		55	Pindah ke provinsi		40		0.00
			- Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	%	55	Pindah Ke Provinsi		60	Pindah ke provinsi		45		0.00
			d. Jumlah wiirahawawan baru	orang	100	320	320	100	180	180	500	500	100.00
			e. Angka pengangguran terbuka	%	9.1	9.12	100.22	8.9	9.61	107.98	9.5	18.73	197.16
		4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a. Meningkatnya kunjungan wisatawan	%	10	85.57	855.7	10	49.45	494.5	50	135.02	270.04
		5. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga	a. Prestasi olah raga di tingkat provinsi Jawa Barat	Peringkat	14	18	71.43	8	7	100.89	-	25	833.33
III		1. Peningkatan koneksitas antar wilayah	a. Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kilometer	594.44	548.49	92.27	626.44	568.51	90.75	509.14	1117	219.39

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2018	% Capaian Kinerja RPJMD
			b. Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Kilometer	419.91	430.46	102.51	449.91	451.26	100.3	359.91	881.72	244.98
		2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	a. Jaringan irigasi										
			- Panjang saluran induk	Kilometer	68,548	148,813	217.09	73	135	183.46	58,995	148947.53	252.47
			- Panjang saluran sekunder	Kilometer	35,065	22,972	65.51	37	23	85.59	30,666	22994.972	74.99
			- Bangunan jaringan irigasi	%	70	77	110	90	69	76.67	50	146	292.00
			b. Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	rumah tangga	118.62	477,365	402	150.32	483	321.19	84,400	477847.81	566.17
			c. Jumlah daerah rawan banjir	Kecamatan	4	6	50	2	6	300	8	12	150.00
		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	d. Prosentase pengangkutan sampah	%	42	37	88.1	47	10	21.28	32	47	146.88
			e. Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm. selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	%	40	39	97.5	45	45	93.33	150	84	56.00
			f. Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	%	33	22	66.67	30	18	60	39	40	102.56
			g. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	75	96.05	128.07	79	487.569	617.17	67	583.619	871.07
			h. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Pos jaga	12	12	100	13	9	69,23	9	21	233,33
			a. Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok	8	8	100	8	13	162,5	42	21	50,00
		b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kecamatan	20	20	100	30	8.69	28.97	40	28.69	71.73	
		c. Prosentase kawasan lindung	%	30	2.43	8.1	30	2.43	8.1	30	4.86	16.20	
		d. Penghargaan Adipura	kali	1	1	100	1	1	100	5	2	40.00	
		e. Jumlah sungai yang	sungai	5	5	100	5	5	100	25	10	40.00	

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2018	% Capaian Kinerja RPJMD
			memenuhi kualitas baku mutu air										
			f. Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	industri	15	15	100	20	18	90	75	33	44.00
			g. Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	pengaduan	12	12	100	12	1	8.33	60	13	21.67
	IV	1. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Jumlah komunitas	komunitas	85	122	162.67	90	140	155.55	424	262	61.79
			b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	85	206	274.67	90	210	233.33	424	416	98.11
			c. Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	lembaga	254	112	133.33	339	349	102.95	424	461	108.73
	V	1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a. Nilai PDRB	Rp (dlm juta)	11.559.249	29.148.228	252.16	12.183.449	41.947.728	344.3	10,419,976	71095956	682.30
			b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.45	5.62	103.12	5,5	5.05	91.82	5.35	10.67	199.44
			c. PDRB per kapita	Rp	17.811.979	18.287.696	102.67	19.590.887	19.424.048	99.15	14,765,489	37711744	255.40
			d. Tingkat Inflasi	%	3.5-4.5	4.15	92.22	3.5-4.5	2.69	76.86	3.5-4.5	6.84	15.37
			e. Jumlah Daerah rawan pangan	desa	9	9	100	8	6	75	45	15	33.33
			f. Nilai Investasi	Rp (dml juta)	1,128,347	846.16	75	1.297.599	2.007.508	154.71	853,192	2.853.668	334.47
			g. Prosentase Koperasi aktif	%	94	89.67	100	97	89.67	92.44	88.42	179.34	202.83
			h. Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	lokasi	8	4	50	8	53	662.5	40	57	142.50
		2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a. Menurunnya jumlah penduduk miskin	%	12.59			12,12	12.97	107.01	11.65	26.46	227.12
			b. meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	%	100			100	87.1	87.1	100	172.3	172.30
	VI	1. Terwujudnya pelayanan publik yang	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	4	3.88	97	4,13	3.88	100	4.25	7.76	182.59
			b. Jumlah unit pelayanan	unit	7	7	100	9	9	100	30	16	53.33

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2017			% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2018	% Capaian Kinerja RPJMD
		prima	yang melaksanakan SOP dan SPM										
			c. Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu 3,kecamatan (PATEN)	Kecamatan	20	10	50	30	40	133.33	40	50	125.00
		2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a. Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	%	3.1	3	96.77	3.4	3.66	107.65	2.93	6.66	227.30
			b. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	%	95	69	72.63	100	81.84	81.84	100	150.84	150.84
		3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a. Rata-rata capaian kinerja SKPD	%	60-70	65		65-70	75	107.14	50-55	140	254.55
			b. Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	%	51-75	75		51-75	52	69.33	Baik	127	Baik
			c. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	%	0	0		4	5.02	125.5	5	5.02	100.40
			d. Peningkatan Pendapatan asli daerah	%	0			15	75.55	503.67	15	75.55	503.67



B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 diarahkan kepada :

- a. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
- c. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
- d. Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Cirebon 2018-2019 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 3.18
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018

Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	3.589.545.026.089,00	3.631.342.858.755,85	101,16%
Belanja Daerah	3.855.244.761.111,73	3.598.094.858.227,07	93,33%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah, pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 3.589.545.026.089,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.631.342.858.755,85 (101,16%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	569.157.006.675,00	584.873.202.330,60	102,76%
2	Dana Perimbangan	2.105.217.579.359,00	2.070.427.928.565,00	98,35%
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.031.233.705.352,00	1.027.829.494.593,00	99,67%
Jumlah Pendapatan Daerah		3.705.608.291.386,00	3.683.130.625.488,60	99,39%

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 569.157.006.675,00 dan realisasi sebesar Rp. 584.873.202.330,60 (102,76%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil Pajak Daerah	190.000.000.000,00	207.896.011.946,00	102,42%
2	Hasil Retribusi Daerah	46.177.974.350,00	42.630.642.182,00	92,32%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.894.000.000,00	7.895.373.711,00	100,02%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	325.085.032.325,00	326.451.174.491,60	100,42%
Jumlah Pendapatan Daerah		569.157.006.675,00	584.873.202.330,60	102,76%

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 2.105.217.579.359,00 dan realisasi/penerimaan sebesar Rp. 2.070.427.928.565,00 (98,35%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Dana Perimbangan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	97.284.783.359,00	87.155.137.904,00	89,59%
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.500.538.688.000,00	1.500.538.688.000,00	100,00%
Jumlah Dana Perimbangan		2.105.217.579.359,00	2.070.427.928.565,00	98,35%

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.031.233.705.352,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.027.829.494.593,00 atau 99,67%.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Hibah	215.079.200.000,00	214.038.960.000,00	99,52%
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2)	282.153.576.352,00	282.185.583.477,00	100,01%
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	405.992.221.000,00	405.992.221.000,00	100,00%
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	128.008.708.000,00	125.612.730.116,00	98,13%
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		1.031.233.705.352,00	1.027.829.494.593,00	99,67%

Belanja Daerah Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 4.003.036.048.497,51 dengan realisasi sebesar Rp. 3.681.465.057.398,38 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 2.191.816.598.519,51 dengan realisasi sebesar Rp. 2.099.753.324.736,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.811.219.449.978,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.581.711.732.662,38 sehingga ada penghematan sebesar Rp. 229.507.717.315,62.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Belanja Tidak Langsung	2.191.816.598.519,51	2.099.753.324.736,00	95,80 %
2	Belanja Langsung	1.811.219.449.978,00	1.581.711.732.662,38	87,33 %
Jumlah Belanja Daerah		4.003.036.048.497,51	3.681.465.057.398,38	91,97 %

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

2. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat Nomor : 29.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK RI Perwakilan Jawa Barat memberikan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atau *unqualified opinion* adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan menerapkan system pengendalian intern yang memadai.

Dengan pemberian opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cirebon, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.



4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2019.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Cirebon yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 15 sasaran dengan 73 indikator sasaran yang terbagi atas 9 indikator untuk Misi 1, 25 indikator untuk Misi 2, 17 indikator untuk Misi 3, 3 indikator untuk Misi 4, 10 indikator untuk misi 5, 9 indikator untuk misi 6.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 37 indikator sasaran atau 57,07% Baik Sekali, 22 indikator sasaran atau 24,79 % Baik, 4 indikator sasaran atau 5,49% Cukup, 5 indikator sasaran atau 9,48% kurang dan 5 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **122,59%** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 **Baik Sekali**.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

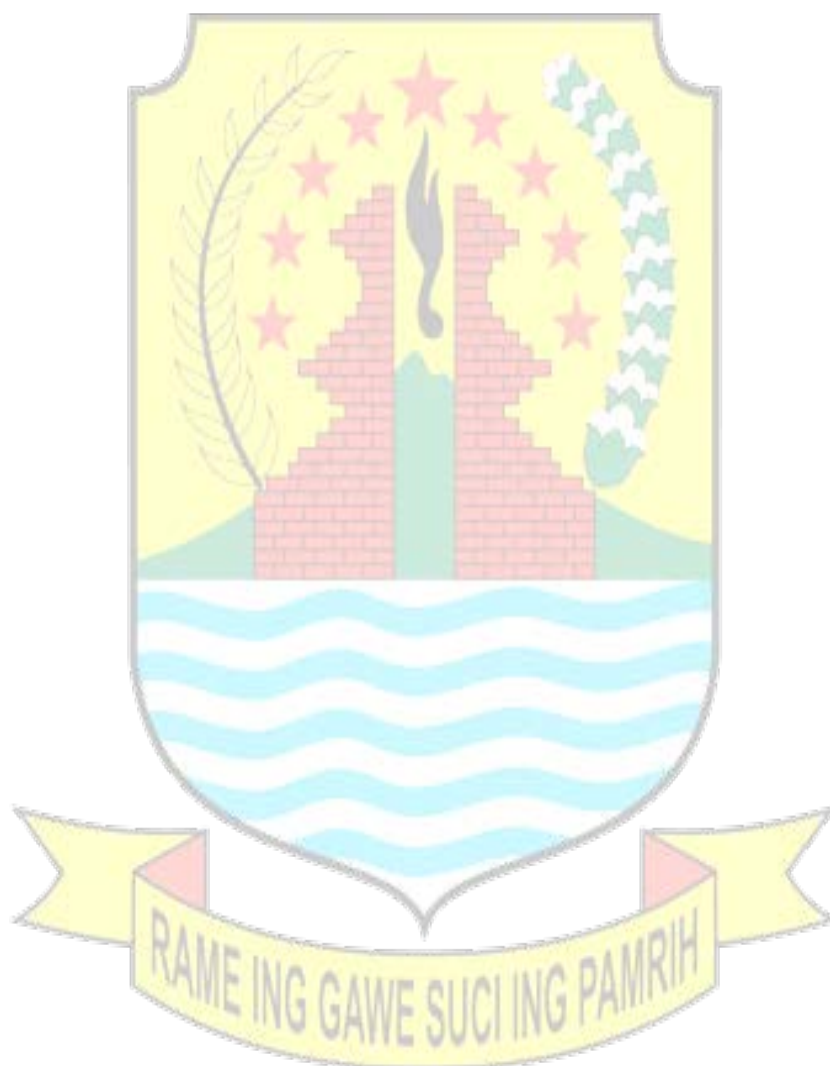
Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

B. Rencana Tindak Lanjut

Mencermati hasil pencapaian kinerja Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengupayakan prioritas alokasi anggaran berbasis prioritas program dan kegiatan dengan semangat efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang belum memenuhi target dan meningkatkan pencapaian hasil yang sudah memenuhi target.
2. Mengupayakan sistem perencanaan dan pengendalian yang lebih transparan dan akuntabel pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun dan merumuskan target dan indikator kinerja program dan kegiatan.
5. Mendorong masyarakat/komunitas, dunia akademik, dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menekan angka putus sekolah melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar.
7. Perluasan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



BELANJA BERDASARKAN URUSAN TAHUN 2018

KODE	SKPD	TARGET	TOTAL REALISASI	%	TARGET BTL	REALISASI BTL	%	TARGET BL	REALISASI BL	%	
1.		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR									
1.	01. 01	DINAS PENDIDIKAN	1.291.136.503.704,00	1.251.877.551.598,00	96,95	1.002.955.794.000,00	969.892.272.561,00	96,70	288.180.709.704,00	281.985.279.037,00	97,85
1.	02. 01	DINAS KESEHATAN	439.893.404.212,00	383.034.330.073,00	87,07	133.280.309.000,00	130.099.935.244,00	97,61	306.613.095.212,00	252.934.394.829,00	82,49
1.	02. 02	RSUD WALED	182.150.072.472,00	158.480.713.832,00	87,01	25.033.613.000,00	24.185.032.404,00	96,61	157.116.459.472,00	134.295.681.428,00	85,48
1.	02. 03	RSUD ARJAWINANGUN	148.451.496.159,00	137.048.770.180,38	92,32	28.515.468.000,00	27.992.607.776,00	98,17	119.936.028.159,00	109.056.162.404,38	90,93
1.	03. 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	378.768.958.409,00	309.554.045.794,00	81,73	24.058.483.750,00	23.200.003.933,00	96,43	354.710.474.659,00	286.354.041.861,00	80,73
1.	04. 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	109.599.097.556,00	94.480.039.900,00	86,21	6.698.601.000,00	6.421.046.175,00	95,86	102.900.496.556,00	88.058.993.725,00	85,58
1.	05. 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.880.682.090,00	18.191.736.804,00	96,35	7.147.154.000,00	7.073.275.969,00	98,97	11.733.528.090,00	11.118.460.835,00	94,76
1.	05. 02	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	17.526.048.650,00	16.756.730.945,00	95,61	6.744.472.000,00	6.616.198.481,00	98,10	10.781.576.650,00	10.140.532.464,00	94,05
1.	06. 01	DINAS SOSIAL	23.160.783.900,00	21.793.182.846,00	94,10	4.490.517.000,00	4.399.278.614,00	97,97	18.670.266.900,00	17.393.904.232,00	93,16
		TOTAL	2.609.567.047.152,00	2.391.217.101.972,38	91,63	1.238.924.411.750,00	1.199.879.651.157,00	96,85	1.307.642.635.402,00	1.191.337.450.815,38	86,82
2.		URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR									
2.	01 01	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	14.484.592.958,00	14.073.228.175,00	97,16	5.585.213.000,00	5.451.936.742,00	97,61	8.899.379.958,00	8.621.291.433,00	96,88
2.	03. 01	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.060.981.100,00	7.791.484.714,00	96,66	3.149.222.000,00	3.097.674.808,00	98,36	4.911.759.100,00	4.693.809.906,00	95,96
2.	05. 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	43.037.644.200,00	37.290.701.586,00	86,65	4.923.826.000,00	4.786.846.280,00	97,22	38.113.818.200,00	32.503.855.306,00	85,28
2.	06. 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.120.878.834,00	14.503.596.073,00	84,71	6.741.626.000,00	6.591.438.307,00	97,77	10.379.252.834,00	7.912.157.766,00	76,23
2.	07. 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.611.932.290,00	10.903.160.709,00	93,90	3.404.160.000,00	3.307.124.225,00	97,15	8.207.772.290,00	7.596.036.484,00	92,55
2.	08. 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	26.376.853.880,00	25.339.930.712,00	96,07	9.112.272.000,00	8.957.551.247,00	98,30	17.264.581.880,00	16.382.379.465,00	94,89
2.	09. 01	DINAS PERHUBUNGAN	60.773.347.800,00	57.847.425.820,00	95,19	7.189.158.500,00	7.007.750.415,00	97,48	53.584.189.300,00	50.839.675.405,00	94,88
2.	10. 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.560.979.000,00	12.131.710.351,00	96,58	3.292.738.000,00	3.266.743.487,00	99,21	9.268.241.000,00	8.864.966.864,00	95,65

2.	11.	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.965.834.800,00	5.472.351.574,00	91,73	2.489.703.000,00	2.439.279.123,00	97,97	3.476.131.800,00	3.033.072.451,00	87,25
2.	12.	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.815.797.600,00	8.325.531.625,00	94,44	4.664.007.500,00	4.564.497.994,00	97,87	4.151.790.100,00	3.761.033.631,00	90,59
2.	16.	01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24.247.910.066,00	23.431.069.032,00	96,63	4.664.517.000,00	4.553.658.818,00	97,62	19.583.393.066,00	18.877.410.214,00	96,39
2.	18.	01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	8.630.211.816,00	7.599.170.373,00	88,05	4.810.901.000,00	4.775.699.324,00	99,27	3.819.310.816,00	2.823.471.049,00	73,93
TOTAL				241.686.964.344,00	224.709.360.744,00	92,98	60.027.344.000,00	58.800.200.770,00	97,96	181.659.620.344,00	165.909.159.974,00	91,33
3.			URUSAN PILIHAN									
3.	01.	01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.231.807.200,00	12.834.481.335,00	90,18	3.646.020.000,00	3.562.636.957,00	97,71	10.585.787.200,00	9.271.844.378,00	87,59
3.	03.	01	DINAS PERTANIAN	56.627.981.721,00	51.903.367.938,00	91,66	24.331.157.750,00	23.166.159.087,00	95,21	32.296.823.971,00	28.737.208.851,00	88,98
3.	06.	01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	40.303.500.459,00	36.960.174.388,00	91,70	8.848.923.200,00	8.596.120.512,00	97,14	31.454.577.259,00	28.364.053.876,00	90,17
TOTAL				111.163.289.380,00	101.698.023.661,00	91,49	36.826.100.950,00	35.324.916.556,00	95,92	74.337.188.430,00	66.373.107.105,00	89,29
4.			URUSAN FUNGSI PENUNJANG									
4.	01.	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	16.083.607.200,00	14.472.340.973,00	89,98	5.609.255.000,00	5.512.713.056,00	98,28	10.474.352.200,00	8.959.627.917,00	85,54
4.	02.	00	PPKD	671.360.194.719,51	630.004.283.905,00	93,84	671.360.194.719,51	630.004.283.905,00	93,84	-	-	-
4.	02.	01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20.088.708.848,00	18.729.344.100,00	93,23	5.891.332.000,00	5.758.802.596,00	97,75	14.197.376.848,00	12.970.541.504,00	91,36
4.	02.	02	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	27.395.308.950,00	25.386.285.489,00	92,67	16.003.155.000,00	15.197.503.259,00	94,97	11.392.153.950,00	10.188.782.230,00	89,44
4.	03.	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	19.181.533.319,00	16.224.182.594,00	84,58	6.444.551.000,00	6.254.834.893,00	97,06	12.736.982.319,00	9.969.347.701,00	78,27
4.	05.	01	INSPEKTORAT	20.350.322.700,00	16.918.799.659,00	83,14	9.683.869.000,00	9.473.263.287,00	97,83	10.666.453.700,00	7.445.536372,00	69,80
4.	06.	00	DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	06.	01	SEKRETARIAT DPRD	72.524.305.321,00	65.832.552.778,00	90,77	32.681.494.100,00	31.896.874.978,00	97,60	39.842.811.221,00	33.935.677.800,00	85,17
4.	07.	00	KDH/WAKIL KDH	924.216.000,00	831.041.202,00	89,92	924.216.000,00	831.041.202,00	89,92	-	-	-
4.	07.	01	SEKRETARIAT DAERAH	72.337.840.431,00	59.777.767.713,00	82,64	19.034.714.000,00	15.881.161.125,00	83,43	53.303.126.431,00	43.896.606.588,00	82,35

**RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018**

SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TARGET			
									TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
Meningkatnya Indeks Pendidikan						Angka Melek Huruf			-	-	-	95
						Angka Rata-Rata Lama Sekolah			-	-	-	7,90
						Angka Harapan Sekolah			-	-	-	11,93
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Melaksanakan Workshop Instruktur LKP Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	√	-	-	-	Sertifikat Peserta Bintek LKP sejumlah 60 lembar	Program Pendidikan Non Formal	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	62.460.000,00	-	-	-
2	Melaksanakan Lomba/Apresiasi PTK-PAUDNI dan Ekspo Kursus Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	√	-	√	-	Peserta Lomba Keteladanan dan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Provinsi dan Ekspo Kursus Tingkat Provinsi	Program Pendidikan Non Formal	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	50.200.000,00	-	66.680.000,00	-
3	Menurunkan Angka Melek Huruf	√	√	√	√	Warga belajar pendidikan keaksaraan dan warga belajar KUM	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	645.213.000,00	912.042.000,00	815.150.000,00	605.275.000,00
4	Melaksanakan Workshop Kurikulum Bagi Tutor Pendidikan Keaksaraan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	√	-	-	Sertifikat Peserta Bintek Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran KF sejumlah 70 lembar	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	-	69.325.000,00	-	-
5	Mutu Pendidikan Meningkat	-	-	√	√	Laporan Hasil Verifikasi	Program Pendidikan Non Formal	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	15.850.000,00	14.150.000,00
Meningkatnya Pemerataan dan Kesempatan Pendidikan						APK			-	-	-	APK PAUD : 3780
									-	-	-	APK SD/MI : 109
									-	-	-	APK SMP/MTs : 110
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Bukti Fisik Adanya Ruang Kelas Baru Sekolah	-	√	√	-	Ruang Kelas Baru	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	-	6.316.250,00	607.377.000,00	-
2	Bukti Fisik Adanya APE Dalam dan APE Luar	-	-	√	-	APE Dalam dan APE Luar	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	-	-	127.500.000,00	-

3	Bukti Fisik Adanya Halaman Sekolah yang Terpasang Vaving Blok dan Pagar Lingkungan Sekolah yang Nyaman.	-	√	√	-	Halaman sekolah yang terpasang vaving blok, Pagar lingkungan sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	-	4.377.000,00	239.300.000,00	-
4	Bukti Fisik Buku Referensi, Pengayaan, Panduan Pendidikan, dan Raport Siswa.	-	-	-	√	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport Siswa	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	-	-	-	392.515.000,00
5	Bukti Fisik Alat Pendukung Kebersihan dan Keindahan Sekolah	-	-	√	-	Alat Pendukung Kebersihan dan Keindahan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	71.200.000,00	-
6	Lomba Guru TK dan Kepala TK Tingkat Kab. Cirebon	-	√	-	-	Lomba Guru Teladan Tingkat Kecamatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	-	38.350.300,00	-	-
7	Lomba - lomba PAUD Tingkat Kab. Cirebon	-	-	-	√	Terpilihnya Juara I, II, dan III Lomba-lomba PAUD Tingkat Kab. Cirebon	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan pendidikan anak usia dini	-	-	-	100.000.000,00
8	Terlaksananya Pembelajaran Anak Usia Dini	√	√	√	√	Terlaksananya Pembelajaran PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.500.000,00	326.105.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9	Meningkatnya Mutu dan Kualitas PAUD Untuk Mengikuti Pendidikan Selanjutnya	-	√	-	-	Tetap Berjalannya Proses kegiatan Pembelajaran Bermain di PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	-	616.200.000,00	-	-
10	Tercapainya rasio kebutuhan ruang kelas/rombel	√	√	√	√	Ruang Kelas Baru	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	699.861.750,00	854.884.220	2.680.958.830	952.625.800,00
11	1. Merancang Juknis BOS Kabupaten; 2. Mensosialisasikan juknis BOS Kabupaten; 3. Melaksanakan Bimbingan Teknis BOS; 4. Penyusunan DPA Turunan; 5. Pendistribusian Dana BOS ke Sekolah Penerima BOS Kabupaten	√	√	√	√	1. Materi Sosialisasi dan Bimtek 2. Laporan hasil sosialisasi dan bimtek	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren	1.051.231.550	2.940.647.200	11.574.000	34.045.250

12	Mendistribusikan Dana Operasional SMP Satap	-	√	-	√	Bantuan biaya operasional SMP Satu Atap	1.01.1.01.01.16. - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	1.01.1.01.01.16.66. - Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	75.000.000			75.000.000
Meningkatnya Pemerataan dan Kesempatan Pendidikan						Melek Huruf Al-Qur'an			-	-	-	SD (%) : 54.8
									-	-	-	SMP (%) : 61.9
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Test Baca Al Quran (IQRA 6/juz Amma)	-	√	-	-	Penerapan pembelajaran mengenal dan menguasai baca Al - Qur'an	1.01.1.01.01.23. - Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	1.01.1.01.01.23.01. - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	-	492.643.250	-	-
Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Lulusan (AL)			-	-	-	SD (%) : 99.95
									-	-	-	Paket A (%) : 85
									-	-	-	SMP (%) : 99.94
									-	-	-	Paket B (%) : 85
									-	-	-	Paket C (%) : 85
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Melakukan Survey Sekolah yang akan di bangun ruang laboeratorium	-	√	√	√	Tersedianya Ruang Laboratorium	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	-	120.482.700	115.000.000	102.780.000
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Gedung Olahraga	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	73.645.625	88.374.750	88.374.750	44.187.375
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Ruang Perpustakaan Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan perpustakaan sekolah	120.866.250	145.039.500	145.039.500	72.519.750,00
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Alat Praktik dan Peraga Siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	44.778.688	53.734.425	53.734.425	26.867.212
5	1. Rapat Penyusunan Draf Buku Raport; 2. Melakukan Survey Pasar; 3. Pengajuan Proses Lelang ke ULP; 4. Pendistribusian Buku Rapot	√	√	√	√	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport Siswa	1.01.1.01.01.16. - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	1.01.1.01.01.16.15. - Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	12.635.300	27.339.300	4.794.734.000	3.500.492.000

6	1. Melakukan Survey Pasar ; 2. Pengajuan proses Lelang ke ULP; 3. Pendistribusian Alat Perlengkapan Sekolah	-	√	-	-	Alat pendukung kebersihan dan keindahan sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan perlengkapan sekolah	-	106.000.000	-	-
7	Seleksi Lewat Lomba dan Pertandingan	√	√	√	√	Pelaksanaan lomba: OSN, FLSN, O2SN, Calistung, Pasangiri Bahasa dan Sastra Sunda/Cirebon	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	341.546.000	391.145.000	27.000.000	88.000.000
8	Monitoring dan Pembinaan	√	√	√	√	Pelaksanaan US/UN SD/MI dan SMP/MTs	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	83.610.000	62.694.000	173.285.000	(43.665.000,00)
9	Pemerataan Akses Pendidikan Yang Putus Sekolah SMA	√	√	√	√	Kelompok Belajar Paket C Setara SMA	Program Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	220.200.000,00	290.112.000,00	431.400.000,00	540.000,00
10	Melaksanakan Workshop Tutor Paket C setara SMA untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	√	-	-	Sertifikat Peserta Bintek Paket C sejumlah 60 peserta	Program Pendidikan Menengah	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket C	-	62.652.000,00	-	-

Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Putus Sekolah (APS)	-	-	-	SD : 2.26
							-	-	-	SMP : 02

NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	1. Pelaksanaan Lomba Motivasi Belajar Mandiri; 2. Workshop SMP Terbuka	-	-	√	-	1. Pengadaan Seragam Batik untuk siswa terbuka kelas 7, 2. Juara Lomojar, 3. Materi Workshop	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan SMP Terbuka			65.120.000	
2	Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Yang Putus Sekolah SMP dan Tidak Melanjutkan Ke SMA	√	√	√	√	Kelompok Belajar Paket B Setara SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	272.458.450,00	247.945.000,00	223.200.000,00	214.200.000,00

Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Melanjutkan	-	-	-	SD ke SMP Sederajat : 90,01
--	--	--	--	--	--	-------------------	---	---	---	-----------------------------

NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV

1	1. Mendata Siswa Kelas 6 SD Lulusan tahun sebelumnya yang belum melanjutkan; 2. Pendistribusian Bea Siswa Kepada Penerima	-	-	√	-	Pemberian Beasiswa dari keluarga tidak mampu	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyediaan Beasiswa Transisi			458.060.000	
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TARGET			
Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik						Guru Layak Mengajar			TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
									-	-	-	PAUD (%) : 61.8
									-	-	-	SD (%) : 82.5
									-	-	-	SMP (%) : 96.5
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Sosialisasi Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	-	√	-	-	Sertifikat Peserta BinteK Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD sejumlah 100 lembar	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	-	96.337.000,00	-	-
2	1. Melakukan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi; 2. Pelaksanaan Kegiatan MGMP SMP	√	√	√	-	Pelaksanaan lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas berprestasi jenjang SD dan SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	130.132.000	73.078.000	27.750.000	24.000.000
3	Guru Mendapat Sertifikat Pelatihan Kurikulum Sebanyak 2700 Orang	-	-	√	-	Guru SD dan calon pendamping mendapatkan sertifikat pelatihan kurikulum	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	-	-	661.195.000	-
4	Melaksanakan Workshop Tutor Paket B setara SMP untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	√	-	-	-	Sertifikat Peserta BinteK Paket B sejumlah 60 lembar	1.01.1.01.01.16. - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	62.277.000,00	-	-	-
5	Guru memahami proses, maksud dan tujuan adanya Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	√	√	√	√	Peserta sosialisasi sertifikasi pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	31.952.900,00	286.653.900,00	31.952.900,00	(167.046.904,00)
6	Pelaksanaan BIMTEK Aplikasi DAPODIK Bagi Operator Sebanyak 567 Orang	√	√	-	-	Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi Dapodik	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	57.400.000,00	118.600.000,00	-	-

Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Ruang Kelas Baik	-	-	-	95		
							-	-	-	7,90		
							-	-	-	11,93		
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Melaksanakan Workshop Instruktur LKP Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	√	√	-	Ruang kelas / penunjang pembelajaran dalam kondisi baik	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	14.634.750,00	199.620.000,00	-
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Ruang Guru	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penambahan ruang guru sekolah	216.595.625,00	217.214.750,00	217.214.750,00	215.357.375,00
3	Tertatanya lingkungan Sekolah	√	√	√	√	Halaman sekolah yang terpasang vaving blok, Pagar lingkungan sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	1.360.656.225	1.470.303.770	1.470.303.770	2.441.361.135
4	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Jamban	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	44.920.625	53.904.750	53.904.750	26.952.375
5	Terpenuhinya ruang kelas / penunjang pembelajaran yang layak	√	√	√	√	Ruang kelas / penunjang pembelajaran dalam kondisi baik	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	348.097.500	4.854.893.100	7.778.573.000	1.474.528.500
SASARAN SRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TARGET			
									TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Rasio Siswa/Kelas (S/K)			-	-	-	SD : 30.66
									-	-	-	SMP : 31.66
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Meubelair Ruang Kelas	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan Mebeleur Sekolah	287.713.625	345.256.350	345.256.350	172.628.175
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Terakreditasi			-	-	-	SD (%) : 99.95
									-	-	-	SMP (%) : 98
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Penilaian Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah Dasar	-	-	√	√	Pelaksanaan Sosialisasi dan penilaian kinerja Kepala Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	-	-	113.470.000,00	214.425.000,00
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Rasio Guru / Siswa			-	-	-	SD (%) : 22
									-	-	-	SMP (%) : 16
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV

2	Proses pembelajaran di sekolah lancar	√	√	√	√	Pembayaran honor guru kontrak	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	34.608.000	514.208.000	514.208.000	514.208.000
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan						Indeks Kepuasan Masyarakat			-	-	-	SD 78,5 ; SMP 77,28
									-	-	-	
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Seleksi Gugus 40 UPT Pendidikan Kecamatan	-	-	-	√	Lomba Gugus dan Perpustakaan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	83.000.000,00
2	Pelaksanaan BIMTEK Verval NUPTK Bagi Operator Sebanyak 567 Orang	-	-	√	√	Peserta Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi (Verval) Data NUPTK	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	136.431.900,00	(182.000,00)
3	Pelaksanaan Rakoor Bagi Kepala Sekolah dan Kepala UPT Sebanyak 366 Orang	√	-	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pendidikan Tahun 2018	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	130.000.000,00	-	-	-
4	Pelaksanaan BIMTEK Pengolahan Data Bagi Operator Sebanyak 355 Orang	√	√	√	√	1. Dokumen Pendataan Profil Pendidikan; 2. Dokumen Laporan Penyelenggaraan PPDB Online	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	7.985.295,00	338.123.800,00	153.470.590,00	98.585.295,00
5	Pelaksanaan Monev	-	-	-	√	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	78.625.000,00
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan						Indeks Kepuasan Masyarakat			-	-	-	SD 78,5 ; SMP 77,28
									-	-	-	
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Pelaksanaan BIMTEK Penyusunan IKM Bagi Operator Sebanyak 375 Orang	-	-	-	√	Peserta Bimbingan Teknis dan Exspose Penyusunan Dokumen IKM Bidang Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	-	-	-	84.000.000,00
Penanggulangan Penyakit potensial KLB						Penanggulangan KLB penyakit 1x24 jam						100%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan respon KLB	√	√	√	√	Tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan dan faktor risiko penyakit menular di wilayah Kab. Cirebon	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	82.186.450	97.989.450	99.634.950	44.576.950

Pengendalian penyakit menular						Bertambahnya fasilitas dan layanan HIV/AIDS				10 PKM		
						Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk				160		
						Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%				83		
						Layanan komprehensif berkesinambungan				5 PKM		
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan pengendalian penyakit menular	√	√	√	√	1. bertambahnya fasilitas dan layanan HIV-AIDS 2. penasun ikut PTRM 3. Pengobatan IMS 4. Konseling test 5. ODHA dapat ART 6. ODHA bumil dapat ART 7. ODHA screening TB 8. Layanan Komprehensif	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan HIV/AIDS	160.592.000	238.475.000	290.578.000	386.760.000
						1. Fogging Focus 2. Larvasida 3. Reagent IgG/IgM Caccette		Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk	307.983.000	375.517.000	379.760.000	191.680.000
						CNR, angka kesembuhan TB, angka penemuan kasus TB, tatalaksana pneumonia, tatalaksana diare, penemuan kasus kusta, cacat 2 kusta, DBD yang ditangani		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	108.861.500	180.326.000	214.601.000	105.099.000
Pengendalian penyakit tidak menular						Penurunan jumlah kasus baru penyakit tidak menular						> 25%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular	√	√	√	√	Tersedianya data / informasi hasil ukur faktor resiko PTM di posbindu PTM	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Surveilans Faktor Resiko PTM (Penyakit Tidak Menular)	25.076.500	39.419.000	29.921.000	10.000.000
Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani						Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus						0,12%
						Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk						0,85%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan upaya perbaikan gizi balita	√	√	√	√	Presentase Balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan	Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Gizi buruk	362.221.800	382.075.000	385.608.000	340.000.000
		√	√	√	√	Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif		Penguatan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten	1.093.900	55.125.000	37.875.000	2.950.000
Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi						Menurunnya Rasio kematian ibu						85,38
						Meningkatnya presentase kunjungan ibu hamil (K4)						96%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan deteksi resiko tinggi pada bumil dan penanganan komplikasi bumil, bulin dan bufas	√	√	√	√	bumil resti dan komplikasi dapat ditangani, 424 bidan dapat mendeteksi sesuai SOP, PKM PONED mampu memberikan pelayanan sesuai SOP, 10 PKM fokus PKRT	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanggulangan Komplikasi Kebidanan dan bayi	119.700.000	133.970.000	139.337.800	39.342.200

		√	√	√	√	1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal 2. penguatan rujukan dan peningkatan kebijakan		Peningkatan Kesehatan Ibu hamil, Bersalin dan Nifas	117.333.500	147.900.000	169.684.000	73.660.000
		√	√	√	√	1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal 2. penguatan rujukan dan peningkatan kebijakan		Pembangunan Sistem Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir	38.480.000	42.754.000	40.511.000	20.375.000
Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit						Rasio Kematian Bayi						3,96
						Persentase neo komplikasi yang ditangani						81%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan penanganan neonatus komplikasi, bayi dan balita sakit	√	√	√	√	Peningkatan kapasitas Nakes dalam penanganan komplikasi neo, MTBS dan SDIDTK 1. Pelayanan bayi muda dengan MTBM 2. Peningkatan kunjungan bayi dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita	125.267.500	124.365.000	154.125.000	75.602.500
		√	√	√	√			Peningkatan Pelayanan kesehatan Bayi dan Balita	96.626.300			
									36.019.500	43.770.500	43.820.000	21.640.000
									39.995.500			
Meningkatnya PHBS di 5 tatanan						Persentase Rumah Tangga ber PHBS						66,90%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Melakukan pemetaan, pengkajian dan pembinaan PHBS di 5	√	√	√	√	Meningkatnya tatanan yang melaksanakan PHBS di RT, tempat kerja, TTU, sekolah, institusi	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	27.839.700	231.950.000	189.051.000	205.339.000
									9.090.000			
									9.090.000			
Pengembangan desa siaga						Presentase strata desa siaga aktif madya						60%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan pembinaan forum desa siaga	√	√	√	√	Meningkatkan strata desa siaga aktif madya	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif	87.660.300	283.804.000	61.596.000	38.950.000
									9.090.000			
									9.090.000			
Meningkatnya strata posyandu						Presentase strata posyandu purnama						57,30%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan pembinaan posyandu	√	√	√	√	Peningkatan strata posyandu, peningkatan pemberdayaan masyarakat	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Strata Posyandu	63.101.000	127.500.000	235.110.000	52.510.000
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan						Presentase rawat jalan						15%
						Presentase rawat inap						1,5%
						Presentase pelayanan kesehatan khusus						85%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	√	√	√	√	Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan rawat jalan/inap dan unit gawat darurat puskesmas dengan optimal Pos kesehatan : lebaran, natal tahun baru, penanggulangan bencana dan pelayanan P3K	Upaya Kesehatan masyarakat	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	20.630.000	22.200.000	23.020.000	13.620.000
		√	√	√	√			Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan	217.185.000	272.410.000	242.620.000	123.837.500

		√	√	√	√	Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan		Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan	5.710.178.850	5.710.178.850	5.710.178.850	5.710.179.006
		√	√	√	√	Meningkatnya cakupan penderita katarak yang dapat di lakukan operasi		Pelayanan Operasi Katarak	188.230.000	201.622.500	101.886.250	100.761.250
		√	√	√	√	Meningkatnya pengetahuan pengelola pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan indera dan kesehatan gigi dan mulut (GIMUL), serta meningkatnya cakupan penemuan kasus gangguan indera		Pelayanan Kesehatan Pengembangan Khusus	24.500.000	37.850.000	25.600.000	15.325.000
		√	√	√	√	Surat izin praktik perorangan dan surat rekomendasi izin sarana kesehatan		Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	15.500.000	19.000.000	19.165.000	8.830.000
		√	√	√	√	Jumlah jamaah haji yang terpantau kondisi kesehatannya melalui pembinaan di puskesmas dan rumah sakit		Peningkatan Kesehatan Jamaah Calon Haji	34.497.500	37.020.900	42.440.000	24.000.000
		√	√	√	√	Seluruh sekolah (SD, SMP, SMA) melaksanakan penjangkaran dan pelayanan kesehatan anak sekolah		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	121.329.000	146.450.000	156.560.000	68.855.600
		√	√	√	√	Terbinanya sarana kesehatan swasta yang berizin		Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta	7.450.000	9.250.000	8.700.000	5.000.000
		√	√	√	√	Masyarakat miskin terjamin BPJS (Penerima bantuan luran (PBI)) daerah dan SKTM	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat	5.738.821.250	6.887.946.250	10.028.620.250	310.522.250
		√	√	√	√	Terjalinnya kemitraan antara pelayanan kesehatan dasar dengan rumah sakit kabupaten cirebon		Kemitraan antara Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dan RS dalam rangka Penguatan Sistem Rujukan	88.470.000	93.730.750	102.457.750	92.878.500
		√	√	√	√	Diterapkan dan dilaksanakannya SIRS dan SIMRS oleh rumah sakit		Kemitraan sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit (SIMRS)	24.115.000	25.839.500	25.839.500	20.666.000
		√	√	√	√	Terjalinnya kemitraan antara Dinas Kesehatan dengan masyarakat dan organisasi profesi		Kemitraan dengan masyarakat umum dan Organisasi profesi	21.905.000	5.728.000	2.605.000	5.246.900
Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat							Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan					70%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN	√	√	√	√	Terlayannya kebutuhan pelayanan kesehatan tingkat pertama peserta JKN pada FKTP puskesmas	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN	50.450.000	25.000.000	132.250.000	22.800.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar							Indeks Kepuasan Masyarakat					3,15
							Puskesmas berkinerja baik					10
							Puskesmas yang sudah melakukan self assesment akreditasi					9

NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)				
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan	√	√	√	-	Terlaksananya Survey IKM dan sosialisasi SOTK	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan Standar Kesehatan	32.407.300	116.292.700	4.200.000	-	
		√	√	√	√	Terselenggaranya sosialisasi SPM yang baru, evaluasi SPM, penyusunan buku profil, pengelolaan laporan SP3		Evaluasi dan Pengembangan Standar pelayanan Kesehatan	52.241.200	22.493.200	26.202.400	31.223.200	
		-	√	√	-	Terlaksananya kegiatan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan		Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar Standar pelayanan kesehatan	-	53.342.500	28.337.500	-	
		√	√	√	√	Penilaian kinerja puskesmas		Penilaian Kinerja Puskesmas	13.833.750	13.133.750	18.433.750	10.433.750	
		√	√	√	√	Jumlah puskesmas yang terakreditasi		Akreditasi Puskesmas	64.043.750	64.463.750	64.463.750	63.203.750	
Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan untuk kelancaran arus lalu lintas dan mempermudah akses perekonomian						Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap					83%		
						Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa dalam kondisi mantap					79%		
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)				
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV	
1	Pembangunan, Pening Jaringan Jalan	√	√	√	√	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			14.823.117.422	17.898.156.349	17.929.883.049	9.023.643.639	
						Desain Teknis Perencanaan Sebagai Bahan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan		Perencanaan Pembangunan	12.434.400	182.520.200	176.295.600	95.724.772	
						Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan dan Pembangunan Jalan Baru		Pembangunan Jalan	11.655.006.022	13.946.176.049	13.982.427.549	7.064.065.967	
						Jumlah Jembatan Kabupaten yang ditingkatkan dan Pembangunan Jembatan		Pembangunan Jembatan	3.132.887.500	3.744.102.000	3.734.841.500	1.850.418.900	
						laporan Evaluasi program pembangunan jalan dan jembatan		Monitoring, Evaluasi dan Pel	22.789.500	25.358.100	36.318.400	13.434.000	
							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			3.957.849.626	4.787.568.926	4.916.279.826	1.645.161.426
						Tersedianya dokumen teknis perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan		Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	2.689.900	106.297.000	308.904.400	2.208.600	
						Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara Rutin dan Periodik		Rehabilitasi/Pemeliharaan Ja	3.671.225.926	4.339.944.326	4.270.319.826	1.495.934.826	
						Jumlah Jembatan Kabupaten yang terpelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Je	263.883.800	315.726.200	309.637.000	136.853.000	
				Laporan Evaluasi Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan		Monitoring, Evaluasi dan Pel	20.050.000	25.601.400	27.418.600	10.165.000			
					Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan			9.544.188.797	11.442.250.329	11.420.910.529	5.520.137.239		

					Panjang Jalan Desa yang ditingkatkan, Jumlah Jembatan Desa yang ditingkatkan dan jumlah jembatan desa yang dibangun		Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	8.375.362.397	10.066.897.229	10.039.232.829	4.990.494.531
					Panjang jalan Desa yang terpelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaaan	1.143.360.600	1.344.870.400	1.352.935.500	508.833.500
					laporan Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Monitoring, Evaluasi dan Pel	25.465.800	30.482.700	28.742.200	20.809.208
						Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		6.897.965.488	8.358.354.025	8.291.430.725	4.128.572.513
					Desain teknis perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.437.300	56.100.200	-	-
					Jumlah Bangunan Pelengkap jalan yang dibangun		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	6.895.528.188	8.302.253.825	8.274.538.225	4.120.742.513
					laporan Evaluasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongrainase		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			16.892.500	7.830.000
						Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan		29.884.000	173.219.100	169.474.000	209.502.780
					Tersedianya data kondisi jalan		Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	26.082.000	28.199.900	24.720.000	208.777.980
					Tersedianya data kondisi jembatan		Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan	3.802.000	145.019.200	144.754.000	724.800
						Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		23.663.000	31.141.500	35.761.500	12.931.500
					Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang milik Jalan yang dipergunakan masyarakat		Pemanfaatan Jalan	23.663.000	31.141.500	35.761.500	12.931.500
						Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		95.189.200	429.189.000	1.184.311.700	390.581.836
					Jumlah patok Km/Hm yang terpasang dan Pembebasan Lahan		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Cirebon	95.189.200	429.189.000	1.184.311.700	390.581.836

Menjaga kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air					Intensitas Tanam					225%
					Prosentase berkurangnya luas daerah genangan akibat banjir					20%

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	√	√	√	√		Program Pengembangan dan Pengelolaan		9.066.637.608	11.739.144.268	12.321.289.733	5.129.373.991

	Infrastruktur Sumber Daya Air				Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					
					Tersedianya dokumen perencanaan detail reservoir	Perencanaan Pembangunan	71.487.250	150.078.000	139.745.650	65.325.000
					Kondisi prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan	994.291.458	1.210.933.101	1.176.146.800	605.385.291
					- Dokumen RTT (Rencana Tata Tanam), Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi, Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi	Pemberdayaan Petani Pemasok	50.218.600	59.977.800	57.383.000	19.400.000
					- Dokumen Sosialisasi Rencana Tata Tanam (Peraturan Bupati)					
					Tersedianya data monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana pengelolaan sumber daya air	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	23.062.650	29.729.000	25.262.650	16.375.000
					Operasi Sarana Prasarana Sumber Air, Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Sumber Air, Pemeliharaan Berkala Sarana Prasarana Sumber Air	Operasi dan Pemeliharaan Sarana	545.937.300	589.743.100	551.884.800	380.292.700
					Perencanaan teknis (detail engineering detail) penanganan lokasi kritis saluran sungai, muara sungai dan pengamanan kawasan pantai	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sungai, Muara Sungai dan Pengamanan Kawasan Pantai	44.572.100	203.441.667	49.262.733	14.166.000
					Kondisi prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	905.423.400	1.033.655.000	929.335.700	755.499.000
					Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saluran sungai	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air	6.431.644.850	8.461.586.600	9.392.268.400	3.272.931.000
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai/Saluran Pembuang	Program Pengendalian Banjir	1.674.473.800	1.634.093.800	1.998.854.600	1.519.306.500
						Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengamanan Pantai	870.558.500	854.638.800	1.033.853.200	673.685.000
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai/Saluran Pembuang	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengamanan Pantai	803.915.300	779.455.000	965.001.400	845.621.500
					Program Pengembangan Data/Informasi		31.411.900	79.229.700	80.671.200	31.987.200
						Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	31.411.900	79.229.700	80.671.200	31.987.200

							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	75.000.000		
								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	75.000.000		
Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang							Terkendalinya Pemanfaatan Ruang					100%		
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)					
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV		
1	Pembuatan Draft atau Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah	√	√	√	√	Penyusunan Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Penyusunan Dokumen Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Penetapan Kebijakan Tentang RDTR, RTRK, dan RTBL	36.365.000	1.008.718.700	28.800.000	3.000.000		
								Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	2.713.400	313.600.150	-	-		
									33.651.600	695.118.550	28.800.000	3.000.000		
		Program Pemanfaatan Ruang		27.112.000	64.702.000			19.042.000	11.952.000					
					Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	13.610.000	14.400.000	12.300.000	10.350.000			
						Pemahaman yang Meningkatkan Terhadap Pemanfaatan Lahan		Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	13.502.000	50.302.000	6.742.000	1.602.000		
								Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		19.787.525	75.907.525	22.717.525	18.877.525	
								Pemasangan Billboard Mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	3.040.000	59.160.000	5.795.000	1.605.000
					Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Pengawasan Pemanfaatan Ruang	16.747.525	16.747.525	16.922.525	17.272.525			
SASARAN STRATEGIS							INDIKATOR KINERJA				TARGET			
											TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
Meningkatnya Peralatan Pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum							Tersedianya Peralatan Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap pakai					100%		
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)					
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV		
1	Penambahan Peralatan Baru dan Pemeliharaan Peralatan	√	√	√	√	Bertambahnya jumlah alat-alat berat Bertambahnya jumlah peralatan bengkel alat-alat berat		Pengadaan Alat-alat Berat	1.368.167.267	2.518.245.367	405.654.767	154.262.267		
									Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	1.110.450.000	2.175.200.000	5.700.000		

					Bertambahnya alat-alat laboratorium kebinamargaan		Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan		90.900.000	82.100.000		
					jumlah alat-alat berat yang dipelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat	202.176.090	195.439.190	156.688.590	140.471.090	
					jumlah peralatan bengkel alat-alat berat yang dipelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Aat-alat Berat		6.873.000			
					jumlah alat-alat laboratorium Kebinamargaan yang dipelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan	41.241.177	38.783.177	161.166.177	13.791.177	
Tertibnya penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan SKPD						Penilaian hasil Evaluasi Lakip					CC	
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Penyelenggaraan Tertib Administrasi	√	√	√	√		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		352.536.800	855.153.600	648.403.800	239.851.000
						Terselesainya Jasa komunikasi, Listrik, air dan PBB	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		78.900.000	83.300.000	78.900.000	78.900.000
						Tersedianya jasa Jaminan Barang milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		-	42.200.000	-	-
						Tersedianya Jaminan perizinan kendaraan operasional dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan		93.950.000	-	3.375.000	-
						Tersediannya Alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		39.529.000	39.249.000	39.588.000	39.213.500
						terpenuhinya cetakan dan penggandaan sebagai penunjang administrasi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		19.352.800	20.528.000	20.543.800	21.723.200
						Tersedianya alat listrik sebagai penunjang adm	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		8.260.000	8.255.000	8.250.000	8.185.000
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	537.249.600	369.250.000	-
						Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.891.000	8.891.000	8.891.000	8.930.300
						Tersedianya bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		53.082.000	43.082.000	43.082.000	43.079.000
						Tersedianya makanan dan minuman penunjang kegiatan dinas	Penyediaan Makanan dan Minuman		30.790.000	28.675.000	33.500.000	35.145.000
						Terpenuhinya koordinasi dengan instansi terkait	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		19.782.000	43.724.000	43.024.000	4.675.000

						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		47.271.000	32.283.000	29.769.000	28.311.500
						Tersedianya Laporan capaian kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.136.000	16.944.000	17.982.000	14.040.000
						Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	13.047.000	15.339.000	11.787.000	14.271.500
						Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.088.000	-	-	-
								24.000.000	-	-	-
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	24.000.000	-	-	-
								467.170.720	543.909.720	2.557.460.720	736.178.720
						Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	2.003.450.000	-
						Kain gording	Pengadaan Perlengkapan Gedung	-	50.000.000	-	-
						Terpeliharanya rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala	-	-	-	363.900.000
						Terlaksananya perbaikan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	207.221.720	240.660.720	139.221.720	139.221.720
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	199.807.000	206.107.000	198.807.000	195.632.000
						Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.750.000	8.750.000	8.500.000	8.500.000
						Pemeliharaan mesin tik, computer, printer, alat komunikasi, pompa air	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	46.392.000	38.392.000	28.682.000	28.925.000
						Mebeleur dapat digunakan dengan baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5.000.000	-	-	-
						Terpeliharanya gedung kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	178.800.000	-
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
						Pakaian dinas PNS	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	98.550.000	203.682.500	-
								-	98.550.000	-	-
						Tersedianya Pakaian untuk pekerja Lapangan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	128.000.000	-
						Tersedianya Pakaian khusus hari tertentu pegawai	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	75.682.500	-
						Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan		-	-	-	8 Pokmas dan 3 bank sampah
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan		-	-	-	50%

No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, penyediaan teknologi dan informasi status lingkungan					<p>Terbentuknya pokmas, lembaga bank sampah dan meningkatna kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah</p> <p>Pelayanan kepada masyarakat, baik pasar,permukiman, dan perusahaan</p> <p>- Persentase pengangkutan sampah</p> <p>- Persentase pengoperasian TPA</p>	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan</p>	<p>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan</p> <p>Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</p> <p>peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan</p> <p>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan</p>	264.460.000	214.210.000	72.000.000	58.200.000
		√	√	√	√	<p>- Bintek pengelolaan lingkungan bagi siswa.</p> <p>- Bintek adiwiyata pembinaan 10 sekolah sebagai prasyarat adiwiyata mandiri</p> <p>- Stimulan dalam bentuk hadiah uang</p> <p>- Pembinaan calon sekolah adiwiyata mandiri</p> <p>- Pembinaan adiwiyata nasional</p> <p>- Pembinaan adiwiyata kabupaten dan provinsi</p> <p>- Pembentukan dan pembekalan lingkungan bagi duta-duta lingkungan sekolah</p> <p>- Pelaksanaan kemah lingkungan</p> <p>- Tersedianya data base informasi lingkungan</p>		48.312.500	48.312.500	48.312.500	48.312.500	
								675.000	132.125.000	15.375.000	1.825.000	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan bagi dunia usaha dan masyarakat					<p>Meningkatnya kualitas lingkungan di kota sumber sebagai kota kecil yang bersih</p> <p>Tersedianya data kualitas udara, air sungai, air laut dan air sumur</p> <p>Meningkatnya kegiatan usaha yg mentaati peraturan di bidang lingkungan hidup</p> <p>Tersedianya data/alat untuk pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan akibat pencemaran</p> <p>Penurunan pencemaran melalui peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>		-	-	-	1 Penghargaan	
								-	-	-	1 dokumen	
								-	-	-	30 Unit Kegiatan Usaha	
								-	-	-	1 Kajian	
								-	-	-	4 Unit Industri	
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
						<p>- Monitoring ke perusahaan</p> <p>- Perusahaan yang menjadi peserta sosialisasi</p> <p>- Penyusunan data base</p>		Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	35.750.000	250.000	44.000.000	0

	Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan bagi dunia usaha dan masyarakat	√	√	√	√	- Penilaian dokumen lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan AMDAL	50.375.000	52.185.000	47.775.000	52.355.000					
						Kajian Daya dukung lahan Industri di Kabupaten Cirebon		Pengkajian Dampak Lingkungan	12.075.000	41.250.000	184.550.000	7.125.000					
						Kajian Perhitungan Beban Pencemar DAS		Koordinasi Pengelolaan Prokasi/Superkasi	4.500.000	88.500.000	4.500.000	4.500.000					
		√	√	√	√	- Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan		Pemantauan Kualitas Lingkungan	43.540.000	65.310.000	65.310.000	55.840.000					
						- Bintek peningkatan kapasitas masyarakat untuk kualitas lingkungan											
						- Kegiatan usaha milik pemerintah maupun swasta yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup							Koordinasi Pengelolaan Prokasi/ Superkasi	4.500.000	88.500.000	4.500.000	4.500.000
						- Laporan hasil pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup							Pemantauan Kualitas Lingkungan	43.540.000	65.310.000	65.310.000	55.840.000
						- Kegiatan usaha milik pemerintah maupun swasta yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup							Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	57.450.000	31.500.000	36.750.000	39.600.000
- Laporan hasil pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup																	
		-	√	√	-	- Penyusunan raperbup		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	5.350.000	44.650.000	-					
		√	√	√	-	Penyusunan Masterplan dan DED area relokasi pengusaha batu alam		Penanganan Limbah Batu Alam	1.085.150.000	406.550.000	8.300.000	-					
Meningkatnya kualitas fungsi sumber daya alam						Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim		-	-	-	1 Kampung Iklim						
						Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam		-	-	-	1 Dokumen						
						Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam di pesisir pantai		-	-	-	2 Kecamatan						
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN			LOKASI/KELOMPOK	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)									

No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi serta pengawasan fungsi sumber daya alam	√	√	√	√	- Bintek Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	19.375.000	19.375.000	19.375.000	19.375.000
						-Terjaganya fungsi kawasan resapan dan sumber-sumber air		Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	41.250.000	52.625.000	29.650.000	5.000.000
Terselesaikannya pengaduan sengketa lingkungan						Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim			-	-	-	1 Kampung Iklim
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan	√	√	√	√	Terlayannya pengaduan kasus lingkungan Laporan hasil kegiatan Pengujian kualitas air dan udara	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan	26.597.500	22.067.500	24.667.500	24.667.500
Meningkatnya ketersediaan RTH						persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten Cirebon			-	-	-	5 buah
						Terciptanya kawasan RTH yang asri						75%
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan	√	√	√	√	terbangunnya sarana dan prasarana penghijauan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penataan RTH	85.000.000	227.930.000	1.555.000.000	20.950.000
						terpeliharanya RTH		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	474.051.300	976.069.500	312.995.000	259.701.000
Meningkatnya ketersediaan tempat pemakaman umum						Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			-	-	-	1 Unit
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan			√		Terbangunnya sarana dan prasarana tempat pemakaman umum secara bertahap	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	-	-	250.000.000	-
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial						Cakupan PMKS yang terehabilitasi						
No.	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang terehabilitasi		√			Keluarga miskin mempunyai ketrampilan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin		99.400.000		
					√	PRSE memiliki Uep KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi				88.880.000

	√			Sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan		198.235.180		
	√			Terpenuhinya Data PMKS Dan PSKS Yang Akurat		Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS		600.000.000		
	√	√		Peserta dan pendamping PKH memahami PKH		Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan		226.453.000	167.531.000	
√	√	√	√	Lancarnya distribusi Raskin		Koordinasi Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin (Raskin)	153041250	18163750	21438750	46063750
			√	Eks Migran memiliki Uep KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial				71.800.000
√				Anak Jalanan Dapat Sekolah Dengan Layak	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak Jalanan	59.725.000			
√	√	√		Orang terlantar diperjalanan dapat melanjutkan perjalanan		Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	2.000.000	4.000.000	4.000.000	
√				Anak nakal yang memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	344.701.500			
√	√	√	√	Berkurangnya keluarga berumah idak layak huni		Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	244.815.000	1.012.500.000	2.349.000.000	675.000.000
			√	Bertambahnya anak terlantar yang memiliki KUBE	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar (yatim Piatu)				46.350.000
	√			Penyandang Cacat Trauma memiliki KUBE	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma		72.737.500		
			√	Penyandang Cacat memiliki Alat bantu		Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang disabilitas				129.437.500
		√		Penyandang Cacat Eks Kronis memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi penyandang disabilitas eks kronis			48.450.000	
√				Terpenuhinya kebutuhan dasar		Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat	127.900.000			
√				Eks korban penyalahgunaan Napza mendapatkan rekomendasi tindak lanjut	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza	58.650.000			

		√				Eks korban Napza memiliki UEP KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA		190.150.000		
			√			Gelandangan dan pengemis memiliki UEP KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis		77.000.000		
2		√	√	√		Bertambahnya lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	105.829.000	101.748.000	101.748.000	
			√			Biaya Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo		208.135.000		
3		√				Bertambahnya karang taruna yang memiliki KUBE	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	251.573.597			
				√		Bertambahnya Orsos yang mendapatkan bantuan		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat			24.750.000	
					√	Bertrambahnya pengetahuan masyarakat tentang kesetiakawanan sosial		Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial				48.749.100
				√		Bertambahnya PSM yang memahami tupoksi		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			23.875.000	
		√				Realisasi rehabilitasi Taman Makam Pahlawan		Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	500.000.000			
	Persentase Pelayanan Rumah Singgah	√	√	√	√	Terlayannya PMKS yang singgah		Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	66.428.500	171.675.700	73.585.500	74.388.500
						Persentase PMKS yang terehabilitasi						6,52%
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial						Persentase Pelayanan Rumah Singgah						100%
AKSI/STRATEGI		JADWAL PELAKSANAAN							PAGU ANGGARAN (Rp)			
No.		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang terehabilitasi		√			Keluarga miskin mempunyai ketrampilan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin		99.400.000		

			√	PRSE memiliki Uep KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi				88.880.000
	√			Sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan		198.235.180		
	√			Terpenuhinya Data PMKS Dan PSKS Yang Akurat		Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS		600.000.000		
	√	√		Peserta dan pendamping PKH memahami PKH		Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan		226.453.000	167.531.000	
√	√	√	√	Lancarnya distribusi Raskin		Koordinasi Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin (Raskin)	153041250	18163750	21438750	46063750
			√	Eks Migran memiliki Uep KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial				71.800.000
√				Anak Jalanan Dapat Sekolah Dengan Layak	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak Jalanan	59.725.000			
√	√	√		Orang terlantar diperjalanan dapat melanjutkan perjalanan		Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	2.000.000	4.000.000	4.000.000	
√				Anak nakal yang memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	344.701.500			
√	√	√	√	Berkurangnya keluarga berumah idak layak huni		Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	244.815.000	1.012.500.000	2.349.000.000	675.000.000
			√	Bertambahnya anak terlantar yang memiliki KUBE	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar (yatim Piatu)				46.350.000
	√			Penyandang Cacat Trauma memiliki KUBE	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma		72.737.500		
			√	Penyandang Cacat memiliki Alat bantu		Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang disabilitas				129.437.500
		√		Penyandang Cacat Eks Kronis memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi penyandang disabilitas eks kronis			48.450.000	
√				Terpenuhinya kebutuhan dasar		Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat	127.900.000			

		√				Eks korban penyalahgunaan Napza mendapatkan rekomendasi tindak lanjut	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza	58.650.000			
		√				Eks korban Napza memiliki UEP KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA		190.150.000		
			√			Gelandangan dan pengemis memiliki UEP KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis		77.000.000		
2	Persentase Pelayanan Rumah Singgah	√	√	√	√	Terlayannya PMKS yang singgah		Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	66.428.500	171.675.700	73.585.500	74.388.500
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial						Cakupan PMKS yang Mendapatkan Jaminan Sosial						100%
No.	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Prosentase lanjut Usia yang terlindungi					Meningkatnya Kemampuan PMKS untuk hidup layak	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
		√	√	√		LU tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial		Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	105.829.000	101.748.000	101.748.000	
Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKA) yang berdaya						Cakupan PMKS yang potensial						100%
No.	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Jumlah PSKS yang mampu menjalankan fungsinya						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					
			√			Biaya Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo		208.135.000		
		√				Bertambahnya karang taruna yang memiliki KUBE		Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	251.573.597			
				√		Bertambahnya Orsos yang mendapatkan bantuan		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat			24.750.000	

				√	Bertrambahnya pengetahuan masyarakat tentang kesetiakawanan sosial		Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial				48.749.100	
			√		Bertambahnya PSM yang memahami tupoksi		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			23.875.000		
	√				Realisasi rehabilitasi Taman Makam Pahlawan		Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	500.000.000				
								TARGET				
SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran			25%	30%	30%	15%	
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Peningkatan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37,500,000	45,000,000	45,000,000	22,500,000
						tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	1,899,999	2,279,999	2,279,999	1,139,999
								Penyediaan alat tulis kantor				
						tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun			6,500,000	7,800,000	7,800,000	3,900,000
						tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran		Penyediaan	6,845,200	8,214,240	8,214,240	4,107,120

						selama 1 (satu) tahun		barang cetakan dan pengadaan				
						tersedianya kebutuhan instalasi listrik untuk penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	750	900	900	450
JADUAL PELAKSANAAN									PAGU ANGGARAN (Rp)			
NO	AKSI/STRATEGI	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
						tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20,125,000	24,150,000	24,150,000	12,075,000
						tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	4,620,000	5,544,000	5,544,000	2,772,000
						tersedianya kebutuhan biaya untuk makan dan minum bagi para tamu kedinasan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan		Penyediaan makanan dan minuman	3,795,000	4,554,000	4,554,000	2,277,000
									TARGET			
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran			25%	30%	30%	15%
		JADUAL PELAKSANAAN							PAGU ANGGARAN (Rp)			
NO	AKSI/STRATEGI	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
2	Peningkatan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	terpeliharanya gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23,100,000	27,720,000	27,720,000	13,860,000

						terpeliharanya kendaraan		Pemeliharaan					
						dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara berkala		rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25,641,000	30,769,200	30,769,200	15,384,600	
						dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran							
						terpeliharanya peralatan		Pemeliharaan					
						gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran		rutin/berkala peralatan gedung kantor	3,500,000	4,200,000	4,200,000	2,100,000	
						selama 1 (satu) tahun							

TARGET															
SASARAN STRATEGIS							INDIKATOR KINERJA					TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							Meningkatnya kedisiplinan dan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran					25%	30%	30%	15%

NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
3	Peningkatan kedisiplinan dan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2,507,500	3,009,000	3,009,000	1,504,500

TARGET															
SASARAN STRATEGIS							INDIKATOR KINERJA					TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					25%	30%	30%	15%

5	Peningkatan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran	√	√	√	√	tersusunnya dokumen Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RENSTRA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral	7,100,000	8,520,000	8,520,000	4,260,000
						tersusunnya dokumen rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD	3,650,000	4,380,000	4,380,000	2,190,000
						tersusunnya profil dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		Penyusunan pembuatan profil dinas	2,440,000	2,928,000	2,928,000	1,464,000
									TARGET			
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan						Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan			25%	30%	30%	15%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
6	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	√	√	√	√	Terlatihnya kader dan TP.PKK	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	115,852,700	139,023,240	139,023,240	69,511,620
						disetiap tingkatan						
						Terbinanya Pokjanal						
						Posyandu		Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu	88,352,350	106,022,820	106,022,820	53,011,410
						Terfasilitasinya kegiatan		Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	34,933,750	41,920,500	41,920,500	20,960,250
						BBGRM dalam membangun desa/kelurahan		(BBGRM)				
						terlatihnya Kader		Pelatihan Kader				
						Pemberdayaan Masyarakat		Pemberdayaan Masyarakat	36,284,000	43,540,800	43,540,800	21,770,400
						Terlatihnya pengurus/anggota						

						(PKK, LPMD/K,RT,RW,Tokoh Pemuda dan masyarakat)		Pelatihan P3MD	63,872,150	76,646,580	76,646,580	38,323,290
						Terlatihnya pengurus RT/RW		Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	57,406,650	68,887,980	68,887,980	34,443,990
						Terlatihnya pengurus/anggota LPMD/K		Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	81,676,000	98,011,200	98,011,200	49,005,600
									TARGET			
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat yang kuat melalui						Meningkatnya perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan			25%	30%	30%	15%
pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan						potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi						
Lembaga Ekonomi Masyarakat						Masyarakat						
		JADUAL PELAKSANAAN							PAGU ANGGARAN (Rp)			
NO	AKSI/STRATEGI	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
7	Peningkatan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	Terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	156,560,150	187,872,180	187,872,180	93,936,090
						Terlaksananya gelar teknologi tepat guna tingkat provinsi dan nasional		Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	83,323,125	99,987,750	99,987,750	49,993,875
						Terbinanya kelompok usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal		Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	41,957,000	50,348,400	50,348,400	25,174,200
						Terlaksananya revitalisasi Posyantek		Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	3,803,125	4,563,750	4,563,750	2,281,875

						Terlatihnya para pelaku PNPM-MPd mengenai pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPd		Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MP	88,623,750	106,348,500	106,348,500	53,174,250	
							TARGET						
SASARAN STRATEGIS							INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa							Meningkatnya pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa			25%	30%	30%	15%
							TARGET						
SASARAN STRATEGIS							INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa							Meningkatnya pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa			25%	30%	30%	15%
							TARGET						
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	
8	Peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan	Program	Fasilitasi TMMD	32,925,000	39,510,000	39,510,000	19,755,000	
						TMMD dan BSMSS	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	dan BSMSS					
						Terlaksananya kegiatan lomba desa Tk.Kab. dan Tk.Prov.		Penyelenggaraan Per lomba Desa	82,500,000	99,000,000	99,000,000	49,500,000	
						Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	34,137,500	40,965,000	40,965,000	20,482,500	
						Terbinanya desa/kelurahan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan		Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan	19,373,850	23,248,620	23,248,620	11,624,310	
													TARGET
SASARAN STRATEGIS							INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel							Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel			25%	30%	30%	15%
							TARGET						
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	
9	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel	√	√	√	√			Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan	51,978,750	62,374,500	62,374,500	31,187,250	
								Keuangan Desa					
							TARGET						
SASARAN STRATEGIS							INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terlatihnya aparatur mengenai pengelolaan keuangan desa							Terlatihnya aparatur mengenai pengelolaan keuangan desa						
							TARGET						
SASARAN STRATEGIS							INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terlatihnya aparatur							Pelatihan						

						pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan	64,639,000	77,566,800	77,566,800	38,783,400
						Terevaluasinya pelaporan		Monitoring,				
						tentang fasilitasi pemilihan kuwu		Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi	25,611,250	30,733,500	30,733,500	15,366,750
						tersusunnya profil desa/kelurahan		Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	23,429,125	28,114,950	28,114,950	14,057,475
JADUAL PELAKSANAAN												
PAGU ANGGARAN (Rp)												
NO	AKSI/STRATEGI	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
		√	√	√	√	terlatihnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	29,943,750	35,932,500	35,932,500	17,966,250
						terlatihnya aparatur pemerintah desa dalam penyusunan peraturan di desa		Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Penyusunan Peraturan di Desa	25,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000
						Terbinanya desa dalam penyelenggaraan pemilihan kuwu		Pembekalan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu	35,475,000	42,570,000	42,570,000	21,285,000
						Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35,233,781	42,280,538	42,280,538	21,140,269
						Terfasilitasinya penyelesaian masalah kedesaan		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan	4,965,625	5,958,750	5,958,750	2,979,375
						Terlaksananya pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih		Pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih	42,170,000	50,604,000	50,604,000	25,302,000
						Terevaluasinya penerapan Perbup ttg pemerintah desa		Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa	11,525,000	13,830,000	13,830,000	6,915,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	25%	30%	30%	15%

NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				ANGGARAN (Rp)	TR.I	TR.II	TR.III
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	√	√	√	√		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan	Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan	18,650,000	22,380,000	22,380,000	11,190,000
						Terfasilitasinya pengelolaan						
						administrasi desa bagi fasilitator kecamatan dan pendamping desa						



Sumber, 2018
 BUPATI CIREBON
 Drs/H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si

|

**KESELERASAN RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TERKAIT	TIDAK TERKAIT		
1	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	1	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SD/MI		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	AMH Alquran	AMH Alquran	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	Sertifikat bukt bisa dan mampu baca dan tulis Al - Qur'an	973,962			
		2	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMP/MTs		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	AMH Alquran	AMH Alquran	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk Baca Tulis Al-Quran Siswa SMP	Pembelajaran Baca Tulis Al Qur'an terhadap siswa SMP	377,413			
		3	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMA/MA		Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMQ	AMQ						
		4	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMK		Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMQ	AMQ						
		5	Jumlah Siswa Yang Hafal Juz Amma pada Pendidikan SLTP dan SLTA		Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMQ	AMQ						
		6	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan Ba'da Maghrib Mengaji		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya jumlah DKM yang menyelenggarakan Ba'da Maghrib mengaji	Jumlah DKM yang menyelenggarakan Ba'da Maghrib mengaji						
		7	Jumlah Penghapal Alquran		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Jumlah Penghapal Alquran						
		8	Prestasi Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Barat		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Prestasi Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Barat						
		9	Jumlah Kasus Konflik Yang Bernuansa Agama		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Jumlah Kasus Konflik Yang Bernuansa Agama						
2	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	1	Peningkatan Indeks Pendidikan	1	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Bantuan Biaya Operasional SMP Negeri 1 Atap	430			
				2	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	- PKBM Kesetaraan Paket B Setara SMP - PKBM Kesetaraan Paket A Setara SD	2.463.982			
				3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Penyediaan Beasiswa Transisi	Peserta Didik Baru SMP yang kurang mampu	5.029.409			
				4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Kegiatan Expo Pendidikan	Pameran Pembangunan Bidang Pendidikan	200			
				5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	Guru SD di Daerah terpencil	297,629			
				6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Sa	Juara Lomba Gugus SD dan Pengelola Perpustakaan terbaik	178,45			
				7	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	Pelaksanaan lomba: OSN, FLSN, O2SN, Callistung, Pasanggi Bahasa dan Sastra Sunda/Cirebon	1.334.955			
				8	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peserta Bimbingan Teknis Guru TIK	5.759.480			
				9	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	SK Akreditasi Sekolah Dasar	499,434			
				10	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan MONEV US/UN SD	516,509			

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
				NO								
				11	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis	127,277		
				12	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional	Dokumen Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	124,448		
				13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Calon Peserta Diklat Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	400,057		
				14	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Dokumen Bahan Pelatihan dan Sertifikat	275,296		
				15	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Bimtek program dan aplikasi Data Pokok Pendidikan	383,68		
				16	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Bimbingan Teknis Verifikasi dan validasi Data NUPTK	297,025		
				17	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen Rencana dan Program Kerja Pendidikan Tahun 2019	283,4		
		2	Angka Melek Huruf (AMH) pada Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	1	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	AMH	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan Fungsional	7.268.128		
				2	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	AMH	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis IKP	132,46		
				3	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	AMH	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	PTK PNF berprestasi	310,38		
				4	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	AMH	Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan dan Sarana Keagamaan	Dokumen Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	43,000		
		3	Rata-Rata Lama Sekolah	1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Dokumen Capaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pendidikan	204		
				2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Dokumen Data Profil Pendidikan dan Kartu NISN Siswa Baru Kelas LSD	979,465		
				3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	198,625		
				4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Fasilitasi Pelayanan Pendidikan	Penyelenggaraan PPDB On Line dan Peserta pembinaan pencegahan dan penyalahgunaan penyimpangan perilaku siswa"	4.326.677		
				5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Penyusunan Capaian Target SPM Bidang Pendidikan	Dokumen Laporan Hasil Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan	174,4		
		4	Angka Partisipasi Kasar (SD, SMP, SMA)	1	Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMQ	AMQ	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	PKBM Kesetaraan Paket C setara SMA	3.220.842		
		5	Angka Partisipasi Murni (SD, SMP, SMA)	2	Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMQ	AMQ	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket C	Sertifikat Peserta Bimtek	127,652		
				3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	Juara I, II dan III Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten	411.660		
				4	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Guru SMP dan Calon Pendamping mendapat Sertifikat	861,195		
				5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MI/SMPLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP	1. Materi Sosialisasi dan Bimtek 2. Laporan hasil sosialisasi dan bimtek	66.322.955		
				6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Pelaksanaan lomba: OSN, FLS2N, Q2SN, TUB, Pasanggiri Bahasa dan Sastra Sunda/Cirebon	460.350		
				7	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Sertifikat dan SK Akreditasi Lembaga Pendidikan	90.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
				NO								
				8	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Sertifikat Peserta Bimtek Penyusunan Kurikulum bahan ajar dan Model pembelajaran KF	139.325		
				9	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan UN Kesetaraan Paket A, B dan C	55.600		
		6	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	1	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan gedung sekolah SD	Gedung Sekolah	2.428.561		
				2	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	9.352.795		
				3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Penambahan ruang guru sekolah SD	Ruang Kerja Guru	1.011.583		
				4	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Ruang Laboratorium Komputer	2.100.000		
				5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan ruang serba guna/aula	Ruang Serbaguna pada SDN 1 Marikangen Kec.Plumbon	100.000		
				6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Halaman sekolah yang terpasang vaving blok, Pagar lingkungan sekolah	14.379.344		
				7	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev BOS dan UN SMP	105.500		
				8	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan perpustakaan sekolah SD	Ruang Perpustakaan Sekolah	2.019.450		
				9	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD	Jamban Siswa	933.100		
				10	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport Siswa, Buku baca tulis AlQur'an	3.213.295		
				11	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan	4.205.982		
				12	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pengadaan Mebeleur Sekolah SD	Meubelair Sekolah	3.584.373		
				13	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	Ruang Kelas Sekolah	141.102.878		
				14	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	Lapangan dan Sarana Prasarana Olah Raga Sekolah	250		
				15	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah SD	213.761		
				16	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	Juara I, II dan III Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten	213.313		
				17	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Guru SD dan Calon Pendamping mendapat Sertifikat	674.329		
				18	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembinaan SMP Terbuka	1. Pengadaan Seragam Batik untuk siswa terbuka kelas 7, 2. Juara Lomjani, 3. Materi Workshon	234.743		
				19	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD	1. Materi Sosialisasi dan Bimtek 2. Laporan hasil sosialisasi dan bimtek	163.932.852		
				20	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	Ruang Kelas Baru SMP	12.639.447		
				21	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Lapangan Parkir SMP	Jalan Lingkungan SMP Negeri 2 Suranenggala	1.100.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
				NO								
				22	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Sarana Air Bersih dan Jamban Sekolah	1.650.000		
				23	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	Sarana Air Bersih dan Jamban Sekolah	1.650.000		
				24	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport	2.248.495		
				25	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Alat Peraga dan Peraktik Pembelajaran Siswa SMP	6.000.000		
				26	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tINGKATAN sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri	22.052.407		
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Meningkatnya jumlah petugas dlm peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer (pengobatan rasional, pel.Kes gigi, pel laboratorium, labkesda dan pel kegawatdaruratan) (P3K)	243,746		
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Tersedianya obat, perbekalan kesehatan dan reagen yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya 2. Terlaksananya maring alat kesehatan 3. Terlaksananya kalibrasi 72			
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Telatinya petugas pengelola obat tentang PIO, Konseling, visite dan Home care	219,405		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan di pos kesehatan lebaran, natal & tahun baru dan P3K petugas dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan bencana	927,319		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan	22.506.022		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Operasi Katarak	Jml Penderita katarak yang ditemukan (penjaringan kasus) dari keluarga miskin dapat dilakukan operasi	641,826		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Kesehatan Pengembangan/Khusus	Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan upaya kesehatan tradisional, perawatan kesehatan masyarakat dan kesehatan indera	305,539		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji	jumlah jamaah haji yang terpantau kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan dan pembinaan di puskesmas RS dan Dinas Kesehatan	149,444		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Seluruh sekolah melaksanakan penjaringan dan pelayanan kesehatan anak sekolah, Perwakilan SD, Remaja dari umur 12 s/d 18 tahun anak SD	173,507		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta	Sarana kesehatan swasta melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	32,931		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Penyediaan Dukungan Manajemen BOK		757,553		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Penyediaan Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan		136,819		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas		22.584.529		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Penilaian Puskesmas Berprestasi	Terpilinya Puskesmas berprestasi			
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan	Meningkatnya cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	71.100		
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pengawasan dan Pembinaan Tempat-tempat Umum	Meningkatnya cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	48.253		
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pengawasan dan Pembinaan Industri	Meningkatnya cakupan industri yang memenuhi syarat kesehatan	29.512		
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pengawasan Obat (distribusi dan penggunaan)	1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan obat narkotika dan psikotropika 2. sosialisasi Gerakan Masyarakat Menggunakan Obat	71.462		
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Terbinanya indutri rumah tangga pangan yang memenuhi syarat kesehatan	58.470		
					Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Adanya perubahan perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berprilaku sehat	PHBS	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, Masyarakat, Pemuda Se-Kecamatan Pasaleman, Pemuda dan Kader	783.913		
					Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Adanya perubahan perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berprilaku sehat	PHBS	Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif	Pelugas Siaga sehat, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa, Desa Siaga	564.305		
					Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Semua desa memiliki Posbindu	44.738		
					Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TPM)	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)	Pengunjung Posbindu yang berusia 15-59 tahun, kader posbindu se kecamatan palimanan Masyarakat	80.091		
					Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TPM)	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Pengendalian Kesehatan Jiwa	Cakupan Penemuan kasus gangguan kesehatan jiwa menggunakan sistem 2 menit	50.000		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Penyusunan Standar Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat & Dokumen Naskah Akademik Perubahan Perda Retribusi	666.600		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya Penyusunan Buku Profil Kesehatan dan Pertemuan Evaluasi SPM, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Data & Informasi	143.162		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi kesehatan	88.480		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Penilaian Kinerja Puskesmas		60.483		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Akreditasi Puskesmas	Terselenggaranya Sosialisasi akreditasi, Pendampingan implementasi mutu oleh Tim Pembina dan Tim Mentor, serta Terselenggaranya Evaluasi upaya peningkatan mutu puskesmas	2.794.997		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Peningkatan Kapasitas SDM	Tenaga Fungsional yang memiliki sertifikat sebagai tenaga fungsional	300.000		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas	Manajemen Pengelolaan SDM	Seluruh Puskesmas mampu memetakan analisis jabatan dan analisis beban kerja di puskesmas	50.000		
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan sarana sanitasi dasar	Cakupan sarana sanitasi dasar	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Cak. RT tdk merokok dim ruangan Masyarakat	500.000		
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Akses rumah tangga terhadap sarana air bersih dan akses rumah tangga terhadap jamban sehat,	470.823		
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Klinik Sanitasi	Pasien dan klien diberikan KIP/K di klinik sanitasi dan dilaksanakannya intervensi lingkungan terhadap masyarakat	73.368		
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Cakupan rumah tangga akses terhadap jamban keluarga, Peningkatan akses masyarakat terhadap jamban keluarga, Tokoh Masyarakat, Tomas , Kader	145.952		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Terlaksanya fogg fokus 100% dari kasus, Pemberantasan DBD	1.377.414		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	angka penemuan kasustatalaksana pnemoni, tata laksana diare, penemuan kasus kusta, cacat 2 kusta, DBD yang ditangani	719.178		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya pelayanan imunisasi pada bayi, bumil dan anak sekolah di Kabupaten Cirebon	419,82		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Meningkatnya SKD KLB penyakit potensial KLB/wabah di masyarakat, Ketepatan laporan (W1, W2, dan STP)	351.393		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan HIV/AIDS	1. pelatihan LKB, 2. MVCT, 3. sosialisasi HIV di masyarakat, 4. sosialisasi di populasi kunci, 5. pert pokja HIV, 6. pert jejaring LSM, 7. perte Koordinasi dgn SKPD, 8. HAS, 9. leaflet, 10. poster, 11. lembar balik 12. buku saku, Kesehatan Ibu dan Anak, Masyarakat , 26 Kader KR TARUNA dan PONPES, osialisasi dan Penanggulangan HIV/AIDS di 40	1.425.824		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan Tuberkulosis	Angka Cakupan pengobatan semua kasus TB (CDR)	300.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
		2	Angka Kematian Ibu (AKI)		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanggulangan Komplikasi Kebidanan dan Bayi	Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan persalinan dan nifas normal sesuai dengan standar, pengambilan keputusan berKB, KB Pasca Salin, penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi, Puskesmas PKRT, Pengenalan tanda bahaya bagi kader	405,343		
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Bidan peserta ANC terpadu, Tim pembahasan kasus kematian ibu, tim pengkaji audit maternal, manajemen pelayanan KB di Puskesmas, Penguatan program KIA bagi BPM	558,917		
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pembangunan Sistem Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal, meningkatnya kinerja klinis Puskesmas PONEF	153,952		
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jaminan Persalinan		2.079,770		
		3	Angka Kematian Bayi (AKB)		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase neo komplikasi yang ditangani rasio kematian bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita	Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan bayi balita sakit dengan MTBS, penanganan BBLR, SDIDTK dan Kelas Ibu Balita	419,267		
					Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase neo komplikasi yang ditangani rasio kematian bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Peningkatan kapasitas nakes dlm penanganan kegawatdaruratan pada bayi, kasus komplikasi neonatal >80 dan serta kasus bayi dan balita sakit yang ditangani oleh nakes dengan pendekatan MTBS dari 50% sehingga jumlah kematian bayi menurun sebesar 25% dari tahun sebelumnya	157,342		
		4	Balita gizi buruk (BB/TB)		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas	Balita gizi buruk (BB/TB)	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	% balita ditimbang, % ibu hamil mendapat fe, % remaja puteri mendapat fe, % jumlah KK mengonsumsi garam beryodium, % bayi dan anak balita mndapat kapsul vit A 2 x setahun, Menurunkan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita, Ibu hamil kurang darah	624,143		
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas	Balita gizi buruk (BB/TB)	Penanggulangan Gizi Buruk	% balita Gizi Buruk mendapat perawatan, % balita gizi buruk menurun, Meningkatkan kesehatan anak balita gizi buruk, Menurunkan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita, Balita dan Balita Gizi Buruk, balita GB, Ibu Hamil dan Balita, Kader	2.548,275		
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas	Balita gizi buruk (BB/TB)	Penguatan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten	% Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-6 bulan	155,123		
		5	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar		Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas)	Jumlah fasilitas tk pertama (Puskesmas) yang melaksanakan pelayanan kesehatan	95.909,236		
					Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	meningkatnya jumlah kepesertaan sasaran JKN di Kab. Cirebon	100.000		
		6	Rasio rumah sakit per satuan penduduk		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah rumah sakit terbangun	Rasio rumah sakit per satuan penduduk					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	CATATAN				
		Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pembangunan Puskesmas	2.400.000			
			Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pembangunan Puskesmas Pembantu	1.800.000			
			Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengadaan Puskesmas Keliling	1.500.000			
			Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	2.500.000			
			Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terbangunnya puskesmas pembantu dan polindes	1.600.000		
			Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas	Pelayanan Masyarakat untuk warga di 6 desa, pemagaran pkm murah	1.690.000		
			Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Rehabilitasi Sengah/Berat Puskesmas	Terbangunnya Puskesmas dengan bangunan yang memadai	1.500.000		
			Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengembangan Bangunan UPT Kesehatan	Tersedianya UPT Kesehatan Masyarakat	550.000		
			Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lain sebagainya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan di UPT Labkesda dan Labkesling Kab Cirebon	3.200.000		
8	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah rumah sakit terbangun	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	Pengadaan Sarana Rantai Vaksin	550.000				
9	Rasio dokter terhadap penduduk	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	Legalisasi praktik perorangan	67.698			
10	Rasio paramedis terhadap penduduk	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	Legalisasi praktik perorangan	67.698			
11	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang termasuk ke dalam penerima bantuan iuran (PBI) daerah	35.000.000			
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Kemitraan antara Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dan RS dalam rangka Penguatan Sistem Rujukan	Perjanjian kerja sama antara pelayanan kesehatan dasar dengan rumah sakit	408.967			
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Kemitraan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	Tersedianya perangkat sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan	104.490			
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Kemitraan dengan Masyarakat Umum dan Organisasi Profesi	Nota kesepahaman (MoU) antara dinas kesehatan dgn masyarakat dan organisasi profesi	38.439			

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
		12	Jumlah Posyandu Purnama		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tereselenggaranya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tereselenggaranya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Strata Posyandu	Kader posyandu, 1 Paket, 390 orang, 60 kader, 100 orang, 11 desa, 119 posyandu kelurahan x 5 or x 10000 x 12 hl	725,282			
4	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketramampilan dan berjiwa kewirausahaan	1	Jumlah kawasan seni		Program Pengembangan Nilai Budaya	Bertambahnya produk budaya yang bertahan hidup	Jumlah produk budaya yang bertahan hidup	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah group seni yang direvitalisasi, direkonstruksi, diwariskan, dan diberi penghargaan	160.000			
					Program Pengembangan Nilai Budaya	Bertambahnya produk budaya yang bertahan hidup	Jumlah produk budaya yang bertahan hidup	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya	330.000			
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Facilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kegiatan pameran kesenian	44.000			
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah benda cagar budaya yang dikoleksi	75.000			
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah garapan misi kesenian yang dipergelarkan di luar daerah, Hari Jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN	387.000			
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang dipelihara yang menjadi tujuan wisata	235.000			
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Jumlah Gedung dan Kawasan seni yang dibangun	2.000.000			
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah judul buku kebudayaan yang dicetak	132.000			
			Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Bertambahnya kelompok budaya yang dibina	Jumlah kelompok budaya yang dibina	Facilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan pengusaha swasta	Jumlah lembaga yang dibina melalui kemitraan	165.000					
			2	Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pagelaran karya seni kreasi baru	Jumlah pagelaran karya seni kreasi baru	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pelaksanaan upacara yang diikuti kom musik	400.000		
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pagelaran karya seni kreasi baru	Jumlah pagelaran karya seni kreasi baru	Facilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah	900.000			
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pagelaran karya seni kreasi baru	Jumlah pagelaran karya seni kreasi baru	Facilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah kreasi seni tematis yang difestivalkan tingkat pelajar, seniman daerah dan seniman nasional	700.000			
			3	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tersedianya tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Jumlah tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pengadaan Sarana Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Berupa: - Mesin Bubut - Kendaraan Praktek Roda 4 - Kendaraan Praktek Roda 2 - Mesin Jahit - Mesin Bordir - Mesin Las Tig - Mesin Las Mig - Mesin Gerinda Tangan - Mesin Bor Tangan	4.000.000		
					Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tersedianya tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Jumlah tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja: - Berbasis Kompetensi - Berbasis Kewirausahaan	8.090.000			
			4	Jumlah wirausahawan baru		Program peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	Jumlah pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha					
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan menurani penanganannya	Jumlah kesempatan kerja bagi masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	22,973			
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	Jumlah Wirausahawan baru	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	440.000			

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	Jumlah Wirausahawan baru	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Jumlah pemudayang mengikuti diklat life skills	154.000		
		5	Angka pengangguran terbuka		Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja - Jumlah Lowongan Kerja	407.178		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	506.623		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Penyebarluasan Informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terlaksananya Penyebarluasan informasi prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja luar negeri	336.270		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Tenaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri	329.000		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Job Fair	- Terlaksananya Pameran Bursa kerja dengan peserta - Jumlah lowongan kerja	407.658		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Pembinaan Pencari Kerja	Terbinanya Pencari Kerja	106.246		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Pemagangan Dalam Negeri	Terlaksananya Pemagangan dalam negeri	111.790		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi	58.938		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang: a. Peraturan Perusahaan: c. Organisasi Pekerja (Serikat Pekerja): d. LKS Bipartit b. Perjanjian Kerja Bersama:	193.514		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui: a. Birmtek b. Seminar BP IS	170.900		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon	135.300		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit	- Terlaksananya Pemilihan Pekerja Teladan - Terlaksananya Pemilihan Perusahaan terbai - Terlaksananya Bazar LKS Tripartit	275.000		
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Tercapainya Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kerja	Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Terlatihnya dan terdidiknya masyarakat di lingkungan sekitar industri tembakau	400.000		
					Program Cirebon Bebas Pengangguran	Tercapainya Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Kampung Produktif	Peserta yang sudah mendapat pelatihan	300.529		
5	Terwujudnya kabupaten cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	2.500.000		
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Produk Pariwisata Unggulan	440.000		
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bertambahnya ODTW yang ditata	Jumlah ODTW yang ditata	Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah penataan ODTW	250.000		
					Program pengembangan kemitraan	Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata	Jumlah kerjasama pengembangan pariwisata	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta koordinasi pariwisata	100.000		
					Program pengembangan kemitraan	Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata	Jumlah kerjasama pengembangan pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan MICE yang dilaksanakan	430.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
6	Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda serta budaya dan prestasi olahraga	1	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti diklat Bimbingan Mental	55.000		
					Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP	165.000		
					program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam <u>menawal nebananunan</u>	Jumlah anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang dibina	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Pembina Pramuka yang mengikuti pelatihan	220.000		
					program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam <u>menawal nebananunan</u>	Jumlah anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang dibina	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah pemudayang mengikuti diklat paskibra	660.000		
					program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam <u>menawal nebananunan</u>	Jumlah anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang dibina	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan pemuda pelopor kemandirian lingkungan	275.000		
					program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam <u>menawal nebananunan</u>	Jumlah anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang dibina	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Jumlah Kegiatan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	385.000		
					Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Bertambahnya pemuda yang memiliki wawasan tentang NAPZA		Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba	110.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibut Atlet Berprestasi	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan <u>dasar</u>	Jumlah cabor yang dikompetisikan	800.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibut Atlet Berprestasi	Pembibitan dan Pembinaan <u>Olahragawan Berbakat</u>	Jumlah Cabor yang dibina	800.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibut Atlet Berprestasi	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Peringkat prestasi POPDA, PORSENITAS, PORPEMDA, ORTRADPROV PASANGGIRI	1.330.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibut Atlet Berprestasi	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat	1.210.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibut Atlet Berprestasi	Pengembangan olahraga rekreasi <u>rekreatif</u>	Jumlah kegiatan Festival Olahraga <u>rekreatif</u>	7.000.000		
					Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Bertambahnya jumlah GOR dan sarana prasarana olahraga yang dibangun Pemkab	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi baik	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana olahraga yang dibangun	7.000.000		
				Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Bertambahnya jumlah GOR dan sarana prasarana olahraga yang dibangun Pemkab	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara	330.000			
7	Peningkatan koneksitas antar wilayah	1	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya jalan dan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi <u>mantap</u>	Jumlah Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan	585.000		
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya jalan dan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi <u>mantap</u>	Jumlah Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang Ditingkatkan dan Pembangunan Jalan Baru	32.700.000		
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya jalan dan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi <u>mantap</u>	Jumlah Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Pembangunan Jembatan	Jembatan Kabupaten yang Ditingkatkan	10.150.000		
					Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Jalan dan Jembatan dalam Kondisi laik	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	515.000		
								Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang Dipelihara Secara Rutin dan Periodik	88.550.000		
								Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jembatan Kabupaten yang terpelihara	11.870.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN					
					Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Tersedianya data pengguna ruang milik jalan pada jalan Kabupaten	Data/volume Pengguna Jalan	Pemanfaatan Jalan	Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang Dipergunakan Masyarakat dan Jumlah Patok Km/Hm yang Tersusun	145.000						
					Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersusunnya Informasi Database jalan dan Jembatan	Data Base Informasi Jalan dan Jembatan	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan	Tersedianya Data Kondisi Jalan	300.000						
					Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersusunnya Informasi Database jalan dan Jembatan	Data Base Informasi Jalan dan Jembatan	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan	Tersedianya Data Kondisi Jembatan	300.000						
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terperuhnya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang sian nakai	Terperuhnya Kebutuhan peralatan Kebinamargaan	Pengadaan Alat-alat Berat	Bertambahnya Jumlah Alat-alat Berat	5.500.000						
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terperuhnya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang sian nakai	Terperuhnya Kebutuhan peralatan Kebinamargaan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Bertambahnya Jumlah Peralatan Bengkel Alat-alat Berat	16.000						
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terperuhnya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang sian nakai	Terperuhnya Kebutuhan peralatan Kebinamargaan	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan	Bertambahnya Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan	249.700						
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terperuhnya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang sian nakai	Terperuhnya Kebutuhan peralatan Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah Alat-alat Berat yang Dipelihara	795.000						
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terperuhnya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang sian nakai	Terperuhnya Kebutuhan peralatan Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Jumlah Peralatan Bengkel Alat-alat Berat yang Dipelihara	7.700						
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terperuhnya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang sian nakai	Terperuhnya Kebutuhan peralatan Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan yang Dipelihara	242.000						
							2	Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terpelihara dan terbangunnya jaringan jalan Desa kondisi mantap	Jumlah Jalan Desa dalam Kondisi mantap				
8	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	1	Jumlah jalan produksi pertanian dan perikanan													
		2	Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya sarana air limbah, sanitasi, sumber mata air dan jaringan air bersih bagi masyarakat											
		3	Jumlah daerah rawan banjir	Program Pengendalian Banjir	Berkurangnya tinggi dan lama genangan banjir											
		4	Persentase pengangkutan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pelayanan persampahan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon (Pembangunan TPA SL baru)											
		5	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangun dan terpeliharanya Saluran/Gorong-gorong di Kabupaten Cirebon											
		6	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pelayanan persampahan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon (Pembangunan TPA SL baru)											
		7	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Program Pembangunan Rusunawa	Terbangunnya Rusunawa											
		8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terdidik dan terlatihnya anggota pemadam kebakaran sehingga meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran											

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
9	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	1	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya timbulan sampah dan berkembangnya konversi sampah menjadi biogas		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	PIS : Penyediaan prasarana dan sarana persampahan PIK : a. Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) b. Penyediaan kendaraan roda 3 pengangkut sampah c. Pengadaan mesin pencacah plastik d. Pengadaan mesin kompos e. Pengadaan mesin pengolah sampah f. Pengadaan mesin penghancur sampah (incenerator) g. Pengadaan kontainer sampah h. Pengadaan ionisator dengan hanggar i. Pengadaan nerbak sampah	46.117.450		
								Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	PIS : a. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah dan kelembagaan bank sampah b. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui bintek pengelolaan sampah c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan sampah plastik d. Alat kebersihan dan bahan pembersih e. Peralatan pelebur plastik PIK : a. Pelatihan pengolahan sampah b. Diklat pengelolaan sampah c. Bintek peningkatan kerajinan bahan baju sampah kering d. Bintek peningkatan pengelola sampah Desa e. Bintek pengelolaan sampah mandiri f. Pelatihan pengelolaan sampah g. Pelatihan masalah sampah h. Pelatihan daur ulang sampah di tingkat RT/RW i. Sosialisasi peningkatan peranserta	787.671		
		2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terbangun dan terkelolanya RTH di 20 Kecamatan		Penataan RTH	PIS : Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk umum (alun-alun kecamatan dan hutan kota) PIK : a. Pembangunan gapura b. Pembuatan RTH c. Penghijauan	2.218.159		
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pelayanan umum dan taman	2.133.035		
		3	Prosentase kawasan lindung		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan rehabilitasi b. Pemulihan ekosistem pesisir serta secara swadaya masyarakat melakukan upaya rehabilitasi						
					Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Ketersediaan sumber daya alam serta partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim						
					Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Terehabilitasi dan pulihnya kondisi sumber daya alam						

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
		4	Penghargaan Adipura		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Terehabilitasi dan pulihnya kondisi sumber daya alam					
		5	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Berkurangnya daerah rawan air bersih					
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan dan tersedianya basis data & informasi lingkungan					
		6	Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan dan tersedianya basis data & informasi lingkungan					
		7	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya kegiatan perusakan lingkungan hidup					
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Cirebon					
					Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup					
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam			Terlindungi dan terkonservasinya sumber daya alam							
10	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Jumlah komunitas								
		2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	Menguatnya kapasitas lembaga masyarakat desa	Facilitasi Penguatan TP.PKK	terlatihnya kader dan TP. PKK disetiap tingkatan : (jumlah PKK aktif : RT 2.593, RW 9.168, desa/Kel. 424, Kec. 40)	561.000	
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	Menguatnya kapasitas lembaga masyarakat desa	Facilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjantal Posyandu	terbinanya Pokjantal Posyandu : (jumlah posyandu : pratama 0, madya 1.189/46%, pumama 738/28%, mandiri 664/26%, total 2.591 per Desember 2016)	427.626	
		3	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	400.000		
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya Sosialisasi TTG 300 orang dari 10 Desa dan terlaksananya Gelar TTG Tingkat Provinsi Serta Tingkat Nasional	350.000		
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	terbinanya kelompok usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal	400.000		
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Terlaksananya revitalisasi Posyantek	75.000		
11	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	1	Nilai PDRB	1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana pembangunan daerah yang memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan	Dokumen rencana Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	250.000	
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	2	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Data dan Informasi Hasil pembangunan ekonomi	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	185.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
		3	PDRB per kapita	3	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Data dan Informasi Hasil pembangunan ekonomi	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Dokumen PDRB kecamatan	263.874			
				4	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Data dan Informasi Hasil pembangunan ekonomi	Penyusunan dan Pengumpulan Data Survei Ekonomi Daerah	Dokumen Survei Ekonomi Daerah (SUSEDA)	360.000			
		4	Tingkat inflasi	1	Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perkonomian	Terwujudnya Kebijakan Pemerintah Daerah yang optimal	Kebijakan Daerah Yang Optimal	Facilitasi Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Laporan hasil rakor TPID	75.000			
		5	Jumlah daerah rawan pangan		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Penguatan cadangan pangan (ton setara beras)							
				Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan								
		6	Nilai investasi		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan Kerjasama Dalam Pengembangan Investasi di Kabupaten Cirebon	345.600			
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Data Minat Investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN	153.301				
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Tercapainya Koordinasi Tentang Skala Prioritas Potensi Investasi	186.624				
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terbinyanya Perusahaan	278.490				
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya Pameran Investasi	950.000				
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal		Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Penilaian Perusahaan PMDN / PMA Terbaik	Data dan Profil Perusahaan	196.992						
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal		Cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Kajian Teknis Untuk Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pelayanan Perizinan (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air, dan Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	194.466						
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal		Cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi	Penanganan Permasalahan Pengaduan Penanaman Modal Terkait Investasi	223.430						
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah	Pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	- Data Kajian Sumberdaya Yang Terkait Investasi - Data Hasil Analisa Kelayakan Kajian Potensi Investasi - Review Kajian Akademis Tentang RUPM	536.680							
	Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat des	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat des	Sosialisasi di Bidang Perizinan	Tersosialisasinya Masyarakat/ Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Izin	727.701							

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN		
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Terbangunnya SICANTIK (Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik	345.600			
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Operasionalisasi Pelayanan Perizinan	SK Perizinan	1.254.170			
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Terpeliharanya Manajemen Mutu Pelayanan /Upgrading ISO 9000:2008	165.888			
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Penyusunan Data Base Perizinan	Data dan Laporan Perizinan Serta Terwujudnya Database Manajemen Sistem	208.968			
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISIYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Penyusunan Data Minat Investasi PMA /PMDN dan Non PMA / PMDN	Tersusunnya Dokumen Data Minat Investasi	207.360			
					Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Survey IKM	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kepada Para Pemohon Perizinan/Non Perizinan Yang dipilih Secara Acak, Setelah Para Pelaku Pemohon Selesai Membuat Izin dan Menerima SK Perizinan/Non Perizinan	145.152			
		7	Persentase koperasi aktif		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi sebagai badan usaha dalam meningkatkan perekonomian daerah							
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tersusunnya dokumen penerapan sistem IT bagi pengembangan koperasi							
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Tersusunnya keputusan bupati tentang pengembangan koperasi							
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah SDM yang mempunyai kompetensi pada pengadimistrasian, pengelolaan keuangan, kemampuan pada jaringan usaha dan pembinaan							
		8	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertampungnya pedagang pasar tradisional dan tersedianya sarana dan prasarana pedagang kaki lima dan asongan							
12	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	1	Menurunnya Jumlah penduduk miskin	Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah subsidi reskin untuk penerima manfaat								
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan PMKS lainnya yang mandiri								
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Tersalurkannya Bantuan bagi Kaum Dhuafa dan Yatim Piatu 100%								
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial								
				Program Pembinaan Anak Terlantar	Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar								
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pelayanan bagi penyandang cacat								

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Pembinaan Panti Asuhan/ panti jompo	Meningkatnya Panti Asuhan/ Panti Jompo yang terbina					
					Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial					
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (pendayagunaan dan Pemberdayaan PSKS)	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					
					Program peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya hasil kajian dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan agama dan meningkatnya penanganan bencana alam					
					Program Pengembangan Data dan Informasi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya laporan data dan informasi keagamaan dan kesejahteraan sosial, data dana hibah dan bantuan					
					Program pembinaan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kemampuan Teknis Lembaga dan Pelaku Kesejahteraan Sosial					
		2	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk								
13	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat		Pengembangan kebijakan pemerintah	Meningkatnya kinerja SKPD		Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi dan pembinaan penyusunan IKM terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah	85.000	
					Penataan Pendayagunaan Aparatur	Meningkatnya kinerja satuan perangkat daerah					
		2	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM		Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi	Terimplementasikannya SOP	Jumlah SKPD Yang Mengimplementasikan SOP	Fasilitasi SOP	Fasilitasi dan pembinaan penyusunan SOP terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah	80.000	
					Program administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya rasio jenis perizinan dan rekomendasi yang diarahkan	Jumlah Kecamatan Yang Menerapkan PATEN	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Terlaksananya inovasi pelayanan administrasi kecamatan terpadu	110.000	
14	Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	1	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur					
					Program Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur	Terpenuhinya hak-hak kesejahteraan aparatur					
		2	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan		Program Administrasi Kepengawalan	Prosentase pelayanan tepat waktu dan obyek					
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa					
					Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data layanan dan data aparatur yang up to date					
15	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih	1	Rata-rata capaian kinerja SKPD		Pengembangan kebijakan pemerintah	Meningkatnya kinerja SKPD					
					Penataan Pendayagunaan Aparatur	Meningkatnya kinerja satuan perangkat daerah					
		2	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatnya Nilai RAD PPK	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan hasil pemeriksaan kasus	585.750	
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatnya Nilai RAD PPK	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan hasil pemberantasan pungli	1.039.500	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
		3	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terwujudnya SPIP Kabupaten Cirebon	Terimplementasinya SPIP pada SKPD	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Laporan pelaksanaan SPIP OPD	189.735		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH.	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan hasil pemeriksaan/ monitoring	5.186.500		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH.	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Laporan hasil pemeriksaan kasus	530.000		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH.	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Laporan hasil tindak lanjut	3.106.200		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH.	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Laporan monitoring dan evaluasi Inpres No.5 tahun 2004, koordinasi dan sosialisasi pengawasan	229.000		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH.	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pemerintahan	1 dok lap.review keu & 1 dok lap.evaluasi LAKIP OPD, Review RKA dan PK APIP	735.000		
		4	Peningkatan Pendapatan asli daerah		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan dan Penerimaan 5 Jenis Pajak (Pajak BPHTB, PBB, SBW, PPU dan PAT)	Meningkatnya Penerimaan Pajak BPHTB	1.030.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak	Peningkatan Kemampuan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah	115.971		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	175.646		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW	Peningkatan Kemampuan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah	109.500		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB Masal	Data Objek dan Subjek PBB Yang Termutakhir	2.300.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang)	Tersusnya Laporan Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah Secara Periodik	86.250		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah	Tersampainya Informasi Tentang Pajak Daerah	230.000		
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Fasilitasi dan Pengaduan Pajak Daerah	Terfasilitasinya Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Daerah	115.000						
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Pembukuan Wajib Pajak	115.000						
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Terkelolanya Piutang Pajak Daerah	172.500						

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Restoran pada SKPD	Meningkatkan Pemahaman Wajib Pungut	185.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	1. Data CWP Hasil Penjaringan 2. Data Potensi 6 Jenis Pajak	175.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran	Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak Restoran	150.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pemungutan 6 Jenis Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah Tepat Waktu	245.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Kajian Pemetaan Data Pajak Parkir, Air Tanah, PPJ dan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tersusunya Data Pajak Daerah Yang Valid	280.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	Meningkatnya Validasi Data Para Wajib Pajak Daerah	77.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame	Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Meningkat	500.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Pelayanan 6 Jenis Pajak Daerah	Data Jenis Pajak Daerah Yang di Verifikasi	380.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan	Terpilinya Wajib Pajak Teladan	400.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terciptanya Penerimaan Pajak Daerah	402.500		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan pelayanan Pajak PBB dan BPHTB	3.140.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Pemutakhiran Basis Data PBB dan BPHTB	1.000.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tersajinya Data Piutang PBB	600.000		

Program	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Angaran
---------	-----------------	------------------	---------

**CASCADING RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera	Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai- nilai agama, jujur dan bertakwa	1 Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	Program-Program Bidang Agama 1 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 2 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 3 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama 4 Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
		Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berkecakupan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berkecakupan dan berdaya saing	1 Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua 2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Waled RSUD Arjawinangun	Program-Program Bidang Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3 Program Pendidikan Menengah 4 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 5 Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program-Program Bidang Perpustakaan 1 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program-Program Bidang Kesehatan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata 12 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata 13 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 14 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 15 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 17 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 18 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 19 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program-Program Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Program Keluarga Berencana 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3 Program pelayanan kontrasepsi 4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan reproduksi Remaja (KRR)

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
					BP3A	7 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial dan HIV/AIDS 8 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh kembang anak 9 Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga Program-Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak: 1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4 Program Kota Layak Anak
				3 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berkecakupan dan berjiwa kewirausahaan	Disbudparpora Disnakertrans Disnakertrans	Program-Program Bidang Kebudayaan 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program-Program Bidang Ketenaga Kerjaan : 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program-Program Bidang Ketransmigrasian 1 Program pengembangan wilayah transmigrasi 2 Program Transmigrasi Lokal
				4 Terwujudnya kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	Disbudparpora	Program-Program Bidang Pariwisata 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program Pengembangan Kemitraan
				5 Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda serta budaya dan prestasi olahraga	Disbudparpora	Program-Program Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 3 program peningkatan peran serta kepemudaan 4 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 5 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 6 Program pengembangan kebijakan manajemen olahraga 7 Program Pembinaan dan Pemasaran Olah Raga 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
		Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	1 Peningkatan konektivitas antar wilayah	Dishub	Program-Program Bidang Perhubungan : 1 Program peningkatan pelayanan angkutan umum 2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 3 Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan 4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 5 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
				2 Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Dinas PUPR	Program-program Bidang Pekerjaan Umum 1 Program pembangunan jalan-jalan dan jembatan 2 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 3 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 4 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, sumber daya air lainnya 5 Program pengendalian banjir 6 Program pembangunan infrastruktur pedesaan

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
					Dinas Kimrum	7 Program peningkatan Infrastruktur pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan 8 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9 Program Pembangunan Turap/Talud bronjong 10 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 11 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 12 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program-program Penataan Ruang: 1 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pemanfaatan Ruang 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				3 Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Dinas LH	Program-program Bidang Lingkungan Hidup: 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan 6 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 9 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 10 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 11 Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang SDA
				4 Meningkatkan upaya pengamanan sumber-sumber air guna mengoptimalkan ketersediaan air baku.	Dinas PUPR	Program-program Bidang Pekerjaan Umum 1 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	1 Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	DPMPD	Program-program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1 Program peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pedesaan 6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel 9 Program Peningkatan Peranserta BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program-program Bidang Kerjasama antar stake holder 1 Program Pengembangan Kemitraan 2 Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
		Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1 Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Diskopumkm	Program-program Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUM) 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 3 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM 4 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program-program Bidang Industri 1 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
					Disperdagin	

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
					Dinas Pertanian	4 Program Penataan Struktur Industri 5 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 6 Program pembinaan industri 7 Program pengembangan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perusahaan Daerah 8 Program pengembangan industri kecil dan menengah Program-program Bidang Pertanian: 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 6 Program peningkatan produksi hasil peternakan 7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 9 Program peningkatan Infrastruktur pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan 10 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
					Dinas LH	Program-program Bidang Kehutanan 1 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 2 Program Rehabilitasi hutan dan lahan 3 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 4 Program pengendalian alih fungsi lahan
					Disperdagin	Program-program Bidang Perdagangan: 1 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 3 Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor 4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 6 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 7 Program Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Penerimaan Pajak Rokok 8 Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
					Diskanla	10 Program Peningkatan Usaha Perusahaan daerah 11 Program Pengembangan SDM Badan Usaha Daerah Program-program Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Program peningkatan kapasitas kelautan dan perikanan 2 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 3 Program pembinaan dan pengembangan mutu hasil perikanan 4 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan/pesisir 5 Program peningkatan manajemen usaha kelautan dan perikanan 6 Program pengendalian hama dan penyakit ikan 7 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 8 Program pengembangan budidaya perikanan 9 Program pengembangan perikanan tangkap 10 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 11 Program pengelolaan pelabuhan perikanan dan alur lalu lintas kapal perikanan 12 Program peningkatan produksi benih ikan 13 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
					Dinas Ketahanan Pangan DPMPTSP	14 Program Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPT Laboratorium Perikanan 15 Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Alur lalu Lintas Kapal Perikanan 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan 17 Program Peningkatan Produksi Benih Ikan UPT Benih Ikan 18 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diWil Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 19 Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 20 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 21 Program Pengolahan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 22 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 23 Program Pengembangan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PP) Program-program Bidang Ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Program-program Bidang Penanaman Modal 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3 Program Penyiapan Potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 4 Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 5 Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan 6 Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
			2 Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Dinsos	Dinas LH	Program-Program Bidang Sosial 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2 Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial 3 Program Pembinaan Anak Terlantar 4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5 Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 6 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) 7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS) 8 Program peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat 9 Program Pengembangan Data dan Informasi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial 10 Program pembinaan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku kesejahteraan sosial 11 Program Pengentasan Kemiskinan Program-program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: 1 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3 Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
			3 Terpenuhnya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur permukiman layak	Dinas Kimrum		Program-Program Bidang perumahan dan pemukiman: 1 Program pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 2 Program pemberdayaan komunitas perumahan 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 4 Program pengelolaan areal permakaman 5 Program pembangunan rusunawa 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
		Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	1 Meningkatnya pelayanan publik yang prima	<p>Bapelitbangda</p> <p>Diskominfo</p> <p>Dinas Kimrum</p> <p>Diskominfo</p> <p>Dinas Arpusda</p> <p>Badan Kesbangpol</p> <p>Disdukcapil</p>	<p>Program-Program Bidang Perencanaan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program pengembangan data/informasi perencanaan 2 Program Kerjasama Pembangunan 3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dan cepat tumbuh 5 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 6 Program perencanaan pembangunan daerah 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi 8 Program perencanaan sosial budaya 9 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 10 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 11 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar <p>Program-Program Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 3 Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 4 Program kerjasama informasi dan media masa lokal dan nasional <p>Program-program Bidang Pertanahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah 2 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan <p>Program-program Bidang Statistik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah <p>Program-program Bidang Kearsipan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 5 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang Terpadu <p>Program-program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Program pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan tindakan kriminal 3 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) 6 Program pendidikan politik masyarakat 7 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 8 Program Dukungan Kelancaran 9 Fasilitasi Organisasi / lembaga politik dan kemasyarakatan <p>Program-program Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program pendataan dan perkembangan kependudukan 2 Penataan administrasi kependudukan 3 Program pelayanan pencatatan sipil 4 Program peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 5 Program Penyelenggaraan SIAK On Line
				2 Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Inspektorat BKPSDM</p>	<p>Program-Program Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
					BKAD Kecamatan	3 Program kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6 Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa 7 Program Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan 8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 9 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 10 Program pengentasan kemiskinan 11 Program Penataan Aset Daerah 12 Program Pengembangan BUMD 13 Program pengembangan kebijakan pemerintah 14 Program penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 15 Program penataan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah 16 Program penataan pendayagunaan aparatur daerah 17 Program pendidikan kedinasan 18 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 19 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 20 Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 21 Program peningkatan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang hukum dan HAM 22 Program peningkatan administrasi dan pengelolaan barang daerah 23 Program Administrasi Kepegawaian
				3 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Sekretariat Daerah Inspektorat	Program-Program Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

CROSS CUTTING
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	NO	PROGRAM		KEGIATAN			
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		
1	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	1	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SD/MI	Sekretariat Daerah		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	Meningkatnya kemampuan baca dan tulis Al - Qur'an		
		2	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMP/MTs	Dinas Pendidikan		Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Peran Satuan Pendidikan Keagamaan Non Formal	Sosialisasi peningkatan peran satuan pendidikan keagamaan non formal		
		3	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMA/MA	Dinas Pendidikan		Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Peran Satuan Pondok Pesantren	Sosialisasi peningkatan peran satuan pondok pesantren		
		4	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMK	Dinas Pendidikan		Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk Baca Tulis Al-Quran Siswa SMP	Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an terhadap siswa SMP		
		5	Jumlah Siswa Yang Hafal Juz Amma pada Pendidikan SLTP dan SLTA			Sekretariat Daerah		Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Penyelenggaraan MTQ	Penyelenggaraan MTQ Kabupaten dan pengiriman peserta MTQ tingkat provinsi
						Sekretariat Daerah		Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca dan tulis Al-Qur'an
						Sekretariat Daerah		Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk Baca Tulis Al-Quran Siswa SMP	Pembelajaran Baca Tulis AlQur'an terhadap siswa SMP

		6	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan Ba'da Maghrib Mengaji	Sekretariat Daerah		Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Peningkatan Budaya Mengaji Bada Maghrib	PIS : Sosialisasi gerakan masyarakat mengaji ba'da maghrib PIK : (1) Pelatihan peningkatan guru mengaji guru Sedong, (2) Sosialisasi peningkatan kualitas SDM DKM & Guru Ngaji Kec. Pangenan (3) Pelatihan Bina Ta'limul Quran (BTQ) Kec Waled
		7	Jumlah Penghapal Alquran	Sekretariat Daerah		Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama		
		8	Prestasi Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Daerah		Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Penyelenggaraan MTQ	Penyelenggaraan MTQ Kabupaten dan pengiriman peserta MTQ tingkat provinsi
		9	Jumlah Kasus Konflik Yang Bernuansa Agama	Sekretariat Daerah		Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga keagamaan
				Sekretariat Daerah		Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan dan Sarana Keagamaan	Pendataan Kelembagaan dan Sarana Keagamaan
2	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	1	Peningkatan Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Bantuan Biaya perasional SMP Negeri 1 Atap
				Dinas Pendidikan	2	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	- PKBM Kesetaraan Paket B Setara SMP - PKBM Kesetaraan Paket A Setara SD

			Dinas Pendidikan	3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyediaan Beasiswa Transisi	Peserta Didik Baru SMP yang kurang mampu
			Dinas Pendidikan	4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Indeks Pendidikan	Kegiatan Expo Pendidikan	Pameran Pembangunan Bidang Pendidikan
			Dinas Pendidikan	5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	Guru SD di Daerah terpencil
			Dinas Pendidikan	6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD	Juara Lomba Gugus SD dan Pengelola Perpustakaan terbaik
			Dinas Pendidikan	7	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	Pelaksanaan lomba: OSN, FLSN, O2SN, Calistung, Pasanggiri Bahasa dan Sastra Sunda/Cirebon
			Dinas Pendidikan	8	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peserta Bimbingan Teknis Guru TIK
			Dinas Pendidikan	9	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	SK Akreditasi Sekolah Dasar
			Dinas Pendidikan	10	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan MONEV US/UN SD
			Dinas Pendidikan	11	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis
			Dinas Pendidikan	12	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional	Dokumen Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
			Dinas Pendidikan	13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Calon Peserta Diklat Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Dinas Pendidikan	14	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Dokumen Bahan Pelatihan dan Sertifikat
			Dinas Pendidikan	15	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Bimtek program dan aplikasi Data Pokok Pendidikan

			Dinas Pendidikan	16	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Bimbingan Teknis Verifikasi dan validasi Data NUPTK
			Dinas Pendidikan	17	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen Rencana dan Program Kerja Pendidikan Tahun 2019
	2	Angka Melek Huruf (AMH) pada Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Dinas Pendidikan	1	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan Fungsional
			Dinas Pendidikan	2	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis LKP
			Dinas Pendidikan	3	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	PTK PNF berprestasi
			Dinas Pendidikan	4	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan dan Sarana Keagamaan	Dokumen Data dan Informasi Pendidikan Non Formal
	3	Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan	1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Dokumen Capaian Target Indek Kepuasan Masyarakat Bidang Pendidikan
			Dinas Pendidikan	2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Dokumen Data Profil Pendidikan dan Kartu NISN Siswa Baru Kelas I SD
			Dinas Pendidikan	3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
			Dinas Pendidikan	4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Fasilitasi Pelayanan Pendidikan	Penyelenggaraan PPDB On Line dan Peserta pembnaan pencegahan dan penyalahgunaan penyimpangan
			Dinas Pendidikan	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyusunan Capaian Target SPM Bidang Pendidikan	Dokumen Laporan Hasil Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan
	4	Angka Partisipasi Kasar (SD, SMP, SMA)	Dinas Pendidikan	1	Program Pendidikan Menengah	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	PKBM Kesetaraan Paket C setara SMA

		5	Angka Partisipasi Murni (SD, SMP, SMA)	Dinas Pendidikan	2	Program Pendidikan Menengah	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket C	Sertifikat Peserta Bimtek
				Dinas Pendidikan	3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	Juara I, II dan III Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
				Dinas Pendidikan	4	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Guru SMP dan Calon Pendamping mendapat Sertifikat
				Dinas Pendidikan	5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MI/SMPLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SMP	1. Materi Sosialisasi dan Bimtek 2. Laporan hasil sosialisasi dan bimtek
				Dinas Pendidikan	6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Pelaksanaan lomba: OSN, FLS2N, O2SN, TUB, Pasanggiri Bahasa dan Sastra Sunda/ Cirebon
				Dinas Pendidikan	7	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Sertifikat dan SK Akreditasi Lembaga Pendidikan
				Dinas Pendidikan	8	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Sertifikat Peserta Bimtek Penyusunan Kurikulum bahan ajar dan Model pembelajaran KF
				Dinas Pendidikan	9	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan UN Kesetaraan Paket A, B dan C
		6	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Dinas Pendidikan	1	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan gedung sekolah SD	Gedung Sekolah
				Dinas Pendidikan	2	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar
				Dinas Pendidikan	3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penambahan ruang guru sekolah SD	Ruang Kerja Guru
				Dinas Pendidikan	4	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Ruang Laboratorium Komputer
				Dinas Pendidikan	5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembangunan ruang serba guna/aula	Ruang Serbaguna pada SDN 1 Marikangen Kec.Plumbon

			Dinas Pendidikan	6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Halaman sekolah yang terpasang vaving blok, Pagar lingkungan sekolah
			Dinas Pendidikan	7	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev BOS dan UN SMP
			Dinas Pendidikan	8	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembangunan perpustakaan sekolah SD	Ruang Perpustakaan Sekolah
			Dinas Pendidikan	9	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD	Jamban Siswa
			Dinas Pendidikan	10	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport Siswa, Buku baca tulis AlQur'an
			Dinas Pendidikan	11	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan
			Dinas Pendidikan	12	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengadaan Mebeleur Sekolah SD	Meubelair Sekolah
			Dinas Pendidikan	13	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	Ruang Kelas Sekolah
			Dinas Pendidikan	14	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	Lapangan dan Sarana Prasarana Olah Raga Sekolah
			Dinas Pendidikan	15	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah SD
			Dinas Pendidikan	16	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	Juara I, II dan III Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten
			Dinas Pendidikan	17	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Guru SD dan Calon Pendamping mendapat Sertifikat
			Dinas Pendidikan	18	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembinaan SMP Terbuka	1. Pengadaan Seragam Batik untuk siswa terbuka kelas 7, 2. Juara Lomolari, 3. Materi Workshop

				Dinas Pendidikan	19	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD	1. Materi Sosialisasi dan Bimtek 2. Laporan hasil sosialisasi dan bimtek
				Dinas Pendidikan	20	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	Ruang Kelas Baru SMP
				Dinas Pendidikan	21	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Lapangan Parkir SMP	Jalan Lingkungan SMP Negeri 2 Suranenggala
				Dinas Pendidikan	22	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Sarana Air Bersih dan Jamban Sekolah
				Dinas Pendidikan	23	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	Sarana Air Bersih dan Jamban Sekolah
				Dinas Pendidikan	24	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport
				Dinas Pendidikan	25	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Alat Peraga dan Peraktik Pembelajaran Siswa SMP
				Dinas Pendidikan	26	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Meningkatnya jumlah petugas dlm peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer (pengobatan rasional, pel.Kes gigi, pel laboratorium, labkesda dan pel
				Dinas Kesehatan	2	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.Tersedianya obat, perbekalan kesehatan dan reagen yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya 2. Terlaksananya mapping alat kesehatan 3. Terlaksananya kalibrasi 72 alkes puskesmas

			Dinas Kesehatan	3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Telatihnya petugas pengelola obat tentang PIO, Konseling, visite dan Home care
			Dinas Kesehatan	4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan di pos kesehatan lebaran, natal & tahun baru dan P3K petugas dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan bencana.
			Dinas Kesehatan	5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan
			Dinas Kesehatan	6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pelayanan Operasi Katarak	Jml Penderita katarak yang ditemukan (penjaringan kasus) dari keluarga miskin dapat dilakukan operasi
			Dinas Kesehatan	7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pelayanan Kesehatan Pengembangan/Khusus	Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan upaya kesehatan tradisional, perawatan kesehatan masyarakat dan
			Dinas Kesehatan	8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji	jumlah jamaah haji yang terpantau kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan dan pembinaan di puskesmas RS dan Dinas Kesehatan
			Dinas Kesehatan	9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Seluruh sekolah melaksanakan penjaringan dan pelayanan kesehatan anak sekolah, Perwakilan SD, Remaja dari umur 12 s/d 18 tahun, anak SD
			Dinas Kesehatan	10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta	Sarana kesehatan swasta melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
			Dinas Kesehatan	11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Penyediaan Dukungan Manajemen BOK	Terselenggaranya operasional puskesmas

			Dinas Kesehatan	12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Penyediaan Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan	Terseleenggaranya operasional puskesmas
			Dinas Kesehatan	13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Terseleenggaranya operasional puskesmas
			Dinas Kesehatan	14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Penilaian Puskesmas Berprestasi	Terpilihnya Puskesmas berprestasi
			Dinas Kesehatan	15	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan	Meningkatnya cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
			Dinas Kesehatan	16	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pengawasan dan Pembinaan Tempat-tempat Umum	Meningkatnya cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
			Dinas Kesehatan	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pengawasan dan Pembinaan Industri	Meningkatnya cakupan industri yang memenuhi syarat
			Dinas Kesehatan	18	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pengawasan Obat (distribusi dan penggunaan)	1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan obat narkotika dan psikotropika 2. sosialisasi Gerakan Masyarakat Menggunakan
			Dinas Kesehatan	19	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Terbinanya industri rumah tangga pangan yang memenuhi syarat kesehatan
			Dinas Kesehatan	20	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Adanya perubahan perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berperilaku sehat	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, Masyarakat, Pemuda Se-Kecamatan Pasaleman, Pemuda dan Kader
			Dinas Kesehatan	21	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Adanya perubahan perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berperilaku sehat	Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif	Petugas Siaga sehat, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa, Desa Siaga
			Dinas Kesehatan	22	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Semua desa memiliki Posbindu

			Dinas Kesehatan	23	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TPM)	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)	Pengunjung Posbindu yang berusia 15-59 tahun, kader posbindu se kecamatan palimanan, Masyarakat
			Dinas Kesehatan	24	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TPM)	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Pengendalian Kesehatan Jiwa	Cakupan Penemuan kasus gangguan kesehatan jiwa menggunakan sistem 2 menit
			Dinas Kesehatan	25	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Penyusunan Standar Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat & Dokumen Naskah Akdemik Perubahan Perda Retribusi
			Dinas Kesehatan	26	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya Penyusunan Buku Profil Kesehatan dan Pertemuan Evaluasi SPM, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Data & Informasi
			Dinas Kesehatan	27	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi kesehatan
			Dinas Kesehatan	28	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Penilaian Kinerja Puskesmas	

			Dinas Kesehatan	29	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Akreditasi Puskesmas	Terselenggaranya Sosialisasi akreditasi, Pendampingan implementasi mutu oleh Tim Pembina dan Tim Mentor, serta Terselenggaranya Evaluasi upaya peningkatan mutu puskesmas
			Dinas Kesehatan	30	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Peningkatan Kapasitas SDM	Tenaga Fungsional yang memiliki sertifikat sebagai tenaga fungsional
			Dinas Kesehatan	31	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Manajemen Pengelolaan SDM	Seluruh Puskesmas mampu memetakan analisis jabatan dan analisis beban kerja di puskesmas
			Dinas Kesehatan	32	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan sarana sanitasi dasar	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Cak. RT tdk merokok dlm ruangan
			Dinas Kesehatan	33	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Akses rumah tangga terhadap sarana air bersih dan akses rumah tangga terhadap jamban sehat,
			Dinas Kesehatan	34	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Klinik Sanitasi	Pasien dan klien diberikan KIP/K di klinik sanitasi dan dilaksanakannya intervensi lingkungan terhadap masyarakat

			Dinas Kesehatan	35	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Cakupan rumah tangga akses terhadap jamban keluarga, Peningkatan akses masyarakat terhadap jamban keluarga, Tokoh Masyarakat, Tomas , Kader Posyandu
			Dinas Kesehatan	36	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Terlaksanya fogg fokus 100% dari kasus, Pemberantasan DBD
			Dinas Kesehatan	37	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	angka penemuan kasustatalaksana pnemoni, tata laksana diare, penemuan kasus kusta, cacat 2 kusta, DBD yang ditangani
			Dinas Kesehatan	38	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya pelayanan imunisasi pada bayi, bumil dan anak sekolah di Kabupaten Cirebon
			Dinas Kesehatan	39	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	Meningkatnya SKD KLB penyakit potensial KLB/wabah di masyarakat, Ketepatan laporan (W1, W2, dan STP)
			Dinas Kesehatan	40	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan HIV/AIDS	1. pelatihan LKB, 2. MVCT, 3. sosialisasi HIV di masyarakat, 4. sosialisasi di populasi kunci, 5. pert pokja HIV, 6. pert jejaring LSM, 7. perte Koordinasi dgn SKPD, 8. HAS, 9. lieflet, 10. poster, 11. lembar balik 12. buku saku, Kesehatan Ibu dan Anak, Masyarakat , 26 Kader KR TARUNA dan PONPES, osialisasi dan Penanggulangan HIV/AIDS di 40 Kecamatan

			Dinas Kesehatan	41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan Tuberkulosis	Angka Cakupan pengobatan semua kasus TB (CDR)
			RSUD Waled	42	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaaa	jumlah kunjungan pasien setahun 180.000 orang
			RSUD Arjawinangun	43	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
	2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanggulangan Komplikasi Kebidanan dan Bayi	Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan persalinan dan nifas normal sesuai dengan standar, pengambilan keputusan berKB, KB Pasca Salin, penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi, Puskesmas PKRT, Pengenalan tanda bahaya bagi kader
			Dinas Kesehatan	2	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Bidan peserta ANC terpadu, Tim pembahasan kasus kematian ibu, tim pengkaji audit maternal, manajemen pelayanan KB di Puskesmas, Penguatan program KIA bagi BPM
			Dinas Kesehatan	3	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Pembangunan Sistem Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal, meningkatnya kinerja klinis Puskesmas PONED
			Dinas Kesehatan	4	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Jaminan Persalinan	
	3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase neo komplikasi yang ditangani rasio kematian bayi	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita	Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan bayi balita sakit dengan MTBS, penanganan BBLR , SDIDTK dan Kelas Ibu Balita,

			Dinas Kesehatan	2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase neo komplikasi yang ditangani rasio kematian bayi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Peningkatan kapasitas nakes dlm penanganan kegawatdaruratan pada bayi, kasus komplikasi neonatal >80 dan serta kasus bayi dan balita sakit yang ditangani oleh nakes dengan pendekatan MTBS dari 50% sehingga jumlah kematian bayi menurun sebesar 25% dari tahun sebelumnya
	4	Balita gizi buruk (BB/TB)	Dinas Kesehatan	1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	% balita ditimbang , % ibu hamil mendapat fe, % remaja puteri mendapat fe, % jumlah KK mengonsumsi garam beryodium, % bayi dan anak balita mndapat kapsul vit A 2 x setahun, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, Ibu hamil kurang darah
			Dinas Kesehatan	2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas	Penanggulangan Gizi Buruk	% balita Gizi Buruk mendapat perawatan, % balita gizi buruk menurun, Meningkatkan kesehatan anak balita gizi buruk, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, Balita dan Balita Gizi Buruk, balita GB, Ibu Hamil dan Balita,
			Dinas Kesehatan	3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas	Penguatan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten	% Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-6 bulan
	5	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	Dinas Kesehatan	1	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS	Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas)	Jumlah fasilitas tk pertama (Puskesmas) yang melaksanakan pelayanan kesehatan

			Dinas Kesehatan	2	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS	Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	meningkatnya jumlah kepesertaan sasaran JKN di Kab. Cirebon
	6	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah rumah sakit terbangun		
	7	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	1	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Pembangunan Puskesmas	
Dinas Kesehatan			2	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Pembangunan Puskesmas Pembantu		
Dinas Kesehatan			3	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Pengadaan Puskesmas Keliling		
Dinas Kesehatan			4	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas		
Dinas Kesehatan			5	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terbangunnya puskesmas pembantu dan polindes	
Dinas Kesehatan			6	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas	Pelayanan Masyarakat untuk warga di 6 desa, pemaganan pkm lurah	

			Dinas Kesehatan	7	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Terbangunnya Puskesmas dengan bangunan yang memadai
			Dinas Kesehatan	8	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Pengembangan Bangunan UPT Kesehatan	Tersedianya UPT Kesehatan Masyarakat
			Dinas Kesehatan	9	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan di UPT Labkesda dan Labkesling Kab Cirebon
	8	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	Dinas Kesehatan	1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah rumah sakit terbangun	Pengadaan Sarana Rantai Vaksin	
	9	Rasio dokter terhadap penduduk	Dinas Kesehatan	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	Legalisasi praktik perorangan
	10	Rasio paramedis terhadap penduduk	Dinas Kesehatan	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	Legalisasi praktik perorangan
	11	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang termasuk ke dalam penerima bantuan iuran (PBI) daerah
			Dinas Kesehatan	2	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	Kemitraan antara Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dan RS dalam rangka Penguatan Sistem Rujukan	Perjanjian kerja sama antara pelayanan kesehatan dasar dengan rumah sakit

				Dinas Kesehatan	3	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	Kemitraan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	Tersedianya perangkat sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan
				Dinas Kesehatan	4	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	Kemitraan dengan Masyarakat Umum dan Organisasi Profesi	Nota kesepahaman (MoU) antara dinas kesehatan dgn masyarakat dan organisasi profesi
		12	Jumlah Posyandu Purnama	Dinas Kesehatan	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tereselenggaranya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Strata Posyandu	Kader posyandu, 1 Paket, 390 orang , 60 kader, 100 orang, 11 desa, 119 posyandu kelurahan x 5 or x 10000 x 12 bl
4	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berkecakupan dan berjiwa kewirausahaan	1	Jumlah kawasan seni	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Bertambahnya produk budaya yang bertahan hidup	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah group seni yang direvitalisasi, direkonstruksi, diwariskan, dan diberi penghargaan
				Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2	Program Pengembangan Nilai Budaya	Bertambahnya produk budaya yang bertahan hidup	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya
				Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kegiatan pameran kesenian
				Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah benda cagar budaya yang dikoleksi
				Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah garapan misi kesenian yang dipergelarkan di luar daerah, Hari Jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN
				Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang dipelihara yang menjadi tujuan wisata
				Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Jumlah Gedung dan Kawasan seni yang dibangun
				Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah judul buku kebudayaan yang dicetak

			Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Bertambahnya kelompok budaya yang dibina	Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	Jumlah lembaga yang dibina melalui kemitraan
	2	Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pergelaran karya seni kreasi baru	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pelaksanaan upacara yang diikuti korp musik
Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pergelaran karya seni kreasi baru	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah	
Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pergelaran karya seni kreasi baru	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah kreasi seni tematis yang difestivalkan tingkat pelajar, seniman daerah dan seniman nasional	
	3	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tersedianya tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pengadaan Sarana Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Berupa: - Mesin Bubut - Kendaraan Praktek Roda 4 - Kendaraan Praktek Roda 2 - Mesin Jahit - Mesin Bordir - Mesin Las Tig - Mesin Las Mig - Mesin Gerinda Tangan - Mesin Bor Tangan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			2	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tersedianya tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja: - Berbasis Kompetensi - Berbasis kewirausahaan	
	4	Jumlah wirausahawan baru	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Program peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			2	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	

			Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
			Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Jumlah pemudayang mengikuti diklat life skills
	5	Angka pengangguran terbuka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja - Jumlah Lowongan Kerja
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Penyebarluasan Informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terlaksananya Penyebarluasan informasi prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Tenaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Job Fair	- Terlaksananya Pameran Bursa kerja dengan peserta - Jumlah lowongan kerja
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Pembinaan Pencari Kerja	Terbinanya Pencari Kerja
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Pemagangan Dalam Negeri	Terlaksananya Pemagangan dalam negeri
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi.

				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang: a. Peraturan Perusahaan: c. Organisasi Pekerja (Serikat Pekerja): d. LKS Bipartit b. Perjanjian Kerja Bersama:
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui: a. Bimtek b. Seminar BPJS
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit	- Terlaksananya Pemilihan Pekerja Teladan - Terlaksananya Pemilihan Perusahaan terbaik - Terlaksananya Bazar LKS Tripartit
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Tercapainya Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Terlatihnya dan terdidiknya masyarakat di lingkungan sekitar industri tembakau
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14	Program Cirebon Bebas Pengangguran	Tercapainya Peningkatan Kesempatan Kerja	Kampung Produktif	Peserta yang sudah mendapat pelatihan
5	Terwujudnya kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Produk Pariwisata Unggulan
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bertambahnya ODTW yang ditata	Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah penataan ODTW
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4	Program pengembangan kemitraan	Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta koordinasi pariwisata

				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	Program pengembangan kemitraan	Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan MICE yang dilaksanakan
6	Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda serta budaya dan prestasi olahraga	1	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti diklat Bimbingan Mental
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3	program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Pembina Pramuka yang mengikuti pelatihan
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4	program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah pemudayang mengikuti diklat paskibra
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan pemuda pelopor kemandirian lingkungan
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6	program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Jumlah Kegiatan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7	Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Bertambahnya pemuda yang memiliki wawasan tentang NAPZA	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Jumlah cabor yang dikompetisikan
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Cabor yang dibina

			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Peringkat prestasi POPDA, PORSENITAS, PORPEMDA, ORTRADPROV, PASANGGIRI	
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat	
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah kegiatan Festival Olahraga rekreatif	
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	13	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Bertambahnya jumlah GOR dan sarana prasarana olahraga yang dibangun Pemkab	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana olahraga yang dibangun	
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Bertambahnya jumlah GOR dan sarana prasarana olahraga yang dibangun Pemkab	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara	
7	Peningkatan koneksitas antar wilayah	1	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya jalan dan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya jalan dan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang Ditingkatkan dan Pembangunan Jalan Baru	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya jalan dan jembatan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Pembangunan Jembatan	Jembatan Kabupaten yang Ditingkatkan	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang Dipelihara Secara Rutin dan Periodik	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jembatan Kabupaten yang terpelihara	

			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Tersedianya data pengguna ruang milik jalan pada jalan Kabupaten	Pemanfaatan Jalan	Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang Dipergunakan Masyarakat dan Jumlah Patok Km/Hm yang Terpasang	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersusunnya Informasi Database jalan dan Jembatan	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan	Tersedianya Data Kondisi Jalan	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersusunnya Informasi Database jalan dan Jembatan	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan	Tersedianya Data Kondisi Jembatan	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai	Pengadaan Alat-alat Berat	Bertambahnya Jumlah Alat-alat Berat	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Bertambahnya Jumlah Peralatan Bengkel Alat-alat Berat	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Bertambahnya Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah Alat-alat Berat yang Dipelihara	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	14	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Aat-alat Berat	Jumlah Peralatan Bengkel Alat-alat Berat yang Dipelihara	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan yang siap pakai	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan yang Dipelihara	
		2	Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Program pembangunan infrastruktur perdesasaan	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesasaan	Terpenuhinya infrastruktur perdesasaan
8	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	1	Jumlah jalan produksi pertanian dan perikanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1				

	2	Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya Prasarana Air minum bagi MBR
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	tersedianya sistem distribusi air minum
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Pembangunan Sanitasi	tersedianya air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	tersedianya sarana dan prasarana air limbah
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	tersedianya air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
	3	Jumlah daerah rawan banjir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Program Pengendalian Banjir	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengaman Pantai	Saluran/Pantai Aman dari Daya Rusak Air laut/Abrasi
			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	Program Pengendalian Banjir	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengaman Pantai	Saluran/Pantai Aman Dari Daya Rusak Air Laut/Abrasi

		4	Persentase pengangkutan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<p>PIS : a. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah dan kelembagaan bank sampah</p> <p>b. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui bintek pengelolaan sampah</p> <p>c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan sampah plastik</p> <p>d. Alat kebersihan dan bahan pembersih</p> <p>e. Peralatan pelebur plastik</p> <p>PIK :</p> <p>a. Pelatihan pengolahan sampah</p> <p>b. Diklat pengelolaan sampah</p> <p>c. Bintek peningkatan kerajinan bahan baju sampah kering</p> <p>d. Bintek peningkatan pengelola sampah Desa</p> <p>e. Bintek pengelolaan sampah mandiri</p> <p>f. Pelatihan pengelolaan sampah</p>
		5	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Bangunan Pelengkap Jalan yang Dibangun
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			3	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	

		6	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	PIS : Penyediaan prasarana dan sarana persampahan PIK : a. Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) b. Penyediaan kendaraan roda 3 pengangkut sampah c. Pengadaan mesin pencacah plastik d. Pengadaan mesin kompos e. Pengadaan mesin pengolah sampah f. Pengadaan mesin penghancur sampah (incenerator) g. Pengadaan kontainer sampah h. Pengadaan ionisator dengan hanggar i. Pengadaan alat
		7	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2	Program Pengembangan Perumahan	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	tercapainya pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan			3	Program Pengembangan Perumahan	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Adanya stimulan untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan hunian layak huni	
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan			4	Program Pengembangan Perumahan	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Verifikasi Sarana dan Prasarana Utilitas (PSU) Perumahan	tercapainya verifikasi PSU sesuai dengan aturan	
		8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Dinas Pemadam Kebakaran	1	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Adanya Perda yang baru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
				Dinas Pemadam Kebakaran	2	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersosialisasinya Penyuluhan Pencegahan bahaya Kebakaran

				Dinas Pemadam Kebakaran	3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Adanya Pengadaan Sarpras Kelengkapan mobil Pemadam Kebakaran dan Peralatan Safety Anggota damkar
				Dinas Pemadam Kebakaran	4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
				Dinas Pemadam Kebakaran	5	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rehabilitasi Mobil Pemadam Kebakaran
				Dinas Pemadam Kebakaran	6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencapaian SPM Responsive Time
9	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	1	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	PIS : Penyediaan prasarana dan sarana persampahan PIK : a. Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) b. Penyediaan kendaraan roda 3 pengangkut sampah c. Pengadaan mesin pencacah plastik d. Pengadaan mesin kompos e. Pengadaan mesin pengolah sampah f. Pengadaan mesin penghancur sampah (incenerator) g. Pengadaan kontainer sampah h. Pengadaan ionisator dengan hanggar i. Pengadaan gerobak sampah

	2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Penataan RTH	PIS : Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk umum (alun-alun kecamatan dan hutan kota) PIK : a. Pembangunan gapura b. Pembuatan RTH c. Penghijauan d. Taman kota
			Dinas Lingkungan Hidup	2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pelayanan umum dan taman
	3	Prosentase kawasan lindung	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	a. Pembangunan sumur resapan b. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi konservasi mata air c. Publikasi konservasi di media
			Dinas Lingkungan Hidup	2	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b. Film dokumenter/iklan layanan masyarakat c. Laporan akhir inventarisasi gas rumah kaca di Kab.
	4	Penghargaan Adipura	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	a. Buku data non fisik adipura b. Sosialisasi program adipura c. Pemberian sarana kebersihan untuk masyarakat d. Keterlibatan masyarakat dalam gerakan bersih lingkungan e. Penghargaan adipura

		5	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Koordinasi Pengelolaan Prokashih/ Superkashih	a. Koordinasi forum masyarakat peduli sungai dan pembentukan kelompok masyarakat peduli sungai b. Masyarakat yang terlatih c. Laporan data sumber pencemar sungai d. Perhitungan beban pencemar DAS e. Partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah di
		6	Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Pemantauan Kualitas Lingkungan	a. Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan b. Laporan akhir pemetaan dan analisis kualitas lingkungan
	Dinas Lingkungan Hidup			2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	a. Kegiatan usaha milik pemerintah maupun swasta yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup b. Laporan hasil monitoring ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup	
	Dinas Lingkungan Hidup			3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Pengkajian Dampak Lingkungan	Dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	
		7	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	a. Perusahaan yang diuji kualitas air limbahnya, emisi limbahnya dan yang memperoleh proper b. Daftar peringkat kinerja perusahaan c. Sosialisasi proper

				Dinas Lingkungan Hidup	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	a. Penyusunan peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup b. Tersosialisasikannya peraturan Bupati tentang pengelolaan lingkungan hidup c. Laporan hasil kegiatan
				Dinas Lingkungan Hidup	3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Penilaian dokumen lingkungan
				Dinas Lingkungan Hidup	4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan	a. Terlayannya pengaduan kasus lingkungan b. Laporan hasil kegiatan c. Tersosialisasikannya pos pengaduan ke setiap kecamatan
				Dinas Lingkungan Hidup	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	Penanganan Limbah Batu Alam	a. Pemetaan dan inventarisasi kegiatan industri batu alam b. Penyusunan Amdal relokasi industri batu alam c. Pembangunan kawasan terpadu industri batu alam
10	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Jumlah komunitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	terbinanya kelompok usaha usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal
		2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	Fasilitasi Penguatan TP.PKK	terlatihnya kader dan TP. PKK disetiap tingkatan : (jumlah PKK aktif : RT 2.593, RW 9.168, desa/kel. 424, Kec. 40)

				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjnal Posyandu	terbinanya Pokjnal Posyandu : (jumlah posyandu : pratama 0, madya 1.189/46%, purnama 738/28%, mandiri 664/26%, total 2.591 per Desember 2016)
		3	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya Sosialisasi TTG 300 orang dari 10 Desa dan terlaksananya Gelar TTG Tingkat Provinsi Serta
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Terlaksananya revitalisasi Posyantek
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MP	terlatihnya para pelaku PNPM-MPd mengenai pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-
11	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	1	Nilai PDRB	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana pembangunan daerah yang memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
		3	PDRB per kapita	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Dokumen PDRB kecamatan

			Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Penyusunan dan Pengumpulan Data Survei Ekonomi Daerah	Dokumen Survei Ekonomi Daerah (SUSEDA)
	4	Tingkat inflasi	Sekretariat Daerah	1	Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perekonomianh	Terwujudnya Kebijakan Pemerintah Daerah yang optimal	Fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Laporan hasil rakor TPID
			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Terpantaunya perkembangan harga barang kepokmas dan barang penting/strategis serta ketersediaan stok barang kepokmas berbasis web
	5	Jumlah daerah rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Penanganan daerah rawan pangan	- Laporan Analisis SKPG - Laporan hasil investigasi penanganan daerah rawan pangan - Laporan kajian pemetaan kerawanan pangan - Rumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan
			Dinas Ketahanan Pangan	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	- Laporan data potensi produksi pangan - Laporan hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan bulanan - Aplikasi database potensi produksi pangan pangan
			Dinas Pertanian	3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan	- Terbinanya KWT Terlaksananya LCM Terlaksananya Bintek Pengolahan Pangan Lokal - Terlaksananya Bintek Optimalisasi Lahan Pekarangan - Terlaksananya Pelatihan KRPL - Terlaksananya HPS Tingkat Nasional dan Provinsi
			Dinas Pertanian	4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Dokumen pelaksanaan kegiatan

			Dinas Pertanian	5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Gabah CPPD - Dokumen Raperda - Dokumen Pelatihan - Dokumen Bimtek
			Dinas Pertanian	6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	- Dokumen bimbingan teknis kawasan mandiri pangan - Dokumen pelatihan pelatihan pengembangan usaha mandiri pangan - Dokumen hasil temu teknis kawasan / desa mandiri pangan - Dokumen hasil evaluasi desa mandiri pangan
			Dinas Pertanian	7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	Laporan Data Statistik Tahunan dan Audit Lahan
			Dinas Pertanian	8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya fasilitas penerapan penanganan panen dan pasca panen yang baik
			Dinas Pertanian	9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
			Dinas Pertanian	10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	- Terkoordinirnya kegiatan-kegiatan serealia TA.2018 melalui kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi - Terlaksananya Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Tanaman dan Pengendalian Hama Terpadu

			Dinas Pertanian	11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	tertanaminya lahan perkebunan dengan komoditi tanaman rempah jahe gajah tanaman rempah jahe emprit tanaman kelapa dalam tanaman kelapa genjah tanaman sereh wangi tanaman lada pendataan potensi komoditas perkebunan terlaksananya pendampingan dan monev kegiatan
			Dinas Pertanian	12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	3100 bibit tanaman
			Dinas Pertanian	13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Luas Penangkaran beni padi; Jumlah benih padi bermutu yang dihasilkan
	6	Nilai investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan Kerjasama Dalam Pengembangan Investasi di Kabupaten Cirebon
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Data Minat Investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Tercapainya Koordinasi Tentang Skala Prioritas Potensi Investasi
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terbinanya Perusahaan
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya Pameran Investasi

			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Penilaian Perusahaan PMDN / PMA Terbaik	Data dan Profil Perusahaan
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Kajian Teknis Untuk Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pelayanan Perizinan (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air, dan Izin Penyelenggaraan Rumah
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi	Penanganan Permasalahan Pengaduan Penanaman Modal Terkait Investasi
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	- Data Kajian Sumberdaya Yang Terkait Investasi - Data Hasil Analisa Kelayakan Kajian Potensi Investasi - Review Kajian Akademis Tentang RUPM
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat desa	Sosialisasi di Bidang Perizinan	Tersosialisasinya Masyarakat/ Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Izin
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Terbangunnya SICANTIK (Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Operasionalisasi Pelayanan Perizinan	SK Perizinan

			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Terpeliharanya Manajemen Mutu Pelayanan /Upgrading ISO 9000:2008
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Penyusunan Data Base Perizinan	Data dan Laporan Perizinan Serta Terwujudnya Database Manajemen Sistem
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Penyusunan Data Minat Investasi PMA /PMDN dan Non PMA / PMDN	Tersusunnya Dokumen Data Minat Investasi
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Survey IKM	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kepada Para Pemohon Perizinan/Non Perizinan Yang dipilih Secara Acak, Setelah Para Pelaku Pemohon Selesai Membuat Izin dan Menerima SK Perizinan/Non Perizinan
	7	Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Pengembangan SIMKOP data koperasi dan UMKM
			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Terlaksananya sosialisasi pemahaman prinsip-prinsip koperasi dan UU No. 25 Th. 1992 tentang perkoperasian
			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Terselenggaranya penilaian koperasi berprestasi dan seminar pengembangan perkoperasian

		8	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi	Diklat Koperasi Baru/Pengurus Baru
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Revitalisasi dan Aktivasi Koperasi	Identifikasi permasalahan koperasi dan aktivitas koperasi
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Penataan Sarana dan Prasarana Pasar	Pembangunan/pemeliharaan pasar, pengurusan drainase, pengisian tabung pemadam kebakaran, serta pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar	Pembinaan manajemen pengelolaan pasar, sosialisasi penyelenggaraan pasar, sosialisasi pembinaan pasar desa, Pembinaan petugas keamanan, Pembinaan petugas pemungut retribusi, operasi terpadu keamanan dan ketertiban pasar, Survey
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Pemungutan retribusi di pasar Pemda disekitar pasar pemda
12	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih	1	Menurunnya Jumlah penduduk miskin	Sekretariat Daerah	1	Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah subsidi reskin untuk penerima manfaat		
				Dinas Sosial	2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan	Peserta dan Pendamping PKH, UPPKH.
				Dinas Sosial	3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Keluarga Miskin	Keluarga Miskin yang mempunyai Ketrampilan
				Dinas Sosial	4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	PRSE yang mempunyai Ketrampilan
				Dinas Sosial	5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Eks Pekerja Migran bermasalah Sosial mempunyai Ketrampilan

			Dinas Sosial	6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin (Raskin)	1. Kendaraan bermotor roda 3 pendukung distribusi Raskin. 2. Laporan hasil Koordinasi Fasilitasi, Monitoring Beras Miskin,
			Dinas Sosial	7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Masyarakat memiliki pengetahuan mengenai PMKS
			Dinas Sosial	8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	Bantuan Transport bagi Orang Terlantar
			Dinas Sosial	9	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni
			Dinas Sosial	10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia	Lanjut Usia tidak potensial yang telah mempunyai ketrampilan
			Dinas Sosial	11	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Jalanan	Anak Jalanan yang telah mempunyai Ketrampilan
			Dinas Sosial	12	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	AMPK yang mempunyai Ketrampilan
			Dinas Sosial	13	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	ABH yang telah Mempunyai ketrampilan.
			Dinas Sosial	14	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pelayanan sosial kepada PMKS
			Dinas Sosial	15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Fasilitasi Perlindungan Jaminan Sosial	Rakor Tk. Kabupaten, Verifikasi Data JKN PBI
	2	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1				

13	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	1	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi dan pembinaan penyusunan IKM terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah
				Sekretariat Daerah	2	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Fasilitasi SP	Fasilitasi dan pembinaan penyusunan IKM terhadap OPD dilingkungan Pemerintah Daerah
		2	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	Sekretariat Daerah	1	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi	Terimplementasikannya SOP	Fasilitasi SOP	Fasilitasi dan pembinaan penyusunan SOP terhadap OPD dilingkungan Pemerintah Daerah
		3	Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	Sekretariat Daerah dan 40 Kecamatan	1	Program administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya rasio jenis perizinan dan rekomendasi yang diterbitkan	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Terlaksananya inovasi pelayanan administrasi kecamatan terpadu
14	Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	1	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi PNS Daerah	Fasilitasi Program Magister Jumlah PNS yang mendapat bantuan dana pendidikan D.IV/S1 dan S2
			2	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	Sekretariat Daerah	1	Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Standar Kompetensi Jabatan
		Sekretariat Daerah			2	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Kajian Analisis Jabatan	Tersedianya Informasi Jabatan
		Sekretariat Daerah			3	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Evaluasi Jabatan	Tersedianya data nilai peingkatan jabatan
		Sekretariat Daerah			4	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Penataan Jabatan Fungsional Tertentu	Pemahaman dan terpenuhinya jabatan fungsional tertentu
		Sekretariat Daerah			5	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan TUPOKSI dan URTU JFU organisasi perangkat daerah	Penataan Tupoksi SKPD
		Sekretariat Daerah			6	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Sistem Aplikasi Analisis Jabatan (SINJAB) PNS	Sistem aplikasi jabatan ANJAB
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah peserta diklatpim IV
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Pengiriman peserta diklat terhadap kebutuhan diklat Daerah

			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi PNS Daerah	Fasilitasi Program Magister Jumlah PNS yang mendapat bantuan dana pendidikan D.IV/S1 dan S2
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah peserta diklatpim IV
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Pengiriman peserta diklat terhadap kebutuhan diklat
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan Penjurangan Struktural bagi PNS Daerah	PNS Lulus Diklatpim tk II & III
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme PNS Daerah	PNS Lulus Ujian dinas dan UPKP
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pengembangan Diklat/Analisis Kebutuhan Diklat	Data kebutuhan diklat prioritas 1 tahun yang akan datang
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Penyusunan dan Penerbitan Majalah Pembinaan	Terbitnya majalah Pembinaan
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah pejabat yang diseleksi
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi PNS Daerah	Penilaian Manajemen kepegawaian Tingkat Kabupaten Cirebon
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Penilaian Manajemen Kepegawaian/BKPPD Award	Penilaian Manajemen Kepegawaian Tingkat Kabupaten Cirebon
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	Program Pengembangan Data/Informasi	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Penataan Data Aparatur	Tersedianya dokumen aparatur elektronik
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20	Program Pengembangan Data/Informasi	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya aplikasi pelayanan dan manajemen kepegawaian yang terhubung
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21	Program Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional	Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22	Program Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala	Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala

15	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih	1	Rata-rata capaian kinerja SKPD	Inspektorat Kabupaten	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pemerintahan	1 dok lap.review keu & 1 dok lap.evaluasi LAKIP OPD, Review RKA dan PK APIP
		2	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Inspektorat Kabupaten	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan hasil pemeriksaan kasus
				Inspektorat Kabupaten	2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan hasil pemberantasan pungli
		3	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	Inspektorat Kabupaten	1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terwujudnya SPIP Kabupaten Cirebon	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Laporan pelaksanaan SPIP OPD
				Inspektorat Kabupaten	2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan hasil pemeriksaan/ monitoring
				Inspektorat Kabupaten	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Laporan hasil pemeriksaan kasus
				Inspektorat Kabupaten	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Laporan hasil tindak lanjut

				Inspektorat Kabupaten	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Laporan monitoring dan evaluasi Inpres No.5 tahun 2004, koordinasi dan sosialisasi penagwasan
		4	Peningkatan Pendapatan asli daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Peningkatan dan Penerimaan 5 Jenis Pajak (Pajak BPHTB, PBB, SBW, PPJ dan PAT)	Meningkatnya Penerimaan Pajak BPHTB
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak	Peningkatan Kemampuan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW	Peningkatan Kemampuan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB Masal	Data Objek dan Subjek PBB Yang Termutakhir
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang)	Tersusunya Laporan Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah Secara Periodik
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah	Tersampainya Informasi Tentang Pajak Daerah
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Fasilitasi dan Pengaduan Pajak Daerah	Terfasilitasinya Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Daerah
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Pembukuan Wajib Pajak

			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Terkelolanya Piutang Pajak Daerah
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Restoran pada SKPD	Meningkatkan Pemahaman Wajib Pungut
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	1. Data CWP Hasil Penjaringan 2. Data Potensi 6 Jenis Pajak
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran	Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak Restoran
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pemungutan 6 Jenis Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah Tepat Waktu
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Kajian Pemetaan Data Pajak Parkir, Air Tanah, PPJ dan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tersusunnya Data Pajak Daerah Yang Valid
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	16	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	Meningkatnya Validasi Data Para Wajib Pajak Daerah
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame	Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Meningkat
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	18	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Peningkatan Pelayanan 6 Jenis Pajak Daerah	Data Jenis Pajak Daerah Yang di Verifikasi
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	19	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan	Terpilihnya Wajib Pajak Teladan

			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	20	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terciptanya Penerimaan Pajak Daerah
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	21	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan pelayanan Pajak PBB dan BPHTB
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	22	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Pemutakhiran Basis Data PBB dan BPHTB
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	23	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tersajinya Data Piutang PBB

Sumber, Maret 2019
Pj. BUPATI CIREBON
TTD

DICKY SAROMI